

n 23 N

n

23

N

D. N. Aidit

Bersatu

Untuk Menyelesaikan

Tuntutan² Revolusi Agustus 1945



BIBLIOTHEEK KITLV



0172 5405

1010 065707419

n 23 N

D.N. Aidit

★

Bersatu
Untuk Menjelesaikan
Tuntutan² Revolusi Agustus 1945
dan bahan² lain dari sidang pleno ke-IV
CCPKI jang diperluas

(achir Djuli 1956)



Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1956

M. S. F.

611133

Sekedar Pengantar

Kalangan² reaksioner dengan berbagai tjara sering menggambarkan bahwa revolusi nasional kita mengalami sematjam "djalan buntu". Kalangan² reaksioner itu sering menggambarkan bahwa Rakjat "tidak mempunyai kemampuan", bahwa pemilihan umum j.l. "tidak merubah apa²". Maka merekapun berusaha keras "mematangkan" keadaan, agar hasil² pemilihan umum j.l. ditiadakan, agar yang berkuasa di Indonesia mereka sendiri, golongan kepalabatu sadja, singkatnja, mereka mau mengganti demokrasi yang mengharuskan koalisi klas² sekarang ini dengan diktatur satu klas sadja.

Kaum progresif sendiri banjak yang ber-tanja², meskipun demokrasi pasti menang, tetapi bagaimana tjaranja kita memetjahkan begitu banjak persoalan yang kita hadapi? Bagaimana menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja? Bagaimana melanjutkan Revolusi itu, bagaimana mendjundjungtinggi pandji² Revolusi itu, bagaimana memenangkan Revolusi itu?

Sidang pleno ke-IV CCPKI yang diperluas baru² ini, mulai Laporan Umumnja sampai pada Resolusi²nja, memberikan djawaban yang tepat atas semua persoalan pokok itu.

Inilah sebabnja material sidang pleno CCPKI itu kita terbitkan seluruhnja didalam penerbitan yang tersendiri, agar siapapun, terutama sekali kader² revolusioner, dapat mempeladjadi, menimbang, memahami dan achirnja melaksanakan tugas² nasional yang diletakkan didalamnja.

Penerbit

Djakarta, 17 Agustus 1956.

Kawan-kawan,

Hampir satu tahun telah berlangsung sedjak sidang pleno Central Comite ke-III dalam bulan Agustus 1955 sampai sidang pleno Central Comite ke-IV ini. Politbiro Central Comite pernah mempertimbangkan untuk mengadakan sidang pleno Central Comite dalam bulan November 1955, djadi segera sesudah pemilihan umum untuk Parlemen. Tetapi hal ini tidak mungkin berhubung dengan kesibukan Partai kita dalam menghadapi pemilihan untuk Dewan Konstituante. Karena sidang pleno Central Comite tidak mungkin diadakan pada waktu itu, padahal Partai kita menghadapi berbagai masaalah penting, terutama jang berhubungan dengan penjimpulan keadaan politik dan keadaan Partai sesudah pemilihan Parlemen dan berhubung dengan penetapan tugas² Partai dalam menghadapi pemilihan Dewan Konstituante, maka dilangsungkanlah dalam bulan November 1955 sidang Politbiro jang diperluas dengan anggota² Central Comite bukan-anggota Politbiro jang bertempat tinggal di Djakarta.

Banjak perubahan jang sudah terdjadi sedjak sidang Central Comite jang ke-III dalam situasi internasional maupun dalam situasi dalam negeri kita.

Dalam situasi internasional kita melihat proses perkembangan jang sangat tjepat dan akan lebih dipertjepat lagi berhubung dengan sukses² jang ditjapai oleh negeri² kubu sosialis, dan berhubung dengan perkembangan² baru daripada gerakan kemerdekaan dan gerakan demokrasi, terutama di-negeri² Asia-Afrika. Kongres ke-XX Partai Komunis Sovjet Uni (PKSU) jang dilangsungkan dalam bulan Februari jl. merupakan pendorong jang penting dalam mempertjepat perkembangan selandjutnja daripada gerakan kemerdekaan, gerakan demokrasi dan gerakan perdamaian, serta perkembangan disegala lapangan di-negeri² kubu sosialis, terutama perkembangan di Sovjet Uni sendiri.

Dalam situasi dalam negeri kita djuga mengalami perkembangan² jang menggembirakan sesudah pemilihan umum jang berse-

djarah untuk Parlemen dan Dewan Konstituante. Usaha² kaum reaksioner untuk menghalangi perkembangan ini, a.l. dengan ngotot mempertahankan kabinet Burhanuddin Harahap yang njata mengadakan tindakan² anti-demokratis dan melanggar azas² politik luarnegeri Indonesia yang anti-kolonialisme dan anti-perang, ditentang dengan keras oleh front Rakjat yang luas dan yang berakibat gulung tikarnya kabinet BH.

Sebagai pengganti kabinet BH yang reaksioner, yang mula²-nja ngotot tidak mau turun panggung pada waktunja, maka berdirilah kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 yang programnja agak madju dan dapat disokong oleh Partai kita. Pada saat² pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 terdjadilah gelombang pasang gerakan Rakjat yang menuntut duduknja orang² Komunis didalam kabinet. Politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi yang menolak turutnja orang² Komunis dalam kabinet, merupakan penghalang yang terutama bagi pelaksanaan tuntutan Rakjat yang adil ini.

Sudah mendjadi rahasia umum, bahwa Masjumi menerima program yang agak madju dari kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 bukanlah karena sungguh² setuju pada program tsb., tetapi hanya se-mata² agar dirinja tidak terisolasi, supaya mendapat kedudukan dalam pemerintah dan supaya dimana mungkin menghalangi pelaksanaan bagian² yang madju daripada program pemerintah. Dengan demikian terbentuklah satu kabinet yang programnja agak madju tetapi komposisi dan personalianja tidak mentjerminkan kemampuan dan kedjudjuran untuk melaksanakan program tsb.

Berkat desakan Rakjat dan Parlemen, dan berkat berhasilnja perdjuaan menteri² yang madju terhadap menteri² yang reaksioner, kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 telah membatalkan seluruh persetudjuan KMB setjara sefihak (unilateral), sedangkan rentjana kabinet BH adalah tanpa pembatalan apa jg. dinamakan piagam „penjerahan kedaulatan“. Disamping itu, walaupun pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet sekarang belum mempunyai akibat² yang langsung terhadap kedudukan ekonomi dari kaum kapitalis besar Belanda, tetapi ini adalah lebih baik djika dibanding dengan rentjana pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet BH yang didahului oleh „statement of policy“ (pernyataan politik) yang bukan sadja mendjamin keuntungan modal² imperialis tetapi djuga mengundangnya untuk mengadakan penanaman² baru di Indonesia. Peristiwa pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 membuktikan kebenaran politik yang me-

nuntut pembatalan persetudjuan KMB yang selama 7 tahun didjalankan oleh PKI setjara konsekwen dan membuktikan kesetiaan Rakjat terhadap tjita² Revolusi Agustus 1945.

Setia pada programnja, Partai kita yang pada dewasa ini sudah mendjadi Partai Komunis yang besar, mengambil bagian yang penting dalam mendorong madju politik luarnegeri Indonesia, dalam mengeratkan kerdjasama antara Rakjat² Asia-Afrika atas dasar anti-kolonialisme dan untuk perdamaian, dan dalam mendorong perkembangan situasi dalam negeri kearah yang menguntungkan Rakjat Indonesia.

Selama dalam waktu hampir satu tahun sedjak sidang pleno Central Komite ke-III, Partai kita sudah melakukan banjak pekerdjaan dan sudah dapat mengatasi banjak kesukaran, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini masih sangat banjak pekerdjaan yang harus dilakukan oleh Partai kita dan masih banjak kesukaran² yang harus diatasi. Situasi sekarang mendesak supaya Partai kita lebih giar dan lebih sistimatis melakukan pekerdjaan² yang urgen untuk pelaksanaan tuntutan² politik, ekonomi, dan kulturil daripada Rakjat Indonesia serta untuk mendidik anggota² Partai yang banjak itu agar mereka sungguh² memiliki ideologi Marxisme-Leninisme, agar mereka senantiasa mengetahui situasi politik negerinja dengan baik dan agar mereka mendjadi elemen yang aktif, yang mempunyai dajatjipta dan yang berdisiplin didalam organisasi Partai. Hanya dengan bekerdja demikian PKI akan tetap berdiri dibarisan paling depan dalam melaksanakan tuntutan² yang paling mendesak daripada massa Rakjat dan dalam melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

I

Situasi Internasional dan Dalam negeri

Sampai kemanakah Rakjat Indonesia dapat mengembangkan kekuatannya untuk mentjiptakan sjarat² guna melaksanakan tuntutan² ekonomi, politik dan kulturil yang paling mendesak dan untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja? Ini tergantung pada kebangkitan, persatuan dan perdjuaan Rakjat Indonesia sendiri. Hal yang njata jalah, bahwa situasi internasional dan situasi dalam negeri memberi kemungkinan yang luas bagi Rakjat Indonesia untuk mengembangkan kekuatannya.

Bagaimanakah situasi internasional sekarang?

Untuk mengerti situasi internasional sekarang, laporan Central

Comite PKSU kepada Kongres ke-XX sangat membantu kita. Laporan Central Comite PKSU tsb. telah membeberkan dengan jelas beberapa pokok mengenai perkembangan internasional mas kini, telah menerangkan kepada kita djalannya kejadian² internasional sekarang dan telah menundukkan perspektif bagi masadepan.

Situasi internasional sekarang sangat dipengaruhi oleh politik Sovjet Uni dan negara² kubu sosialis yang dengan konsekwen mendjalankan politik Leninis tentang hidup berdampingan setjara damai diantara negara² yang sistim sosialisnya ber-beda², oleh kebulatan dan kejakinan negara² kubu sosialis dan gerakan Rakjat tjintadamai diseluruh dunia untuk mewudjudkan dalil bahwa perang mungkin ditjegah dalam zaman sekarang dan oleh kebangunan Rakjat negeri² djadjahan, setengah-djadjahan dan Rakjat negeri² yang baru merdeka.

Masaalah dunia dan umatmanusia mas kini yang terpenting ialah masaalah mempertahankan perdamaian dunia. Terutama berkat inisiatif yang sangat banjak dari Sovjet Uni untuk menormalkan hubungan² antara negara², termasuk hubungan antara Sovjet Uni dengan Inggeris, Perantjis dan djuga dengan Amerika Serikat, sekarang tertijpta keredaan tertentu dalam situasi internasional.

Memang benar, bahwa selama masih ada imperialisme dasar ekonomi untuk timbulnya peperangan masih tetap ada. Hal ini tidak kita bantah. Oleh karena itu, selama masih ada imperialisme, sedikitpun tidak boleh ada kekendoran untuk mempertahankan perdamaian. Kita harus terus mempertinggi kewaspadaan kita, harus aktif mengambil bagian dalam mengawasi dan menggagalkan intrik² kalangan² yang tidak menginginkan adanya keredaan ketegangan internasional, kita harus menentang perluasan angkatan² bersendjata dari negara² besar, kita harus menentang dan mengutuk pertjobaan² sendjata atom. Ketjaman yang tidak tahu malu daripada menteri luarnegeri Amerika Serikat Dulles dan wakil presiden Amerika Serikat Nixon baru² ini terhadap politik netral yang dianut oleh kebanyakan negara² Asia-Afrika sebagai sesuatu yang „immoril” (tidak bersusila) dengan jelas menggambarkan politik Amerika Serikat yang tidak menginginkan adanya keredaan ketegangan internasional.

Tetapi sekarang imperialisme sudah tidak lagi merupakan sistim dunia yang meliputi segala-galanya. Sekarang sistim sosialis sudah merupakan sistim dunia yang mempunjai alat² moril dan materiil untuk mentjegah agresi, sedangkan sedjumlah besar negeri² diluar kubu sosialis yang berpenduduk be-ratus² djuta dengan giat beker-

dja mentjegah peperangan, demikian djuga gerakan buruh dan gerakan Rakjat untuk perdamaian di-negeri² kapitalis sendiri. Semuanya ini menundukkan, bahwa sekarang sudah ada sjarat² sosial dan politik untuk mentjegah kaum imperialis mengobarkan peperangan. Kenyataan² ini memungkinkan ditjegahnja perang dalam zaman sekarang.

Dalam keadaan sekarang dapat kita simpulkan, bahwa timbulnya front persatuan internasional anti-perang dan anti-kolonialisme adalah merupakan pergeseran demokratis dan progresif yang menguntungkan perdamaian dan kemerdekaan dan yang mengisolasi politik perang dan politik membela negara² pendjadjah dari Amerika Serikat.

Dalam keadaan demikian, maka kaum imperialis Amerika Serikat terpaksa harus mengurangi sifat kepalabatunja, misalnja dengan bersedia berunding dengan RRT pada tingkat dutabesar, mengidjinkan djenderal²nja berkundjung ke Moskow, menjetudjui beberapa wakil Rakjat Sovjet berkundjung ke Amerika Serikat, memberikan „bantuan ekonomi” seperti yang sudah ditawarkan kepada beberapa negeri netral, sikap „pura² hendak bersahabat dengan negeri² Asia, meskipun difihak lain dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menguasai negeri² ini lewat persekutuan² militer. Tentang ini djuga dibuktikan oleh konferensi kepala-kepala pemerintah dari negara-negara Empat Besar yang dilangsungkan pada pertengahan tahun yang lalu, konferensi mana telah memberikan sumbangan-sumbangan untuk mengurangi ketegangan internasional dan untuk mempertinggi saling pertjaja dan kerdjasa antara bangsa-bangsa sesuai dengan kehendak Rakjat² yang tjintadamai diseluruh dunia.

Berdasarkan keadaan seperti tsb. diatas itulah kita harus melihat dan mengartikan terdjadinja penerimaan yang setjara istimewa oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Presiden Sukarno dalam kundjungannya baru² ini ke Amerika. Adalah satu hal yang bidjaksana bahwa Presiden Sukarno dan pemerintah Indonesia telah menggunakan situasi baik ini untuk membela dan memperdjuaikan tuntutan² demokratis dan perdamaian dari Rakjat Indonesia.

Indonesia adalah salahsatu negara yang paling berkepentingan dengan keredaan daripada ketegangan² internasional, dengan terdjaminnja perdamaian dunia dan dengan dikalahkannya kekuatan² kolonial dimanapun djuga didunia. Indonesia adalah salahsatu negara yang samasekali tidak merasa diuntungkan dengan adanya persekutuan² militer seperti SEATO, NATO, masjarakat Pertahanan Eropa dan Pakta Bagdad yang didirikan dengan paksaan

golongan² yang berkuasa di Amerika Serikat. Blok² militer ini adalah faktor² kekuatan untuk memperuntjing ketegangan internasional, satu hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar negara² didunia. Bagi Indonesia dan bagi banyak negeri² lain, memasuki blok militer tidak hanya berarti memperkuat blok perang, tetapi juga berarti mengorbankan kemerdekaan.

Dalam keadaan internasional seperti demikian, apakah tugas khusus Indonesia?

Sebagai anggota yang terkemuka dari kerdjasama Asia-Afrika, Indonesia dengan politik luarnegerinya yang maju mempunyai syarat² yang sangat baik untuk turut memperjuangkan tujuan² damai, seperti pengurangan persendjataan, pelarangan pertjobaan² sendjata atom, pemasukan RRT kedalam PBB, menjokong perjuangan kemerdekaan bangsa² lain, memajukan kerdjasama antara negara², mengembangkan kontak² perseorangan dan pertukaran delegasi² serta memajukan kerdjasama antara organisasi² Rakjat seperti yang sudah terdjadi dengan pelaksanaan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika dalam bulan Djuni yang lalu. Dengan inisiatif yang lebih banyak dan kegiatan yang lebih besar dilapangan politik internasional, Indonesia tidak hanya akan berdjasa dalam usaha menggagalkan maksud² perang dari kaum imperialis, tetapi Indonesia juga akan lebih bisa mendjamin kemerdekaannya dan lebih memungkinkan pembangunan ekonomi nasionalnya.

Dilihat dari sudut politik, kedudukan Indonesia dalam dunia internasional sekarang adalah kuat. Indonesia adalah anggota PBB yang sekarang suaranya tidak bisa diabaikan dan disamping itu Indonesia adalah salahsatu negara yang terkemuka diantara negara² Asia. Hubungan² diplomatik Indonesia sekarang sudah makin luas dan kundjungan² pemimpin² Rakjat dan tokoh² negara ke-luarnegeri, termasuk kundjungan presiden Sukarno ke Amerika dan negara² Barat lainnya yang kemudian akan disusul oleh kundjungan ke-negara² kubu sosialis, sangat memperkuat kedudukan internasional Indonesia.

Untuk lebih memperkuat kedudukan internasionalnya, Indonesia seharusnya dengan konsekwen melaksanakan putusan² Konferensi Asia-Afrika di Bandung jg. disimpulkan dalam „Dasa Sila” („Sepuluh Prinsip”) dan yang sesuai dengan lima prinsip mengenai hubungan² internasional, jaitu saling menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan, non-agresi, tidak tjampurtangan dalam urusan² dalamnegeri masing², memajukan hubungan² internasional atas dasar persamaan dan saling menguntungkan serta hidup berdampingan setjara damai dan kerdjasama ekonomi.

Ada sementara orang yang mengartikan kedudukan internasional yang kuat hanya penting dalam hubungan dengan tindakan² Indonesia jg. bersifat keluar. Sengadja atau tidak sengadja mereka mau memisahkan politik luarnegeri jg. maju dengan politik dalam-negeri. Mereka mau bermuka dua, keluar maju sedangkan kedalam reaksioner. Politik bermukadua ini ditentang oleh opini umum di Indonesia dan setjara tepat dikatakan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam konferensi pers tanggal 12 Djuli jl., bahwa „politik luarnegeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah hasil saling pengaruh antara keadaan² dan kebutuhan² dalamnegeri serta sifat² nasional yang khusus yang diproyeksikan atas susunan internasional daripada masalah² dunia”. Politik luarnegeri dan dalamnegeri memang berbeda, tetapi bukanlah yang dapat dipisahkan.

Kedudukan internasional yang kuat dari Indonesia pertama² harus digunakan dalam hubungan dengan tugas memenuhi tuntutan² ekonomi, politik dan kulturil dari Rakjat Indonesia. Djika kedudukan internasional yang kuat dipadu dengan adanya persatuan Rakjat didalamnegeri yang juga kuat, maka Indonesia akan lebih bebas dalam menentukan politiknya yang berguna bagi Rakjat Indonesia.

Kewajiban untuk membikin politik luarnegeri Indonesia langsung berguna bagi Rakjat dalamnegeri akan lebih dapat dipenuhi djika pemerintah Indonesia sungguh² konsekwen mendjalankan hubungan jg. normal mengenai politik, ekonomi dan kebudayaan dengan semua negara, tanpa mem-beda²kan sistim politik dan sosial. Hubungan luarnegeri Indonesia yang sekarang pada umumnya masih berat ke-negara² Barat telah menjebabkan kurang kuatnya dorongan pemerintah untuk mengembangkan perdagangan dan untuk pertukaran paraahli dan peladjar dengan negara² kubu sosialis. Hal ini merugikan Rakjat Indonesia, khususnya parapedagang, industrialis, sardjana dan mahasiswa. Hubungan luarnegeri yang masih berat sebelah ini bertentangan dengan putusan² Konferensi Bandung dan tidak sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai penganut dan pengandjur politik luarnegeri yang bebas dan aktif.

Salahsatu alasan yang „klasik” yang sering dikemukakan oleh kaum reaksioner atau oleh kaum yang bimbang untuk tidak bertindak sesuai dengan keinginan Rakjat, untuk tidak bertindak sesuai dengan tuntutan² Revolusi Agustus, untuk tidak bertindak terhadap kekuasaan imperialisme Belanda dilapangan politik dan ekonomi, ialah kekuatiran akan mendapat tekanan² dari Amerika Serikat dan akan adanya serangan bersendjata kaum kolonialis

Belanda yang datangnja dari Irian Barat. Kekuatiran ini dengan sangat pandai digunakan oleh kaum imperialis dan oleh kaum reaksioner didalamnegeri, sehingga dengan demikian belum ada satu pemerintah Indonesia yang berani mengadakan tindakan² yang penting dilapangan ekonomi terhadap imperialisme Belanda. Dengan demikian, ekonomi Indonesia masih tetap dikuasai terutama oleh kaum kapitalis besar Belanda, perkembangan kebudayaan Indonesia tetap tertekan dan penghidupan Rakjat Indonesia masih tetap djelek. Alasan „klasik“, jaitu kuatir akan mendapat tekanan² dari Amerika Serikat dan kuatir akan adanya serangan bersendjata Belanda, djuga digunakan oleh kaum reaksioner untuk membikin takut kaum jg. bimbang supaya menolak duduknja orang² Komunis dalam satu pemerintahan jg. programnja disetudjui oleh PKI. Dengan demikian kekawatiran jg. tidak beralasan telah menjebakkan perbuatan jg. melemahkan persatuan Rakjat didalamnegeri. Padahal dengan persatuan yang kuat didalamnegeri dan dengan kuatnja kedudukan internasional negeri kita, Indonesia akan dapat mengatasi tiap tekanan dari negeri manapun dan akan dapat membebaskan Irian Barat.

Singkatnja, pada waktu sekarang adalah mendjadi tugas penting dari Partai kita untuk mendorong agar Indonesia mendjalankan politik anti-kolonialisme dan politik perdamaian yang lebih aktif lagi, untuk lebih memperkuat kedudukan Indonesia diantara negara² didunia, terutama diantara negara² Asia dan Afrika. Bersamaan dengan itu kaum Komunis harus mendorong agar kedudukan internasional Indonesia yang kuat per-tama² ditudjukan untuk kepentingan Rakjat didalamnegeri, terutama dalam hubungan melikwidasi kekuasaan ekonomi kaum kapitalis besar Belanda.

Bagaimana situasi dalamnegeri Indonesia sekarang?

Walaupun sudah hampir 11 tahun sedjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keadaan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia masih tetap sengsara, sedangkan difihak lain kaum imperialis asing masih terus mengurus kekayaan alam Indonesia dan menghisap Rakjat Indonesia. Bagian terbesar kaum tani masih tetap tidak mempunyai atau sedikit memiliki tanah dan tetap menderita dibawah penghisapan kaum tuantanah. Hanya kaum komprador, koruptor, tuantanah dan sebagian ketjil kaum kapitalis nasional dan pedjabat² pemerintah yang penting yang dapat menarik keuntungan buat diri sendiri dalam keadaan sekarang. Kenjataan² yang pintjang ini telah menjadarkan Rakjat Indonesia bahwa kemerdekaan yang di-tjita²kan belumlah tertjapai. Rakjat Indonesia bangun dan mengorganisasi diri kembali untuk meneruskan perjuangannja, untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustusnja

sampai ke-akar²nja, sampai ada manfaatnja untuk bagian jg. terbesar dari Rakjat Indonesia. Menangnja kekuatan demokratis dalam pemilihan umum untuk Parlemen dan Dewan Konstituante jg. lalu, dikutuknja kabinet Burhanuddin Harahap yang reaksioner oleh massa Rakjat yang luas, terbentuknja kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, dibataknja persetudjuan KMB yang chianat setjara unilateral, dikutuknja perbuatan² kaum birokrat dan koruptor serta perbuatan orang² mesum lainnja oleh massa Rakjat dan oleh pemuda² Indonesia, makin banjaknja hasil² yang ditjapai dalam membrantas gerombolan² DI-TII dan gerombolan² subversif Belanda, makin ditentangnja tindakan² se-wenang² orang² reaksioner terhadap Rakjat, adalah bukti² yang menonjol daripada tumbuhnja kekuatan Rakjat Indonesia pada waktu achir² ini, dan djuga bukti tentang tetap setianja Rakjat Indonesia dan pemuda² Indonesia pada tjita² Revolusi Agustus. Dengan Rakjat dan pemuda Indonesia yang demikian ini kita meneruskan perjuangan kita dan menjongsong haridepan kita yang gemilang.

Kaum reaksioner dalamnegeri yang bersekongkol dengan kaum imperialis asing tidak henti²nja berusaha untuk melemahkan kekuatan Rakjat Indonesia, terutama dengan djalan mentjegah adanya kerdjasama setjara revolusioner antara partai² Islam, partai² Nasionalis dan Partai Komunis seperti yang diinginkan oleh bagian yang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia dan djuga yang diandjurkan oleh presiden Sukarno. Jang sangat melemahkan kekuatan nasional kita ialah politik anti-Komunis dan anti-persatuan dari orang² yang berkepalabatu dalam pimpinan partai Masjumi-PSI. Politik kepalabatu ini menimbulkan adanya pelanggaran² terhadap hak² azasi manusia dan hak² demokrasi oleh orang² reaksioner yang masih memegang djabat²an penting. Bukan tidak djarang gerakan² massa untuk perbaikan nasib dan persatuan serta perlawanan² massa terhadap kaum kapitalis besar Belanda, terhadap gerombolan DI-TII dan tuantanah², ditindas oleh orang² reaksioner yang dipengaruhi oleh politik kepalabatu itu. Dengan demikian djelaslah bahwa politik kepalabatu telah mendjadi penghalang yang pokok bagi perkembangan kekuatan nasional untuk mentjapai kemerdekaan ekonomi dan kebudayaan yang lebih luas bagi Indonesia, untuk membebaskan Irian Barat yang merupakan kira² 20% dari wilayah Republik Indonesia dan untuk menutup samasekali kemungkinan diseretnja Indonesia kedalam blok militer. Dari pengalamannja sendiri Rakjat Indonesia sampai kepada kesimpulan, bahwa kalau dizaman pendjadjahan kaum kolonialis Belanda adalah kekuatan yang langsung menghalangi tertjiptanja persatuan Rakjat dari berbagai aliran politik, maka rol kaum ko-

lonialis Belanda itu sekarang sudah dioper oleh orang² berkepalabatu dari kalangan pimpinan Masjumi-PSI. Hal ini makin lama makin terang dan achirnja pasti akan mendjadi sangat terang.

Tetapi, mengemukakan kenyataan adanya politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi-PSI, samasekali tidak berarti bahwa kaum reaksioner yang bersekutu dengan kaum imperialis berhasil dalam tiap² usaha memetjahbelah persatuan Rakjat dan dalam mempertahankan kekuasaan kaum kapitalis besar asing dan kaum tuantanah. Dalam melaksanakan maksud djahatnja mereka harus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia dan partai² demokratis lainnja, mereka harus berhadapan dengan Rakjat dan pemuda Indonesia yang sudah tergembelng dalam Revolusi Agustus dan dalam perdjjuangan tahun² belakangan ini dan mereka harus menghadapi massa mereka sendiri yang makin lama makin sadar dan mulai menentang politik reaksioner mereka.

Diluar keinginan kaum reaksioner yang berkepalabatu, dalam bulan Agustus tahun yang lalu telah dilangsungkan kongres pertama dari Kongres Rakjat Seluruh Indonesia yang menghasilkan sebuah program yang berisi tuntutan² yang banjak persamaannja dengan tuntutan² Revolusi Agustus. Djuga diluar keinginan kaum reaksioner yang berkepalabatu, dalam bulan Maret tahun ini telah terbentuk sebuah pemerintah yang programnja memuat tuntutan² yang paling mendesak dari Rakjat Indonesia. Program Kongres Rakjat dan program Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, walaupun yang satu lebih madju daripada yang lain, ke-dua²nja dapat didjadiakan pegangan dalam perdjjuangan se-hari² Rakjat Indonesia sebagai program yang sudah disetudjui oleh sebagian besar massa Islam dan massa nasionalis dan oleh seluruh massa Komunis.

Sudah tentu, dua program tsb. diatas, jaitu program Kongres Rakjat dan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, bukanlah program yang djika dilaksanakan bisa menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Tetapi adalah sesuatu jg. tak dapat dibantah, bahwa djika pemerintah Indonesia sekarang konsekwen melaksanakan programnja dan djika partai², organisasi² dan perseorangan² jg. sudah menjatakan menerima program Kongres Rakjat dengan konsekwen melaksanakan program tsb., maka tidak bisa tidak ia akan membawa Rakjat Indonesia lebih dekat kepada tudjuan Revolusi Agustus yang bersifat nasional dan demokratis. Kaum Komunis Indonesia yang sudah menjatakan per-setudjuannja terhadap program Kongres Rakjat dan terhadap program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 akan terus bekerdja supaja program² ini dilaksanakan.

Demikianlah dengan singkat situasi internasional dan dalam-negeri pada dewasa ini. Situasi internasional dan dalamnegeri sekarang membukakan kemungkinan yang besar bagi Rakjat Indonesia untuk mengembangkan kekuatannja sendiri, untuk memperkuat persatuannja, untuk melaksanakan program²nja yang madju atau agak madju, untuk dapat bertindak yang lebih menguntungkan buat Rakjat Indonesia sendiri dilapangan politik luar dan dalam-negeri, dilapangan ekonomi dan kebudajaan.

II

Tiga Kekuatan — Tiga Konsep Dalam Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945

Pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante dalam tahun 1955 tidak hanja sudah berachir dengan kemenangan kekuatan demokratis, tetapi djuga telah sangat membantu dalam menganalisa kekuatan² berbagai klas di Indonesia. Mengetahui kekuatan klas² berarti mengetahui imbangan kekuatan, berarti mengetahui kekuatan sendiri, kekuatan sekutu dan kekuatan lawan. Diketahuinja hal ini adalah sangat penting untuk menetapkan politik dan taktik Partai dan untuk mengetahui perspektif bagi Partai dan bagi perdjjuangan Rakjat kita.

Sesudah pemilihan umum dapat diketahui adanya 3 matjam kekuatan politik di Indonesia yang hampir berimbang besarnja. Kekuatan² itu ialah :

Pertama, kekuatan *kepalabatu*, jaitu kekuatan kaum feodal dan kaum komprador yang bersekongkol dengan imperialisme asing. Kekuatan ini masih agak besar.

Kedua, kekuatan *progresif*, jaitu kekuatan kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektuil revolusioner. Kekuatan ini sudah agak besar.

Ketiga, kekuatan *tengah*, jaitu kekuatan burdjuasi nasional dan segala kekuatan patriotik dan anti-kolonialisme lainnja, termasuk tuantanah golongan kiri (agak madju). Kekuatan ini agak besar dan berada diantara kekuatan kepalabatu dan kekuatan progresif.

Dalam hubungan dengan Revolusi Agustus 1945, kekuatan² diatas menjatakan per-setudjuannja pada revolusi tsb. dan menjatakan kesediaannja untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus. Sama dalam kata², tetapi sangat berbeda dalam perbuatan. Oleh karena itu hampir sebelas tahun lamanja Rakjat Indonesia dibikin kabur pengertiannja tentang hakekat daripada Revolusi Agustus. Sekarang sudah waktunja untuk melenjapkan kekaburan

ini. Ini hanya mungkin dengan membuka dan membeberkan konsep ketiga kekuatan diatas mengenai penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945.

Bagaimanakah konsep ketiga kekuatan diatas dalam hubungan dengan penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus? Atau, lebih tepat, sebelum menjawab pertanyaan ini: apakah hakekat daripada Revolusi Agustus? Apakah hakekat Revolusi Agustus setjara ilmiah?

Revolusi Agustus seperti sudah disebut diatas dan seperti sudah sering diutjapkan oleh pemimpin² progresif Indonesia, adalah revolusi yang bersifat nasional dan demokratis. Revolusi ini bersifat nasional karena bertudjuan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kaum imperialis asing, dan revolusi ini bersifat demokratis karena anti-feodalisme. Memang adalah kenyataan, bahwa pada permulaan revolusi banjak soal² yang berhubungan dengan sifat Revolusi Agustus belum diadjudkan dan belum dirumuskan, djuga sembojan² dan tugas² daripada revolusi ini belum diperlengkapi.

Kita sering mendengar utjapan² tentang „menyelesaikan Revolusi 1945“. Tetapi kita tidak mendapat keterangan yang djelas tentang apa yang harus diselesaikan berhubung dengan Revolusi Agustus. Kita djuga sering mendengar utjapan bahwa untuk „menyelesaikan Revolusi 1945“ kita harus menggaling „persatuan nasional yang revolusioner“. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan persatuan nasional yang revolusioner, klas² dan golongan² manakah yang harus dipersatukan, klas² manakah yang harus mendjadi basis daripada persatuan, klas manakah yang harus memimpin persatuan, dan apakah yang mendjadi sasaran daripada persatuan nasional yang revolusioner itu? Semuanya ini harus dijawab, harus didjelaskan dan harus mendjadi pengertian Rakjat.

Dalam kesempatan ini saja ingin mengemukakan beberapa kenyataan yang membuktikan bahwa Revolusi Agustus 1945 adalah revolusi yang bersifat nasional dan demokratis, artinja revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme, revolusi yang menurut wataknya harus membawa Rakjat kesinggasana kekuasaan.

Kita mengetahui bahwa kira² satusetengah bulan sebelum proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Djakarta diadakan sidang² „Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan“. Didalam sidang² ini anggota² „Badan Penyelidik“ tsb mengadakan pidato² tentang kemerdekaan Indonesia. Banjak diantara anggota yang berpidato menurut irama seperti yang diingini oleh balatentara Djepang. Tetapi ada djuga diantaranya yang tidak seirama, dan malahan bertentangan dengan keinginan pembesar² Djepang ketika itu. Sangat menarik pidato Bung Karno dimuka

„Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan“ pada tanggal 1 Djuni 1945, dimana a.l. berbunji sbb:

„Apakah yang dinamakan merdeka? Didalam tahun 1933 saja telah menulis satu risalah, risalah yang bernama *„Mentjapai Indonesia Merdeka“*, maka didalam risalah tahun 1933 itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan politik, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan ialah satu djembatan, satu djembatan emas. Saja katakan didalam kitab itu, bahwa diseberangnja djembatan itulah kita sempurnakan kita punja masjarakat“. Selandjutnja dikatakan pula: „diseberang djembatan, djembatan emas inilah, baru kita leluasa menjusun masjarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi“.

Djadi teranglah, bahwa dengan „Indonesia Merdeka“ tidak hanya dimaksudkan merdeka dilapangan politik.

Indonesia merdeka yang bagaimana? Tentang ini selandjutnja dikatakan: „apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanja saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberikan kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara² yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara² yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punja tudjuhan. Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua“. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya — tetapi „semua buat semua“.

Dari utjapan ini teranglah, bahwa dengan „Indonesia Merdeka“ yang dimaksudkan bukan sistim negara yang anti-Rakjat, bukan sistim negara yang mendjamin kemerdekaan bagi kaum imperialis dan kakitangannya, bagi kaum kapitalis dan kaum feodal untuk berkuasa dan berbuat se-suka²nja terhadap massa Rakjat pekerdja. Kesimpulan ini diperkuat lagi oleh uraian selandjutnja sbb: „Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada, kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, di-negara² Eropa ada Badan Perwakilan, ada parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa djustru kaum kapitalis meradjalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakjat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis meradjalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakjat! Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawarat-

an jang memberi hidup, ja'ni politiek-economische democratie jg. mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat Indonesia sudah lama bitjara tentang hal ini".

Dalam sidang „Badan Penyelidik" tsb Bung Karno djuga berbitjara tentang „internasionalisme" a.l. sbb: *„Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa".* Tetapi internasionalisme bukan kosmopolitanisme. Tentang ini dikatakan oleh Bung Karno: *„djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitanisme, jg. tidak mau adanja kebangsaan, jg. mengatakan tidak ada kebangsaan, jg. mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika, dllnja".*

Pidato tsb diatas mendapat sambutan hangat dari para anggota „Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan". Kemudian ternjata, bahwa pokok² pikiran jang diadjukan dalam pidato tsb banyak jang ditjantumkan didalam UUD Sementara Republik Indonesia tahun 1945.

Djadi, djika pidato Bung Karno tsb. dapat dikatakan mewakili perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia, dan djika UUD Sementara RI dapat kita anggap sebagai perumusan perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia ketika akan menjtjetuskan Revolusi Agustus 1945, maka, walaupun dengan samar² dan tidak lengkap dirumuskan sembojan² dan tugas² revolusi, Revolusi Agustus adalah revolusi nasional dan demokratis atau revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa sembojan² dan tugas² revolusi belum dirumuskan setjara lengkap dan setjara ilmiah, maka adalah tugas kaum revolusioner untuk memperlengkapi sembojan² dan tugas daripada revolusi tsb.

Bahwa revolusi Agustus memang berwatak anti-imperialisme dan anti-feodalisme dibuktikan pula dengan djelas oleh tindakan² massa diwaktu revolusi itu berlangsung, misalnja tindakan² jang menjadikan perusahaan² penting milik asing sebagai „milik Republik Indonesia", tindakan menghapuskan pemerintahan perseorangan dengan membentuk dewan² jang diberi nama „Komite Nasional Indonesia" dan membentuk badan² keamanan Rakjat sampai ke-desa², mem-bagi²kan tanah² perkebunan asing kepada kaum tani diberberapa daerah, dsb.

Sekarang sampailah waktunja untuk mendjawab pertanjaan tentang konsep tiga kekuatan diatas dalam hubungan dengan penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus.

Pengalaman Rakjat Indonesia selama hampir 11 tahun, dan terutama pada tahun² terachir ini, djelas sekali menundjukkan adanja tiga konsep.

Pertama, konsep kaum kepalabatu, jaitu kaum komprador dan feodal, jalah supaja Indonesia dikuasai oleh kaum komprador dan feodal, supaja Indonesia mendjadi satu negara jang hanja bentuknja sadja merdeka, tetapi hakekatnja tunduk kepada imperialisme, membela kepentingan kapitalis² besar asing dan tuantanah². Pembela² dari konsep ini, dengan bertameng „Revolusi 1945" dan „anti-kolonialisme", mendjalankan politik anti-Komunis dan anti-Rakjat jang tidak tahu malu, walaupun mereka tahu bahwa kaum Komunis berdiri dibarisan depan sedjak permulaan dan selama Revolusi Agustus sampai sekarang dalam perdjjuangan melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus.

Kedua, konsep kaum progresif, jaitu kaum buruh, tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektual revolusioner, jang menuntut supaja hak² kaum imperialis dilapangan politik, ekonomi dan kebudajaan dihapuskan; mereka djuga menuntut penghapusan milik feodal atas tanah, supaja diadakan perubahan tanah untuk melaksanakan sembojan „tanah untuk petani"; semuanja ini sesuai dengan tuntutan² Revolusi Agustus.

Ketiga, konsep kekuatan tengah, jaitu konsep daripada burdjuasi nasional jang mempunjai pertentangan dengan kaum imperialis, kaum komprador dan tuantanah, jalah supaja di Indonesia diadakan perubahan² dengan maksud membela kepentingan sendiri untuk perkembangan kapitalisme nasional jang menurut mereka sesuai dengan tudjuan revolusi 1945.

Djadi, didalam negeri kita sekarang ada pertentangan jang tadjam antara tiga kekuatan ini, pertentangan jang satu lebih tadjam daripada pertentangan jang lain.

Pada waktu sekarang kekuatan Rakjat, jaitu gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah berusaha untuk membentuk negara jang merdeka dilapangan politik dan ekonomi. Tetapi usaha ini ditentang keras oleh klas² komprador dan feodal jang bersekongkol dengan kaum imperialis jang dengan ngotot berusaha untuk mengubah Indonesia mendjadi negara embel², jaitu negara jang hanja dalam bentuknja merdeka, tetapi jang pada hakekatnja menjerah pada imperialisme.

Kaum imperialis asing tidak henti²nja menusuk-nusuk kaum reaksioner dalam negeri supaja lebih giat mengadakan intrik² dan tindakan² jang anti-Rakjat.

Garis politik PKI dalam menghadapi tiga kekuatan dan tiga konsep penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus seperti diterang-

*kan diatas jalah : dengan sekuat tenaga dan dengan tidak djemu-
nja mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan
tengah dan mementijlkan kekuatan kepalabatu.*

Apakah dengan garis politik ini berarti bahwa kaum Komunis memuklurata dan menganggap semua anggota dan pemimpin partai² yang mewakili kekuatan kepalabatu, seperti partai² Masjumi dan PSI, sebagai orang² berkepala panas yang pikirannya siang dan malam hanya tertudju untuk menghantjurkan kaum Komunis dan meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan kaum imperialis asing? Tentu tidak demikian. Ada diantara mereka yang mengatakan dan merasa bahwa mereka hanya anti-Komunis dan tidak pro-imperialis; mereka tidak sadar bahwa sikap anti-Komunis, jaitu anti golongan yang paling konsekwen anti-imperialis, berarti mengurangi sifat anti-imperialis mereka dan ini sadar atau tidak sadar berarti membantu imperialis. Tetapi disamping itu sebagian besar daripada anggota partai² ini dan sebagian daripada pemimpin partai² ini adalah berkepala dingin, tidak terlalu menondjolkan kepentingan sendiri, memandang imperialis asing sebagai lawan bersama dan sampai batas² yang tertentu tidak berkeberatan untuk bekerjasama dengan kaum Komunis. Dengan orang² demikian ini kaum Komunis harus bersatu. Kaum Komunis djuga tidak memuklurata anggota² dan pemimpin² partai² yang mewakili kekuatan tengah. Diantara mereka tidak sedikit terdapat unsur burdjuasi ketjil dan intelektual² Revolusioner yang merupakan golongan kiri didalam partai² tengah, disamping unsur yang memang benar² mewakili kepentingan burdjuasi nasional dan unsur yang tjondong kepada kekuatan kepalabatu. Yang terachir ini merupakan golongan kanan didalam partai tengah.

Satu kenjataan jalah, bahwa didalam partai² yang mewakili kekuatan kepalabatu dan kekuatan tengah terdapat berbagai golongan, yang pada pokoknja dapat dibagi dalam golongan kiri, tengah dan kanan. Untuk dapat mempersatukan kekuatan yang se-banjak²-nja, kaum Komunis harus menganalisa golongan² tsb. agar setiap waktu dapat menentukan sikap yang tepat supaya dapat mempersatukan semua yang bisa dipersatukan, dan supaya yang dipentijlkan hanya yang benar² berkepalabatu.

Mungkin ada orang yang bertanja : apa sebabnja kaum Komunis harus bersatu dengan burdjuasi nasional yang bertudjuan mengembangkan kapitalisme nasional? Apakah ini tidak berarti memupuk mereka jg. kemudian hari akan mendjadi kapitalis² monopoli yang akan membinasakan negeri?

Pada tingkatan keadaan seperti sekarang kaum Komunis Indonesia tidak memandang kapitalisme nasional sebagai bahaya. Kita

bukan hanya tidak melawan mereka, tetapi malahan kita menuntut kepada tiap² pemerintah supaya kepentingan pedagang dan industrialis nasional diperlindungi, diberi proteksi dan fasilitas dalam melawan saingan dari kapitalis² besar asing. Kemelaratan Rakjat Indonesia sekarang bukan karena kebanyakan kapitalisme nasional, tetapi sebaliknya, antara lain karena kekurangan kapitalisme nasional dan kebanyakan imperialisme asing. Kaum Komunis Indonesia menjetudjui adanya warganegara² Indonesia yang madju dilapangan industri dan perdagangan sebagai hasil usahanya sendiri, tidak karena mendjadi komprador (agen) kapitalis monopoli asing dan tidak karena korupsi atau karena menggunakan saluran² birokrasi. Komprador, koruptor dan kapitalis birokrasi adalah anti-nasional dan oleh karena itu harus ditentang oleh seluruh Rakjat Indonesia, djuga oleh kapitalis² nasional.

Kaum Komunis tidak mempunyai kekuatiran bahwa kapitalis² yang benar² nasional kemudian hari akan mendjadi kapitalis² monopoli. Mungkin diantara mereka ada yang mengimpikan hal ini, dan djika ada maka akan tetap tinggal impian belaka, sebab matahari sudah terlalu tinggi untuk sampai bisa mendjadi impian ini satu kenjataan. Imbangan kekuatan dunia dan imbangan kekuatan dalamnegeri yang semakin menguntungkan kekuatan progresif sekarang ini mendjamin bahwa sekarang bukan masanja lagi untuk timbulnja monopoli² kapitalis nasional. Tiap² usaha kearah itu akan mendapat tentangan keras.

Kapitalis² nasional mempunyai kemungkinan untuk berkembang dan perkembangan ini sampai batas² yang tidak merugikan Rakjat akan disokong oleh kekuatan progresif, asal perkembangan ini didapat dari perlawanan terhadap imperialis asing dan terhadap feodalisme. Dengan kapitalis nasional jg. menempuh djalan ini PKI harus bersatu. Kita sadar, bahwa politik ini tidak hanya akan dapat tentangan dari kapitalis² besar asing dan agen²nja yang tidak ingin melihat kaum kapitalis nasional berkembang dengan wadjar, tetapi djuga akan dipersulit oleh kapitalis² nasional sendiri yang pura² anti-kapitalisme dan anti-penghisapan untuk menutupi penghisapan yang mereka lakukan terhadap kaum buruh.

PKI mendorong sifat progresif, sifat anti-kolonialisme dan anti-feodalisme dari burdjuasi nasional. PKI mengkritik sifat burdjuasi nasional yang setengah², yang tidak konsekwen dan pintjang. Politik anti-Komunisme dan politik memetjahbelah dari golongan sajan kanan burdjuasi nasional yang tempo² suka tampak, tentu djuga harus dikritik karena perbuatan ini adalah merusak persatuan nasional, persatuan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah. Perlu didjelaskan bahwa kaum Komunis menganggap tidak ada

gunanja dan malahan merugikan untuk mengkritik hal² yang tidak prinsipil, yang tetekbengek, yang tak mengenai kepentingan Rakjat banyak. Kritik hanya dilakukan kalau sangat perlu.

Djadi djelaslah bahwa konsep daripada PKI dan semua kaum progresif dalam menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus ialah : *Melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, ini berarti menghapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar²nja. Ini adalah konsep Rakjat. Berdasarkan konsep ini, mereka yang tidak anti-imperialisme dan tidak anti-feodalisme adalah bukan Rakjat tetapi anti-Rakjat, anti-Revolusi Agustus 1945.*

Konsep PKI hanya mungkin dilaksanakan djika ada front persatuan, djika proletariat mempunyai banyak sahabat. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, ada 2 matjam front persatuan dan 2 matjam sahabat :

1) proletariat dengan kaum tani dan burdjuasi ketjil kota. Ini adalah front persatuan atau persahabatan antara proletariat dengan orang² yang mempunyai sedikit milik (persekutuan proletariat dengan kaum tani dan kaum keradjinan tangan pada umumnya disebut persekutuan buruh dan tani).

2) proletariat dengan orang² yang mengeksploitasi. Ini adalah persatuan atau persahabatan antara proletariat dengan madjikan atau orang² pemerintah yang mewakili kepentingan burdjuasi nasional.

Berdasarkan analisa tentang pengaruh partai² politik atas massa dinegeri kita, kita memperdjuaangkan persatuan massa Islam (dan aliran keagamaan pada umumnya), massa Nasionalis dan massa Komunis dalam perdjuaangan melawan imperialisme dan feodalisme.

Berdasarkan analisa tentang klas² dinegeri kita, kita memperdjuaangkan persatuan antara kaum buruh, tani, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektual revolusioner dan burdjuasi nasional, jaitu persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah.

Inilah kuntji kemenangan daripada konsep Rakjat untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus jg. bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar²nja.

III

Politik Partai Komunis Indonesia

Kongres Nasional ke-V PKI antara lain sudah mensahkan sebuah dokumen yang penting, jaitu Program PKI. Program ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama ialah program umum atau program pokok. Bagian kedua ialah tuntutan PKI kepada peme-

rintah Ali Sastroamidjojo (yang pertama), jaitu pemerintah yang ketika program itu dibikin sedang memegang tampuk kekuasaan. Bagian kedua ini ialah tuntutan² sekarang, program khusus atau program tuntutan daripada PKI. Program tuntutan ini dibikin berdasarkan Program Umum. Djadi, Program Umum dengan program tuntutan adalah berbeda, tetapi satusamalain ada hubungannya, tidak terpisah.

Dengan program umumnya PKI mengemukakan apa yang menjadi tujuannya, apa yang diperdjuaangkannya dalam seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, atau disebut juga tingkat revolusi burdjuis demokratis. Pokok² daripada program umum ini tidak akan berubah selama tuntutan² Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis belum dilaksanakan sampai ke-akar²nja. Djadi, program umum akan tetap menjadi program PKI selama Demokrasi Rakjat belum menjadi kenyataan. Program Umum PKI adalah program yang terus-menerus harus dipropagandakan oleh kaum Komunis dan simpatisan² Komunis sampai selesainya pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Program Umum PKI adalah program jangka panjang atau dasar kerdjasama taraf tinggi antara PKI dengan semua partai, dengan semua golongan dan perseorangan yang demokratis dan patriotik lainnya dalam menyelesaikan seluruh tuntutan Revolusi Agustus.

Tetapi, PKI tidak hanya mempropagandakan program jangka panjangnya, tidak hanya mempropagandakan program-umumnya. PKI juga menunjukkan djalan untuk memetjahkan soal² kongkrit sekarang. Disamping mempropagandakan program umumnya, PKI mempersatukan Rakjat berdasarkan tuntutan² politik dan ekonomi yang kongkrit sekarang dan menjadikan tuntutan kongkrit sekarang sebagai alas (platform) untuk bekerdjasama waktu sekarang dengan semua partai, semua golongan dan perseorangan yang demokratis dan patriotik.

Program Umum

Guna melaksanakan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, guna memusnahkan samasekali kekuasaan kaum imperialis asing dan kaum tuantanah, guna membangun Indonesia baru yang merdeka dilapangan politik, ekonomi dan kebudayaan, guna membangun Indonesia yang demokratis, bersatu dan makmur, maka Rakjat Indonesia, PKI dan semua partai, semua golongan dan perseorangan yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme sangat

membutuhkan adanya sebuah program bersama yang dibikin atas persetujuan bersama. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan program bersama inilah, PKI dalam kongres nasional ke-V men-sahkan sebuah program, program yang tentu saja masih bisa di-rundingkan dengan partai² dan golongan² lain yang mengingin-kan musnahnya samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme dari bumi Indonesia sebagaimana yang dituntut oleh Revolusi Agustus kita. Kesediaan PKI merundingkan programnya dengan partai² dan golongan² lain mengandung arti bahwa PKI, atas dasar perundingan bersama, bersedia menerima perubahan², me-nerima pengurangan² dan penambahan², tentu saja dengan tidak mengganggu-gugat inti daripada program, yaitu anti-imperialisme, anti-feodalisme dan melaksanakan perubahan² demokratis.

Sebagaimana sudah disebut diatas, program bersama demikian dapat dibagi menjadi dua bagian, yang umum dan yang khusus. Lebih dulu kita akan membitjarakan program umum dan kemudian program khusus atau program tuntutan.

Pendirian² pokok daripada kaum Komunis Indonesia mengenai pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja ada-lah sama dengan pendirian² bagian terbesar daripada Rakjat In-donesia. Pendirian² pokok ini ialah :

Pertama, sistim negara Indonesia tidak seharusnya sistim negara anti-Rakjat yang dikuasai oleh tuantanah² dan komprador². Sistim anti-Rakjat, terutama ketika kekuasaan pemerintah Hatta, peme-rintah Natsir, pemerintah Sukiman dan pemerintah Burhanuddin Harahap, telah dibuktikan kebangkrutannya. Sistim yang wadjar ialah sistim negara Rakjat, sistim negara yang sumber kekuasaannya ada pada Rakjat, yaitu negara „dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat“, atau yang disebut oleh Bung Karno negara „*semua buat semua*“. Negara ini ialah negara front persatuan, yang men-dasarkan diri atas massa dan yang bertujuan kemerdekaan nasional yang penuh bagi Indonesia. Djadi, teranglah, mengingat terbelakangnya keadaan ekonomi Indonesia dan mengingat bahwa Rakjat Indonesia masih melawan penindasan imperialisme dan feodalisme, PKI tidak bermaksud mendirikan diktatur proletariat yang harus melaksanakan perubahan² sosialis. Hanya negara yang demikian inilah yang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, yang mampu memberikan tanah dengan tjuma² kepada kaum tani, yang mampu mendjamin hak² demokrasi bagi Rakjat, yang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, yang mampu meninggikan ting-kat hidup materiil kaum buruh, yang mampu menghapuskan peng-angguran dan yang mampu mengembangkan pekerdjaan parasar-

djana dan seniman. Singkatnja, hanya negara yang demikian yang sesuai dengan watak Revolusi Agustus 1945, yang mampu men-djamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya melalui dja-lan demokrasi, kemajuan dan perdamaian.

Kedua, di Indonesia tidak seharusnya terus dipertahankan satu negara menurut resep demokrasi Barat atau diktatur demokrasi tipe lama. Seperti dikatakan oleh Bung Karno: „*Kalau kita men-tjari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi de-mokrasi yang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial*“. Alasan untuk tidak membangun negara demokrasi lama yang di-kuasai oleh burdjuasi nasional adalah sangat kuat. Disatu pihak burdjuasi nasional mempunyai kedudukan yang sangat lemah dila-pangan ekonomi dan tidak kuat dilapangan politik, sedang difihak lain proletariat Indonesia dengan pemimpinnja PKI telah terbukti mempunyai kesadaran klas yang tinggi dan terbukti mempunyai kemampuan yang tidak bisa diabaikan dilapangan politik, dan mereka memberi pimpinan kepada massa luas dari kaum tani, bur-djuasi ketjil kota, kaum intelektual revolusioner dan elemen² de-mokratis lainnya. Djadi teranglah bahwa yang dapat mendatangkan kesedjahteraan sosial bukanlah sistim demokrasi lama yang di-kuasai oleh burdjuasi, bukan demokrasi „*menurut resep revolusi Perantjis*“ (djuga utjapan Bung Karno dalam „Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan“), tetapi demokrasi untuk semua golongan Rakjat dan mengenai semua lapangan (politik, ekonomi dan kebudayaan). Sistim demokrasi yang demikian itu ialah de-mokrasi tipe baru, demokrasi untuk seluruh Rakjat, demokrasi Rakjat.

Hanya dengan mendirikan kekuasaan demokrasi Rakjat baru ada kemungkinan untuk mengachiri kekuasaan kaum imperialis, tuan-tanah dan burdjuasi komprador dinegeri kita, dan barulah bisa memulai dengan zaman baru dalam sedjarah kemajuan Rakjat kita. Pemerintah demikian ini adalah sangat sesuai dengan tuntutan bagian terbesar sekali daripada Rakjat Indonesia karena, *pertama*, ia pasti akan mendapat dukungan kira² 20 djuta kaum buruh de-ngan keluarganya (buruh industri, buruh keradjinan tangan, buruh perkebunan dll. golongan buruh); *kedua*, ia pasti mendapat du-kungan dari ber-puluh² djuta kaum tani dengan keluarganya yang merupakan 60 á 70% daripada Rakjat Indonesia; *ketiga*, ia pasti akan mendapat dukungan dari banjak burdjuasi ketjil kota, kaum intelektual, burdjuasi nasional, kaum ningrat (bangsawan) yang madju dan elemen² patriotik lainnya.

Ketiga, politik pemerintah Rakjat yang kita perdjungkan harus menghapuskan kekuasaan imperialis disegala lapangan dan meng-

hapuskan penindasan feodal. Tetapi, kita tidak menghendaki kekuasaan imperialis asing dan tuantanah diganti dengan kekuasaan burdjuasi dalam negeri atas Rakjat banjak. Kita ingin semua klas jang anti-imperialis dan anti-feodal sama² berkuasa, kita ingin satu sistim politik front persatuan. Inilah sjarat untuk mewujudkan Indonesia Merdeka jang „bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaya, — tetapi semua buat semua.“ Memang adalah aneh dan bertentangan dengan semangat Revolusi Agustus, djika kira² 20 djuta kaum buruh dengan keluarganja dan ber-puluh² djuta kaum tani dengan keluarganja mau disingkirkan dari kekuasaan negara, demikian djuga adalah tidak adil djika kaum burdjuis ketjil kota, kaum intelektual dan kaum burdjuis nasional jang anti-imperialis dan anti-feodal disingkirkan dari kekuasaan negara.

Keempat, mengenai struktur pemerintah, PKI memperjuangkan supaya dipakai sistim demokrasi jang memusat, artinja disatu fihak memberikan kekuasaan tertinggi untuk daerah² kepada DPRD², sedangkan difihak lain harus ada pemerintah sentral jang kuat, jang mengurus urusan² umum, jang sepenuhnya tunduk pada DPR (Parlemen). Kekuasaan daerah harus memperkuat kekuasaan pusat dan kekuasaan pusat harus membantu perkembangan demokrasi, ekonomi dan kebudayaan daerah. Pada prinsipnja kita harus dengan teguh mewujudkan Republik Kesatuan dengan pemerintah² daerah jang demokratis dan otonomi sukubangsa jang luas.

Kelima, tentara dan kekuatan bersendjata lainnja adalah pembela jang penting daripada negara. Walaupun kaum reaksioner sudah berusaha keras untuk mengubah komposisinja dan mengubah semangatnja, tetapi mayoritas daripada anggota² Angkatan Perang Republik Indonesia sekarang masih tetap bersemangat Revolusi Agustus 1945. Selama peperangan kemerdekaan melawan tentara kolonial Belanda Angkatan Perang Republik Indonesia telah sehidup semati dengan Rakjat. Oleh karena itu sudah sewajarnja, bahwa perwira-perwira, bintanga-bintang dan bawahan-bawahan daripada Angkatan Perang Republik Indonesia sekarang pada umumnya tetap setia kepada tjita² Revolusi Agustus dan berdjuaug untuk pelaksanaan tuntutan² daripada Revolusi ini. Oleh karena itu sukarlah membayangkan bahwa Angkatan Perang sekarang setjara bulat dapat dijadikan alat untuk menindas Rakjat, sebaliknya adalah wajar djika Rakjat mengharapkan agar TNI dan kekuatan² bersendjata RI lainnja menjadi pelindung daripada Rakjat. Seluruh Rakjat harus waspada terhadap pertjobaan² kaum reaksioner jang mau mengadu-domba

tentara dengan Rakjat dan mau menempatkan suatu Dewan Militer (Junta Militer) diatas pundak Rakjat.

Keenam, mengenai ekonomi. Dibagian atas sudah dikatakan bahwa jang harus ditentang sekarang bukannya industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kapitalis² nasional, tetapi jang harus ditentang ialah ekonomi imperialis dan feodal. Penghapusan sistim ekonomi imperialis dan feodal adalah djuga sjarat untuk perkembangan ekonomi kapitalis² nasional. Dibawah kekuasaan kaum imperialis dan feodal tidak mungkin kaum kapitalis nasional mengembangkan diri setjara wajar. Kaum Komunis sudah tentu akan lebih mengutamakan ekonomi negara dan membantu ekonomi individuil Rakjat pekerdja, tetapi disamping itu proteksi dan fasilitas harus diberikan kepada kapitalis² nasional untuk berkembang dalam batas² jang tak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara. Mengenai soal tanah harus dilaksanakan prinsip tanah untuk petani.

Demikianlah pendirian² pokok daripada kaum Komunis Indonesia tentang pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus. Demikianlah pokok² daripada program umum PKI jang setjara lengkap dimuat dalam Program jang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V PKI. Sekarang menjadi jelas bahwa dengan program umumnya PKI telah memperlengkapi tugas² dan sembojan² daripada Revolusi Agustus. Sekali lagi perlu diterangkan bahwa pada waktunja PKI bersedia untuk merundingkan program ini dengan partai² dan golongan² demokratis lainnja, dengan pengertian bahwa PKI bersedia untuk menerima perubahan² dimana perlu, untuk mengurangi dan menambahnja dengan tudjuan jang satu : menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus jang bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar²nja.

Berkat sukses daripada perdjuaugan Rakjat Indonesia, perdjuaugan PKI dan partai² demokratis lainnja jang ditjapai sedjak Kongres ke-V PKI bulan Maret 1954 sampai sekarang, ada bagian² dalam program umum PKI jang sudah tidak tepat lagi, misalnja bagian supaya melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, supaya mengembalikan MMB dari Indonesia, supaya membatalkan persetudjuan KMB dan supaya ada hakpilih bagi warganegara jang sudah mentjapai umur 18 tahun. Bagian² jang sudah lewat waktu demikian ini sudah tentu tidak perlu dipropagandakan lagi, dan sudah tentu pula djika bagian jang dipandang kurang dalam program umum ini harus ditambah, sedangkan jang tak begitu tepat harus diperbaiki. Hal ini harus menjadi perhatian semua anggota dan terutama propagandis² PKI.

Program Umum ini jika dibanding dengan program masadepan atau program maximum daripada sistim sosialis dan Komunis, adalah program minimum. Tetapi jika dibanding dengan program khusus atau program tuntutan, program umum ini adalah program jangka-pandjang.

Tuntutan² Sekarang

Diatas sudah dikatakan, bahwa berdasarkan program umum kita juga sudah menjusun tuntutan² untuk waktu sekarang. Pada seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, pada seluruh masa sebelum tuntutan² Revolusi Agustus diselesaikan sampai ke-akar²nja, program umum kita, program Demokrasi Rakjat kita, pada pokoknja tidak akan berubah. Sebelum terlaksana tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja kaum Komunis dan simpatisan² Komunis terus akan mempropagandakan program umum kita. Adalah lain halnja dengan program yang bersifat tuntutan. Program tuntutan kita berubah² sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan dalam berbagai tingkat² ketjil yang berlaku dalam tingkat besar daripada revolusi nasional dan demokratis.

Sedjak kita mempunyai program tuntutan seperti yang dimuat dalam Program PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, kita pernah mengalami keadaan dimana di Indonesia masih ada MMB (Misi Militer Belanda) dan dimana misi militer ini sudah tidak ada lagi, dimana belum ada dan dimana sudah ada pemilihan umum untuk Parlemen dan Dewan Konstituante, dimana Partai menjokong pemerintah (Ali Sastroamidjojo ke-1 dan ke-2) dan dimana Partai beroposisi (terhadap kabinet Burhanuddin Harahap), dimana hak² demokrasi sangat sempit dan dimana hak² ini agak luas, dimana Indonesia masih terikat oleh Uni Indonesia-Belanda dan dimana Uni sudah dibatalkan, dimana masih ada persetudjuan KMB dan dimana sudah tidak ada lagi persetudjuan yang berat sebelah ini. Perubahan dan perbedaan keadaan menjebabkan kita mengubah program tuntutan kita disana-sini.

Demikian pula tuntutan² kita berbeda berhubungan dengan keadaan dimana dan untuk apa tuntutan² kita adjukan. Tuntutan² kita yang dikemukakan sebagai program pemilihan umum (Program Pemerintah Koalisi Nasional) berbeda disana-sini dengan program yang kita perjuangkan dalam „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia“, demikian juga tuntutan-tuntutan yang kita adjukan kepada kabinet BH yang reaksioner berlainan dengan tuntutan²

yang kita adjukan kepada kabinet Ali Sastroamidjojo yang agak maju.

Walaupun program tuntutan kita berubah² berhubungan dengan keadaan, tempat dan waktu, program umum kita adalah tetap, ketjuali beberapa bagian² ketjil yang sudah lewat waktu yang dianggap tidak perlu dipropagandakan lagi. Program tuntutan kita mengalami perubahan², tetapi ia tetap disusun dengan berpedoman kepada program tuntutan yang sudah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, dan tugasnja djuga tetap jaitu untuk mempersatukan Rakjat dan untuk memenuhi tuntutan² ekonomi dan politik daripada Rakjat yang sangat terbanjak pada tingkat² ketjil dalam tingkat besar daripada Revolusi nasional dan demokratis.

Berkat hasil² perjuangkan Rakjat, perjuangkan PKI dan Partai² demokratis lainnja, beberapa bagian dari program tuntutan yang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V Partai sudah terlaksana, misalnja bagian yang mengenai pemilihan umum untuk Dewan Konstituante, tentang soal melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan tentang mengirim kembali MMB. Tentu saja bagian² yang sudah lewat waktu ini tidak perlu dituntutkan lagi, sedangkan yang sudah mungkin, walaupun tidak tertantun dalam Program PKI, supaja dituntutkan dan yang kurang tepat harus dibikin tepat.

Dewasa ini, Rakjat Indonesia berada dalam keadaan sbb.:

(1) Dengan dibatalkannja persetudjuan KMB, Rakjat Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan politik di 80% daripada wilajah negerinja, sedangkan di Irian Barat yang merupakan 20% daripada wilajah Indonesia belum ada kemerdekaan politik bagi Rakjat Indonesia disana, karena Irian Barat masih sepenuhnya dikuasai oleh kolonialisme Belanda; dilapangan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang dan samasekali belum merdeka, karena masih bertjokolnja sisa² feodalisme dan masih berkuasannya kaum kapitalis besar asing; negeri² imperialis yang dipelopori oleh radja² perang Amerika berusaha keras untuk menarik Indonesia kedalam blok militer; (2) Rakjat Indonesia sangat membutuhkan persatuan dan sangat membutuhkan pelaksanaan perubahan² demokratis guna memperluas dan memperkuat persatuan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar dari tangan kaum kapitalis besar asing, untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan untuk mentjegah masuknja Indonesia kedalam blok militer; (3) pemimpin² Masjumi-PSI yang berkepalabatu dan orang² reaksioner lainnja berusaha untuk memetjah-belah persatuan Rakjat dengan mendjalkan politik diktatur anti-Komunis dan menentang diadakannja

perubahan² demokratis, terutama dengan djalan mempersempit kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat, djuga dengan djalan melindungi dan membantu gerombolan DI-TII.

Apakah tuntutan² PKI dan tuntutan² Rakjat Indonesia dewasa ini, dalam keadaan² seperti sekarang ini?

Sesuai dengan Program PKI, sesuai dengan perimbangan kekuatan dan dengan keadaan jang berlaku sekarang, tuntutan² dibawah ini adalah tuntutan² Rakjat Indonesia jang paling mendesak, adalah tuntutan minimum dan tuntutan jang tepat.

**

Mobilisasi dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar, untuk merebut Irian Barat dan untuk menjelamatkan perdamaian di Asia dan didunia:

Kalahkan politik anti-persatuan dan politik diktatur anti-Komunis dari sebagian pemimpin² Masjumi-PSI untuk pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional dimana „4-Besar” (PKI, PNI, NU, Masjumi) dan partai² lain ikut didalamnya;

Beri kebebasan demokratis jang se-luas²nja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat dan batalkan semua undang² jang membatasi kebebasan gerakan patriotik;

Bentuk Undang² Dasar jang sesuai dengan semangat, djiwa dan sifat Revolusi Agustus 1945;

Djamin semua hak dan kebebasan kaum buruh dan pegawai negeri untuk membela kepentingan²nja jang sah dan batalkan semua undang² dan peraturan² jang bersifat melarang atau membatasi hak mogok kaum buruh dan pegawai negeri;

Sokong kaum penganggur dan larang pemetjatan se-wenang²;

Perbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjiatkan tuantanah² menurunkan sewatanah, dengan mewadjiatkan lintahdarat² mendaftarkan diri dan menurunkan bunga uang pindjaman, dengan meringankan pajak² negara dan dengan menghapuskan tunggakan pajak bumi;

Perbaiki nasib buruh tani dan perlindungan hak kaum tani penjawa tanah, beri pindjaman jang berbunga rendah kepada petani² miskin dan bantu petani² mengorganisasi diri untuk mengembangkan produksi pertanian;

Hapuskan setoran² paksa kaum tani, hapuskan sistim pologoro dan rodi serta perbaiki nasib pamongdesa;

Sahkan milik kaum tani atas tanah jang dulunja milik perkebunan² asing tetapi jang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani,

dan larang perampasan² tanah² tersebut oleh fihak perkebunan asing;

Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah² kosong jang tak dikerdjakan kepada kaum tani tak-bertanah dan tani-miskin;

Djamin hak kaum tani dan organisasi² tani dalam menentukan sewatanah kaum tani jang disewa untuk ditanami rosela, tebu dan tembakau oleh perusahaan asing atau oleh siapapun;

Beli tanah² partikelir dengan harga dan tjara pembayaran jang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah² sawah dan ladang dari bekas² tanah partikelir itu kepada kaum tani tak-bertanah dan tani-miskin;

Adakan djaminan pasar, perlindungan dan keringanan pajak bagi pengusaha² ketjil;

Bantu paranelajan dengan modal dan alat penangkap ikan serta perbaiki upah dan turunkan setoran buruhnelajan;

Adakan persiapan² jang pantas dalam melaksanakan transmigrasi, berikan tanah jang tjukup dan baik serta bantuan kredit dan alat² kerdja bagi paratransmigran;

Tindas dan basmi gerombolan „Darul Islam” dan gerombolan² teroris lainnja;

Beri hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan TNI mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan „Darul Islam” dan gerombolan² teroris lainnja jang membunuh kaum tani dan jang menghantjurkan desa²;

Beri bantuan kepada kaum pengungsi jang menjelamatkan diri dari gerombolan² teroris;

Adakan perbaikan sjarat hidup bagi parapradjurit dan perlakuan² istimewa terhadap pasukan², perwira² dan anakbuah² tentara jang sungguh² menindas dan membasmi gerombolan „Darul Islam” dan gerombolan² teroris lainnja;

Djamin pekerdjaan dan pendidikan kedjuruan bagi para bekas pedjuang bersendjata (veteran);

Hapuskan sistim swapradja dan adakan pemilihan² jang bersifat umum, rahasia dan bebas untuk DPRD² guna mendemokratisasikan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan desa, adakan perimbangan keuangan jang adil antara pusat dan daerah serta bantu perkembangan ekonomi daerah dan kebudayaan tiap² suku bangsa;

Hapuskan semua undang² dan peraturan² kolonial (Igo, Igob dll.) untuk mendemokratisasikan pemerintah desa;

Petjat dari djabatan² pemerintah pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap² dan koruptor² dan supaja orang² ini di-

hukum, tidak peduli mereka anggota partai pemerintah atau bukan ;

Tempatkan pada jabatan² pemerintah orang² yang bersedia mengabdikan dirinya kepada kepentingan Rakjat ;

Adakan hubungan yang baik antara tentara dan Rakjat dan antara opsir dan anakbuah, singkirkan dari ketentaraan pengchia-nat² bangsa, koruptor² dan elemen² yang hendak merusak demokrasi parlementer dan mendirikan diktatur militer atau junta militer dinegeri kita ;

Pertinggi panen padi dan kapas dengan djalan menentukan kewajiban² kepada pemilik² perkebunan asing untuk menanami sebagian dari kebunnja dengan padi atau kapas, dan dengan djalan memberikan bantuan yang berupa bibit, alat² pertanian, rabuk dan bimbingan teknis kepada kaum tani ;

Perluas pembangunan industri nasional dan lindungi industri nasional terhadap persaingan barang² asing, adakan sistim tjukai yang bersifat melindungi dan kontrol harga barang² supaya tidak terus membubung ;

Konsesi² tanah untuk pertambangan yang belum digunakan supaya segera ditjabut kembali dan dimana mungkin diusahakan oleh pemerintah sendiri ;

Import dan export serta perusahaan² penting disegala lapangan harus sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah ;

Import untuk keperluan negara dan export barang² hasil perusahaan² negara supaya dilakukan langsung oleh pemerintah ;

Plan Lima Tahun pemerintah tidak boleh memberatkan beban Rakjat, sebaliknya yang harus diberatkan ialah kapitalis² besar asing, tuantanah² dan hartawan² lainnya ;

Djatuhkan hukuman yang berat kepada kakitangan Belanda dan siapa saja yang melakukan gerakan² subversif dan yang mengadakan sabotase² di-djawatan² pemerintah atau di-lapangan² lain ;

Tambah anggaran belandja untuk Kementerian „Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan“, tambah djumlah sekolah dan gedung² sekolah, kembalikan gedung² sekolah yang dipakai untuk keperluan lain, djamin fasilitas² dilapangan pendidikan bagi murid² dan mahasiswa, perbaiki nasib guru dan pergiat usaha pemberantasan buta-huruf ;

Hapuskan pendidikan kolonial serta laksanakan pendidikan nasional yang ilmiah dan kerakjatan ;

Djamin kedudukan yang sama bagi wanita dan laki², dan djamin parapemuda dan anak² untuk mendapatkan pendidikan yang bermanfaat ;

Adakan kesempatan kerdja yang lebih luas dan perlakuan² istimewa terhadap paraahli Indonesia yang dengan sungguh² bekerdja untuk kemandjuaan ilmu dan kebudajaan ;

Adakan gedung² atau rumah² untuk pertemuan² paraseniman, untuk latihan² dan pertundjukan² kesenian ;

Perbanyak klinik² pengobatan dan giatkan pemberantasan penyakit yang banjak terdapat dikalangan penduduk ;

Batalkan pengakuan atas perdjandjian San Francisco dengan Djepang, tuntutan penggantian kerugian yang adil dari Djepang dan lawan persendjataan kembali Djepang, karena ini membahayakan keamanan Indonesia dan perdamaian di Asia dan Pasifik ;

Perhebat perdjuaan pembebasan Irian Barat dengan penju-sunan kekuatan dalam negeri dan dengan menarik solidaritet internasional ;

Bantu Rakjat Indonesia yang berada di Irian Barat dalam meng-organisasi diri dan dalam semua bentuk perlawanannya terhadap pendudukan Belanda di Irian Barat ;

Djalankan politik luarnegeri atas dasar mempertahankan perdamaian dunia, laksanakan putusan² konferensi Asia-Afrika dengan konsekwen dan lawan tiap² usaha yang mau menarik Indonesia kedalam blok perang dan agresif ;

Luaskan hubungan ekonomi dan kebudajaan dengan semua negeri, tanpa memandang perbedaan sistim sosial dan politik, atas dasar kepentingan dan keuntungan bagi Indonesia, serta batalkan embargo keseluruhannya dalam perdagangan dengan Tiong-kok.

**

PKI berpendapat bahwa tuntutan² diatas adalah tuntutan² yang sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo sekarang dan oleh pemerintah mana saja yang menghendaki bantuan Rakjat, yang mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi, kemandjuaan dan perdamaian.

Tuntutan² diatas pada pokoknya adalah sama dengan program khusus atau program tuntutan PKI kepada kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, tuntutan² yang dirumuskan dan disahkan dalam Kongres ke-V PKI. Disana-sini diadakan perubahan², diadakan penambahan² dan bagian² yang sudah lewat waktu ditiadakan.

Program tuntutan diatas banjak yang sama dengan program kabinet Ali Sastroamidjojo yang ke-2 tetapi diformulasi lebih kongkrit dan disana-sini lebih madju, terutama yang berhubungan dengan tuntutan² yang mengenai kebebasan² demokratis, mengenai

perbaikan keadaan kaum tani, mengenai pendemokrasian alat² negara dan mengenai tuntutan² perbaikan ekonomi negeri. Mengenai politik luarnegeri boleh dikatakan hampir seluruhnya sama. Djika sudah ternjata bahwa program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 banjak persamaannya dengan tuntutan² PKI dan tuntutan² Rakjat pada dewasa ini, maka sekarang jang terpenting ialah pelaksanaan daripada program tersebut. Ini banjak tergantung pada kesungguhan fihak pemerintah dalam melaksanakan programnya dan pada kuatnya gerakan Rakjat dan persatuan Rakjat. Sudah tentu pelaksanaan daripada program kabinet Ali Sastroamidjojo akan lebih lantjar djika dilaksanakan oleh Pemerintah Koalisi Nasional.

Program tuntutan diatas djuga banjak persamaannya dengan program „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia” jang disahkan oleh Kongresnya jang pertama dalam bulan Agustus 1955. Kongres ini, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, adalah „mewakili bagian terbesar daripada Rakjat Indonesia dan oleh karena itu Rakjat Indonesia supaya tunduk pada putusan² Kongres Rakjat”.

Kenjataan bahwa tuntutan² PKI sekarang banjak persamaannya dengan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 dan dengan program jang diputuskan oleh Kongres pertama daripada „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia”, adalah membuktikan bahwa tuntutan² PKI tersebut adalah sesuai dengan suara bagian jang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia dan dengan opini umum di Indonesia. Oleh karena itu adalah sesuatu jang objektif djika PKI menjadikan tuntutan² tersebut sebagai alas (platform) untuk berunding dan bekerdjasama dengan partai² lain, dengan golongan² dan perseorangan² jang anti-kolonialisme, jang demokratis dan patriotik. Djuga adalah objektif djika tuntutan² tersebut dijadikan dasar untuk berunding dalam pembentukan pemerintah, dijadikan tuntutan² pada pemerintah jang berkuasa dan dijadikan sembojan² aksi daripada massa. Bagi rakjat di Irian Barat tuntutan² tersebut belum dapat dijadikan sembojan aksinya. Soal Irian Barat menghendaki pemetjahan tersendiri, dan disana jang terpenting ialah memperdjuangkan untuk adanya hak² azasi manusia, seperti kemerdekaan memeluk agama, berkejakinan, berfikir, memilih tempat tinggal dan surat menjurat, dan memperdjuangkan terwujudnya hak² demokrasi seperti kebebasan berbitjara, menulis, berapat, berorganisasi, berpawai, berdemonstrasi dan mogok.

Mengenai beberapa soal dari program tuntutan diatas perlu ada pendjelasan. Dalam mendjelaskan soal² tersebut kita sekaligus akan mendjawab beberapa pertanyaan jang sering diadjukan kepada PKI dan akan mengkritik pendapat² sebagian orang jang

tidak tepat. Soal² jang perlu mendapat pendjelasan tersebut adalah sbb. :

1. Sikap terhadap kolonialisme Belanda

PKI berpendapat, karena kolonialisme Belanda sudah lama mendjadjah, memeras dan menghina Rakjat Indonesia setjara sangat kedjam dan kurang adjar, seluruh Rakjat Indonesia harus mengambil sikap jang lebih tegas dan lebih keras terhadap kolonialisme Belanda daripada terhadap imperialis² lainnya. Sikap demikian ini menjadi keharusan jang lebih besar lagi berhubungan dengan kekuasaan kaum kapitalis besar Belanda jang masih menguasai sebagian besar ekonomi Indonesia, berhubungan kaum kolonialis Belanda sampai sekarang masih menduduki 20% daripada wilayah Republik Indonesia, jaitu Irian Barat, dan masih melakukan kegiatan² subversif untuk merobohkan Republik Indonesia. Sudah pada tempatnya djika Rakjat Indonesia menganggap kaum kolonialis Belanda sebagai musuhnja jang nomor satu, dengan sama sekali tidak melupakan untuk melawan bahaya jang datang dari kaum imperialis lainnya, terutama Amerika.

Adalah adil dan akan mendapat sokongan penuh dari Rakjat djika pemerintah Indonesia mengambil tindakan jang keras dilapangan ekonomi terhadap kaum kapitalis besar Belanda. Pada dewasa ini Rakjat Indonesia, PKI dan partai² demokratis lainnya menuntut supaya pemerintah Indonesia menghapuskan hutang Indonesia kepada Belanda menurut persetujuan KMB, supaya pemerintah Indonesia bertindak jang keras untuk mengurangi keuntungan kaum kapitalis besar Belanda dan untuk membatasi pemindahan (transfer) keuntungan mereka keluarnegeri. Pemerintah harus mengoper semua perusahaan bank, transport, listrik dan telekomunikasi Belanda dengan tjara dan harga jang ditentukan oleh pemerintah menurut kemampuan negara. Mengenai tanah² konsesi untuk perkebunan dan pertambangan jang sekarang sudah habis kontraknja, supaya tidak diperpanjang lagi kontraknja dan kebun atau tambangnja supaya dioper oleh pemerintah. Kebun² Belanda jang tidak dirawat dengan pantas supaya djuga dioper oleh pemerintah. Tanah² jang sudah dikontrak oleh kapitalis² Belanda tetapi tidak dikerdjakan supaya diambil oleh pemerintah dan diberikan dengan tjuma² kepada kaum tani miskin dan tani takbertanah. Tuntutan² ini adalah tuntutan² Rakjat jang kuat dalam hubungan merealisasi pelaksanaan pembatalan KMB.

2. Kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat

Ini adalah tuntutan terpenting daripada PKI kepada tiap² pemerintah. Adanja kebebasan² demokratis tidak hanya penting untuk PKI dan seluruh kekuatan progresif, tetapi djuga penting bagi seluruh bangsa kita. Orang bisa berbitjara tentang perdjuaan untuk merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar, tentang memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, tentang mengalahkan gerombolan² teror DI-TII dan tentang melaksanakan politik perdamaian, tetapi djika tidak ada kebebasan² demokratis bagi Rakjat dan organisasi² Rakjat untuk dapat menjatakan perasaan, fikiran dan hasratnja, maka semua pembijtaraan itu adalah omong kosong. Bung Karno sering mengatakan bahwa „politik jalah kekuasaan” dan kewadajiban Rakjat Indonesia jalah „membentuk kekuatan” („machtsvorming”). Bagaimana kekuatan akan dapat dibentuk kalau kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat tidak diberikan kebebasan² demokratis jang se-luas²nja. Sembojan „Irian Barat harus segera masuk kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia” tidak akan ada artinja djikalau Rakjat dan organisasi² Rakjat tidak diberi kesempatan se-luas²nja memperkuat dirinja dalam organisasi² dan untuk melatih diri dalam aksi². Ada sebagian orang jang berfikiran pendek mengira, bahwa pemerintah akan mempunjai kewibawaan djika berani mengerahkan alat²nja untuk bertindak keras terhadap demonstrasi² dan aksi² lainnja daripada Rakjat.

Kenjataan², baik diluarnegeri maupun didalamnegeri, membuktikan bahwa tidak ada perbuatan „tangan besi” terhadap gerakan Rakjat jang demokratis jang menguntungkan fihak jang berbuat. Mulai Hitler sampai Hatta dan Sukiman mengalami kegagalan dengan politik „tangan besi” terhadap Rakjat. Politik „tangan besi” hanya memperbesar kebentjiaan Rakjat kepada tiap² pemerintah jang berbuat demikian, ada ataupun tidak ada Komunis jang memimpin perlawanan Rakjat. Politik „tangan besi” adalah daja ter-achir dari suatu penguasa jang bingung dan putus asa.

PKI mengusulkan kepada pemerintah dan pendjabat² pemerintah supaya dalam menghadapi aksi² Rakjat menempuh djalan berunding. Kehidupan berorganisasi Rakjat Indonesia sudah agak tinggi, oleh karena itu adalah mudah untuk berunding dengan Rakjat lewat pemimpin² organisasi²nja.

3. Front Persatuan Nasional

Front persatuan adalah sjarat untuk melaksanakan program tuntutan² sekarang dan untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Djuga dalam masjarakat sosialis front persatuan tetap diperlukan jaitu persatuan antara Komunis dan bukan-Komunis. Djadi teranglah, walaupun bagaimana besar dan banjaknja rintangan dari orang² jang berkepalabatu, terutama dari sementara pemimpin² Masjumi-PSI, PKI tidak akan henti²nja dan tidak akan djemu²nja bekerdja untuk front persatuan. PKI menghargai sembojan jang djuga diandjurkan oleh Bung Karno, jaitu sembojan tentang „kerdjasama kaum Agama, Nasionalis dan Komunis”. Ini adalah sembojan jang tjotjok dengan kebutuhan jang mendesak dari Rakjat Indonesia sekarang, jaitu persatuan. PKI menghormati tiap² agama, tetapi PKI menentang digunakannya perbedaan agama untuk memetjahbelah persatuan nasional. Front persatuan jang diperdjuangkan oleh PKI bukan front persatuan jang berdasarkan keagamaan atau filsafat, tetapi jang berdasarkan kepentingan bersama daripada seluruh Rakjat Indonesia pada masa jang tertentu.

Sebagaimana sudah dikatakan, kewadajiban PKI sekarang jalah bekerdja keras untuk mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu. Kaum Komunis tidak membantah bahwa memang ada pertentangan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah, terutama antara kaum buruh jang dihisap dengan kaum kapitalis nasional jang menghisap, antara PKI dan partai² burdjuasi nasional. Tetapi adalah keliru djika pertentangan ini dipertadjam. Sebaliknya, PKI berpendapat bahwa pertentangan² jang terdapat diantara kekuatan progresif dan kekuatan tengah, diantara kaum buruh dan kaum kapitalis nasional perlu dan bisa diselesaikan setjara berunding, setjara saling memberi konsesi, setjara saling menguntungkan. Dengan demikian dapat ditjegah agar pertentangan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah tidak merugikan persatuan nasional, dan tidak menguntungkan kekuatan kepalabatu, kekuatan musuh² Rakjat, jaitu kekuatan komprador dan tuantanah jang bersekongkol dengan kaum imperialis.

Kaum Komunis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti di Indonesia sekarang jang revolusioner bukan hanya klas proletar, tetapi djuga ada klas² dan golongan² lain. Kemerdekaan klas buruh tidak mungkin tertjapai kalau tidak ada kemerdekaan nasional, ini adalah satu hal jang njata. Disamping itu tiap² Komunis djuga berkejakinan bahwa front persatuan hanya bisa kuat djika berda-

sarkan persekutuan buruh dan tani dan dipimpin oleh klas buruh. Setengah orang berkeberatan dengan pendirian kaum Komunis ini dan bertanya: „Mengapa harus berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan mengapa harus dipimpin oleh klas buruh?“ Front nasional harus berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan harus dipimpin oleh klas buruh, bukanlah keinginan subjektif daripada kaum buruh dan kaum tani, dan bukanlah pula keinginan subjektif daripada kaum Komunis. Adalah satu kebenaran bahwa kaum buruh dan kaum tani merupakan bagian yang terbesar daripada Rakyat Indonesia dan sebagai klas atau golongan yang samasekali tidak mempunyai kepentingan untuk bersekutu dengan tuantanah dan imperialis. Klas buruh adalah klas yang berpandangan djauh, mempunyai semangat tidak mementingkan dirisendiri dan hanya mementingkan kepentingan umum serta paling konsekwen dan berdisiplin. Dalam tiap² perjuangan kita membutuhkan pimpinan yang berpandangan djauh, tidak mementingkan dirisendiri, konsekwen dan berdisiplin. Front nasional, kalau tidak mau mengalami kegagalan, djuga harus mempunyai pimpinan klas yang demikian. Oleh karena itu sewadjarnjalah pimpinan djatuh pada klas buruh.

Kaum intelektual revolusioner, tidak perduli dari mana asal klasnja, tidak perduli ia berasal dari burdjuasi nasional atau ningrat, tidak perduli ia berasal dari burdjuasi ketjil atau proletariat, mereka sama² bisa mengabdikan kepentingan klas buruh, dan djika demikian mereka dimasukkan dalam kategori klas buruh, klas yang mempunyai kewadajiban sedjarah memimpin revolusi.

Burdjuasi ketjil kota, walaupun mempunyai sedikit milik, djuga termasuk golongan yang menderita dan oleh karena itu merupakan sekutu proletariat yang dapat dipertjaja.

Berbeda dengan klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil kota, kaum burdjuis nasional karena hubungan dagang dan hubungan² lainnja merupakan klas dalam front nasional yang terdekat hubungannja dengan kaum imperialis dan tuantanah, walaupun sejatja objektif mereka mempunyai sifat anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Sebagai klas penghisap, disamping mempunyai perusahaan dagang dan industri mereka djuga sering memiliki dan menjewakan tanah, djadi djuga menghisap kaum tani.

Djadi djelaslah, kalau kaum Komunis menginginkan front nasional yang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan yang dipimpin oleh klas buruh, samasekali bukan keinginan subjektif daripada kaum Komunis dan samasekali tidak mengandung keinginan menghina burdjuasi nasional atau golongan² lain diluar kaum buruh atau diluar kaum buruh dan kaum tani. Sebaliknya, untuk ke-

pentingan burdjuasi nasional sendiri, untuk perkembangan per-ekonomiannja, penting adanja front nasional yang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan yang dipimpin oleh klas buruh, karena hanya front nasional yang demikian yang dapat mengalahkan feodalisme dan imperialisme. Hanya kalau feodalisme dan imperialisme sudah dikalahkan maka burdjuasi nasional lebih mempunyai kesempatan untuk berkembang dan untuk mengabdikan diri kepada tanahair dan bangsa.

Untuk tidak mempertadjam pertentangan dalam kubu front persatuan, PKI tidak akan bertindak yang merugikan partai² lain yang demokratis. Tentu sadja djika partai-partai tersebut tidak berbuat yang merugikan kubu front persatuan. Kaum Komunis harus pandai membatasi diri dalam hal mengkritik utjapan-utjapan dan perbuatan² orang² dari partai² yang demokratis. Utjapan² atau perbuatan² yang mungkin menusuk perasaan, tetapi sifatnja tidak penting, tidak perlu dikritik. Kaum Komunis hanya mengkritik utjapan² atau perbuatan² yang bersifat memetjah persatuan, memetjah kekuatan massa dan yang menundjukkan ke-ragu²an dalam melaksanakan politik anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Jang penting djuga jalah tjara mengkritik, harus benar² kena soalnja dan tidak mengumbar nafsu dan perasaan.

4. Soal tanah dan gerakan tani.

Dalam program tuntutan² sekarang PKI tidak menuntut pensi-taan atas tanah tuantanah dan pembagian tanah tersebut kepada kaum tani. Pada dewasa ini politik PKI yang terpenting untuk kaum tani ialah politik turun sewa (turun setoran) dan turun bunga. Dengan politik ini, disatu fihak PKI tetap memperdjuaungkan kepentingan kaum tani, tetapi difihak lain memungkinkan ikutnja sebagian dari tuantanah, jaitu bagian yang agak maju untuk ikut memperkuat front persatuan dalam melawan kolonialisme, untuk ikut merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia dan untuk mempertahankan perdamaian dunia. Tuntutan turun sewa dan turun bunga adalah tuntutan² yang sangat mendesak dan sangat adil serta tidak begitu berat untuk dapat dipenuhi oleh tuantanah dengan pensahan pemerintah, asal tuantanah dan pemerintah mempunyai sedikit rasa keadilan dan tidak lupa pada djasa² kaum tani selama Revolusi Agustus dan djasa² kaum tani sekarang dalam menghasilkan bahan makanan yang terpokok, jaitu beras. Djika dipenuhi tuntutan turun sewa dan turun bunga, apalagi djika disertai bantuan² untuk mengerdjakan tanah dari fihak pemerintah, maka tidak bisa tidak, sedikit atau banyak, akan me-

ringankan penderitaan kaum tani dan ini akan menimbulkan kegembiraan bekerja dikalangan kaum tani. Hal ini sangat penting dalam hubungan dengan soal memperbesar produksi beras, soal yang sangat urgen bagi Indonesia sekarang.

Disamping itu PKI juga memperjuangkan kenaikan upah bagi buruh tani.

Kaum Komunis Indonesia sudah dan terus akan mengutamakan pekerjaan dikalangan kaum tani, yang berarti bekerja dikalangan bagian terbesar dari Rakyat Indonesia, berarti mempererat persatuan buruh dan tani. Diatas se-gala²nja, juga dikalangan kaum tani persatuan harus terus menerus diperkuat.

Sikap PKI terhadap tanah² perkebunan asing yang tidak dikerjakan berbeda dengan sikap terhadap tanah² tuantanah Indonesia. Pada waktu sekarang, PKI terus akan menuntut supaya tanah² perkebunan asing yang tidak dikerjakan diambil kembali oleh pemerintah walaupun kontraknya belum habis, dan supaya tanah² itu diberikan dengan tjuma² kepada kaum tani tak-bertanah dan tanimiskin. Untuk memperbesar produksi beras dan untuk meringankan beban kaum tani, PKI juga menuntut supaya tanah² kosong yang dapat dijadikan tanah² pertanian dibagikan atau dapat dikerjakan oleh kaum tani.

PKI akan bekerja keras untuk mengorganisasi kaum tani dan memimpin kaum tani agar tanah² yang sudah menjadi milik kaum tani sebagai hasil perjuangannya terhadap perkebunan asing dan terhadap tuantanah² lainnya tidak jatuh lagi ketangan tuantanah. Untuk ini PKI akan menghidupkan kerja gotongrojong dikalangan kaum tani atas dasar kepentingan bersama dan saling menguntungkan serta menuntut adanya bantuan² pemerintah kepada kaum tani agar dapat mengerjakan tanahnya lebih baik, dapat mengembangkan kerajinan tangan, peternakan dan perikanan.

5. Perekonomian nasional dan Plan Lima Tahun.

Dalam program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 maupun dalam program „Kongres Rakyat“ ditjantumkan tentang penggantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ini adalah baik. Tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan daripada program tersebut. Selama ini kita sering menemukan disalahgunakannya perkataan „ekonomi nasional“ oleh sementara orang untuk memperkaya diri dan memperkaya partainya dengan merugikan kepentingan nasional, kepentingan seluruh bangsa. Orang² ini menjamakan arti „ekonomi nasional“ dengan „ekonomi kapitalis nasional“.

Sebagaimana sudah dikatakan diatas, PKI sekarang tidak menentang pertumbuhan yang wajar daripada kapitalisme nasional,

sebaliknya PKI memperjuangkan supaya kaum kapitalis warga-negara Republik Indonesia mendapat proteksi dan fasilitas dari pemerintah dalam melawan saingan kapitalis² besar asing. Tetapi, seharusnya istilah „ekonomi nasional“ sekarang diberi arti yang lebih luas, yaitu ekonomi untuk kepentingan seluruh bangsa yang bebas dari kekuasaan kaum kapitalis besar asing, dimana ada jaminan peluasan sektor ekonomi negara dan adanya proteksi dan fasilitas kepada kapitalis² nasional. Diatas se-gala²nja ekonomi negara harus dinomersatukan. Jadi adalah keliru sekali jika untuk kepentingan kapitalis² nasional digerowoti kekuatan ekonomi negara dengan melalui saluran² birokrasi, dengan menjalankan korupsi, dengan mengobrol kredit dari bank negara kepada kawan separtai, padahal orang yang mendapat kredit itu belum tentu benar² pedagang atau industrialis. Jika hal ini diteruskan, maka yang dihadapi oleh Indonesia tidak lain daripada keruntuhan yang lebih dalam.

PKI berpendapat, jika misalnja ada perusahaan penting yang harus ditinggalkan oleh kapitalis asing, maka per-tama² perusahaan² penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi nasional harus dioper oleh negara dengan harga dan tjara pembayaran yang ditentukan negara berdasarkan kemampuan negara. Kalau ini tidak mungkin, maka harus ditempuh djalan milik bersama antara negara dan partikular dengan tidak usah ada ketentuan bahwa negara harus mempunyai saham yang terbanjak, malahan jika keuangan negara tidak mengizinkan saham negara tjukup dalam bentuk dja². PKI berpendapat, bahwa adalah merugikan kepentingan nasional dalam arti tidak memperkuat sektor ekonomi negara, jika perusahaan² penting dipegang oleh kapitalis² nasional, apalagi kalau kapitalis² nasional itu harus mendapat kredit dari negara buat mengoper perusahaan² asing.

Jang juga berbahaya ialah usaha² sementara orang yang ingin membikin milik² negara seperti Radio Republik Indonesia, Perusahaan Film Negara, PFT dll. menjadi perusahaan partikelir atau setengah-partikelir. Perbuatan ini tidak lain daripada usaha untuk memperlemah sektor ekonomi negara dan mengurangi atau meniadakan hak kontrol dan pimpinan langsung dari pemerintah. Usaha ini terang bertentangan dengan semangat dan tudjuan Revolusi Agustus, karena perusahaan² tersebut ketika revolusi direbut oleh kaum buruh dengan sembojan „Milik Republik Indonesia“. Kita kuatir kalau usaha mempartikelirkan atau „me-jasankan“ djawatan² pemerintah ini akan dilanjutkan dengan „mempartikelirkan“ atau „me-jasankan“ negara.

Pada pokoknja kewadjaiban Rakyat Indonesia ialah menjegah

digerowotinja kekuasaan negara atas djawatan²nja atau atas perusahaan² yang sudah dimilikinja dan dengan sekuat tenaga memperbesar kekuasaan negara atas perusahaan² yang penting dan memperluas djawatan²nja. Usaha untuk mempartikelirkan milik² negara sering diberi alasan supaya dapat menaikkan upah buruh atau pegawai agar mendekati kebutuhan kaum buruh atau pegawai. Dengan alasan ini diharapkan politik mempartikelirkan milik² negara akan mendapat sokongan dari kaum buruh atau pegawai. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh haruslah ditjarikan jalan lain, jaitu djalan yang tidak hanya memberi pemetjahan untuk satu atau beberapa perusahaan atau djawatan, tetapi untuk seluruh buruh atau pegawai negeri. Kalau satu djawatan bisa dipartikelirkan, maka ada alasan bagi djawatan² lain untuk djuga dipartikelirkan ! Apa djadinja Republik Indonesia kalau semua djabatannja atau bagian² dari djabatannja sudah dipartikelirkan ?

Sekarang ada usaha untuk membikin Plan Lima Tahun bagi Indonesia. Tentang ini belum banyak yang diumumkan sehingga bagi kita belum terang apa yang akan dibangun dan dari mana modal akan didapat untuk melaksanakan Plan Lima Tahun tersebut. PKI, sebagai Partai yang tidak duduk dalam pemerintah, tidak ikut merentjanakan Plan Lima Tahun ini.

Menurut apa jg. sudah dimuat dalam surat kabar² Plan Lima Tahun diadakan dengan maksud untuk membangun ekonomi nasional. Agaknja dapat dipertjaja bahwa Plan Lima Tahun diadakan untuk membangun ekonomi nasional. Djuga kaum Komunis akan menjokong Plan Lima Tahun djika ditudjukan untuk membangun ekonomi nasional.

Plan Lima Tahun tentu membutuhkan modal. Sekarang timbul pertanjaan: dari mana modal didapat? PKI mengusulkan supaya modal untuk Plan Lima Tahun diambilkan dari keuntungan kapitalis² besar asing, dengan djalan mengurangi keuntungan² mereka lewat undang² atau peraturan² pemerintah. Disamping itu tuantanah² dan hartawan² Indonesia harus diwadjibkan memodali Plan Lima Tahun dengan ber-matjam² bentuk jg. harus diatur dalam undang² atau peraturan² pemerintah. Djika untuk Plan Lima Tahun harus diadakan pindjaman atau penerimaan bantuan dari luarnegeri, maka PKI dapat menjetudjui asal tanpa ikatan apapun, misalnja tidak seperti yang sudah pernah kita alami dengan pindjaman dari Eximbank.

PKI djuga mengusulkan supaya Plan Lima Tahun tidak berakibat bertambahnja beban Rakjat pekerdja, supaya tidak menimbulkan padjak² baru bagi Rakjat pekerdja, sebaliknya Plan Lima Tahun supaya membuka lapangan² pekerdjaan baru bagi parapenganggur

yang sangat banyak itu. Rakjat pekerdja Indonesia pada waktu sekarang sudah tidak sepantasnja lagi mendapat beban² yang lebih berat diatas pundaknja, karena sekarang sudah terlalu berat. Sebaliknya, kaum kapitalis besar asing, kaum tuantanah dan hartawan² lainnja sudah sewadjernja memikul lebih banyak beban negara, karena mereka mendapat keuntungan dari mengurus kekajaan alam dan dari menghisap Rakjat negeri ini. Adalah sangat masuk akal djika kaum imperialis, tuantanah² dan hartawan² lainnja misalnja diwadjibkan membeli sedjumlah obligasi negara sesuai dengan besarnya kekajaan masing² untuk membelandjai Plan Lima Tahun.

Selanjutnja usul PKI jalah supaya Plan Lima Tahun ditudjukan pada usaha² persiapan industri berat milik negara, dan supaya dalam hubungan dengan Plan Lima Tahun ini pemerintah membuka kesempatan jg. se-luas²nja untuk melatih kader² teknik dengan melatih mereka didalamnegeri atau dengan mengirim mereka keluar-negeri, dengan tidak memandang perbedaan sistim politik dan sosial daripada negeri² tempat pemuda² kita beladjar.

6. Perdjuaan Parleментар

Kaum Komunis Indonesia sudah lama berpendirian, bahwa djalan yang harus ditempuh oleh Rakjat Indonesia dalam menudju ke Sosialisme tidak harus persis sama dengan djalan² yang sudah ditempuh oleh Rakjat Rusia, Rakjat Tiongkok atau Rakjat² negeri² lainnja yang sekarang sudah mendjadi keluarga kubu Sosialisme. Dalam pidato peringatan ulangtahun PKI jang ke-32 (23 Mei 1952) di Djakarta, yang diutjapkan atasnama CC PKI, a.l. dikatakan : bahwa „Tiap² bangsa akan melalui djalannja sendiri menudju ke Sosialisme berdasarkan perkembangan daripada keadaan nasionalnja, daripada keadaan politik, ekonomi dan kebudayaan“. Djuga dikatakan „bahwa klas buruh bisa memenuhi kewadajiban sedjarahnja dalam negara yang demokratis, dimana Parlemen dan badan² lainnja diperbaharui, artinja diberi isi yang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat“.

Ada sementara orang yang sampai sekarang masih berpendirian, bahwa ikutnja Partai Komunis dalam pemilihan umum dan adanya fraksi PKI didalam Parlemen hanya sekedar untuk beragitasi dan berpropaganda sadja. Tetapi, tiap² orang yang mengetahui pekerdjaan anggota² PKI didalam Parlemen, baik Parlemen sebelum pemilihan umum maupun yang sesudahnja dapat menarik kesimpulan bahwa kaum Komunis bekerdja dengan sungguh² di Parlemen, tidak hanya mengenai pidato² di-rapat² pleno terbuka yang dapat didengar atau dibatja oleh publik, tetapi djuga dalam rapat² tertutup,

didalam rapat² seksi² dan bagian² kaum Komunis mentjurahkan perhatiannya untuk memenangkan pikiran² dan konsep²nja yang madyu. Semuanya ini menundukkan, bahwa PKI tidak memandang Parlemen hanya sekedar sebagai forum propaganda sadja.

Dalam program PKI yang diusahakan oleh Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret tahun 1954 a.l. dikatakan bahwa „PKI telah ambil bagian dan terus akan ambil bagian yang aktif dalam perjuangan parlementer. PKI, sadar sepenuhnya akan tanggungjawab politiknya, mendjalankan pekerjaan parlementer dengan penuh ke-sungguhan²an”.

Kaum Komunis menganggap pelaksanaan pemilihan umum pada akhir tahun 1955 sebagai hasil yang penting dari perjuangan Rakyat. Demikian juga anggapan dari seluruh kaum progresif Indonesia. Penjair progresif, Klara Akustia, menjambut pembentukan Parlemen baru dalam sadjarknja sbb. :

DPR Baru

*Kalung bunga ini untukmu
amanat harapan bangsa*

*Biarkan sadja
kegetiran yang masih kami lalu
hadapkan dada
ke tamanbunga kasih dan hargadiri*

*Djadikan sadja
dirimu dan diri bangsa sekali lagi
Gustus patlima
kenikmatan satu dalam hidup dalam mati*

*Kalung bunga ini untukmu
amanat harapan djaja*

Saja tidak tahu apakah penjair² diluar kubu progresif juga menjanjikan terbentuknja Parlemen baru. Yang sudah terang, kaum progresif menjambut pembentukan Parlemen baru tidak hanya dengan perhitungan² politik, tapi juga perasaan paraseniman progresif ikut menjambutnja. Seluruh kaum progresif menjatakan dalam berbagai bentuk agar Parlemen baru setia pada tjita² Revolusi Agustus 1945, dan djika ini terdjadi segala derita Rakyat tidak akan sia².

Hanya orang² yang berkepalabatu yang tetap ngotot mengatakan, bahwa kaum Komunis hanya melihat satu djalan untuk mentjapai tudjuannya, jaitu peperangan dalam negeri. Untuk memperkuat dalilnja, mereka meng-ungkit² peristiwa Madiun, sesuatu yang sekarang bagi kebanyakan orang sudah djelas duduk perkara yang sesungguhnya. Bukan rahasia lagi bahwa tindakan terhadap kaum Komunis di Madiun dalam bulan September 1948 pada mulanja samasekali tidak berdasarkan putusan Parlemen (BP KNIP), tetapi kemudian sesudah dilakukan pengedjaran² guna membasmi kaum Komunis, barulah digunakan Parlemen sebagai stempel untuk mensahkan perbuatan yang sudah dilakukan terlebih dahulu.

Selain daripada itu orang yang sedikit sadja mempunyai ingatan tidak mungkin melupakan peristiwa² sbb. : Ketika Pemerintah Sukiman dengan razia Agustusnja dalam bulan Agustus 1951 melamparkan pandji² demokrasi parlementer, bukankah PKI dan tenaga² demokratis lainnja, yang memungut pandji² tersebut dan mengibarkannya kembali ? Ketika terdjadi peristiwa 17 Oktober 1952, dimana sistim parlementer Indonesia mengalami krisis yang dalam, dengan adanya pertjobaan perebutan kekuasaan dari luar Parlemen, bukankah kaum Komunis berdiri dibarisan depan dalam mempertahankan sistim demokrasi parlementer ? Politik PKI yang mempertahankan sistim demokrasi parlementer mendapat sokongan dari Rakyat, demokrasi dapat diselamatkan, sebaliknya pemerintah Sukiman yang memperkosa demokrasi parlementer terpaksa gulung tikar dan pertjobaan kaum militeris pada 17 Oktober 1952 mengalami kegagalan total.

Berhubung dengan adanya dalil tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme lewat parlemen seperti yang dimuat didalam laporan Central Komite PKSU kepada Kongres ke-XX PKSU, maka banjak diajukan pertanyaan kepada kaum Komunis, apakah mungkin di Indonesia peralihan ke Sosialisme ditjapai dengan tjara damai, dengan lewat parlemen ? Tiap² Komunis harus dapat mendjawab pertanyaan ini.

Per-tama² harus dikemukakan, bahwa soal yang dihadapi Indonesia sekarang bukanlah soal peralihan langsung ke Sosialisme. Soal Indonesia sekarang ialah soal peralihan dari keadaan sekarang kesuatu sistim kekuasaan Rakyat jg. demokratis, suatu kekuasaan yang dengan konsekwen melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945, melaksanakan penghapusan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme sampai ke-akar²nja serta mengadakan perubahan² demokratis. Apakah mungkin peralihan dari keadaan sekarang ke keadaan seperti yang disebutkan itu berdjalan dengan damai, berdjalan lewat parlemen ?

Mengenai pertanyaan yang terakhir ini jawab kaum Komunis ialah : itu adalah satu kemungkinan, dan kemungkinan yang dengan sekuat tenaga harus kita jadikan kenyataan. Jadi, kalau tergantung kepada kaum Komunis, maka bentuk yang se-baik²nja, bentuk yang ideal daripada peralihan kesistim kekuasaan Rakjat yang demokratis, yaitu tingkat persiapan kesistim sosialis, ialah bentuk yang damai, bentuk yang parlementer. Jadi jika tergantung pada kaum Komunis, jalan damai lah yang dipilih, karena kaum Komunis memang bukan pembunuh.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah golongan² dan partai² lain akan membiarkan peralihan kesistim kekuasaan Rakjat setjara damai, setjara parlementer ? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh partai² lain sebelum menuduh yang bukan² terhadap kaum Komunis. Kaum Komunis tidak mengetahui semua yang sedang difikirkan dan sedang direntjanakan oleh kaum reaksioner, oleh karena itu kaum Komunis harus senantiasa waspada dan tidak henti²nja membikin Rakjat waspada terhadap rentjana² busuk daripada kaum reaksioner. Yang sudah terang, kaum reaksioner bermaksud djelek terhadap Rakjat.

Pengalaman di Gujana, pengalaman di Guatemala, pengalaman di Pakistan Timur dan pengalaman di Indonesia sendiri dengan pemerintah Hatta dan pemerintahan Sukiman, menunjukkan bahwa bukan kaum Komunis, bukan kaum revolusioner, bukan kaum progresif yang tidak mau mentjapai tudjuan politiknja dengan melewati parlemen. Sebaliknya, adalah kaum reaksioner, adalah kaum kepalabatu, adalah kaum komprador dan tuantanah yang bersengkongkol dengan kaum imperialis yang kuatir melihat kemadjuan² gerakan Rakjat dan kemadjuan² Partai Komunis, yang ketakutan bahwa parlemen dan badan² negara lainnja dapat diberi isi yang benar demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat. Karena kuatir pada kekuatan Rakjat maka mereka menjadi nekad, mereka melemparkan pandji² demokrasi parlementer dan bertindak dengan „tangan besi“.

Kaum Komunis harus waspada dan harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan² sosial yang fundamental setjara damai, setjara parlementer. Tindakan se-wenang² kaum reaksioner terhadap Rakjat dan Partai Komunis hanya dapat dipatahkan dengan kekuatan Rakjat yg. lebih besar daripada kekuatan kaum reaksioner dan dengan pimpinan yg. teguh dari Partai Komunis yang bersatu dengan partai² demokratis lainnja.

Satu hal yang sederhana perlu diperingatkan, yaitu, jika kita

ingin mengadakan peralihan keadaan yang lebih baik setjara damai, setjara parlementer, maka per-tama² parlemennja harus ada. Anak ketjil bisa mengerti, bahwa peralihan lewat parlemen tidak mungkin jika parlemennja tidak ada. Jadi satu kewadajiban yang penting dari kaum Komunis, kaum demokrat dan patriot² sekarang ialah melawan tiap² kekuatan yang ingin menghapuskan Parlemen, melawan pertjobaan² yang mau membikin Undang² Pemilihan yang tidak demokratis dan memperjuangkan undang² pemilihan yang lebih demokratis daripada yang sudah kita punjai sekarang.

Dalam Program PKI juga dikatakan „bahwa perjuangan parlementer s saja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk suatu pemerintah demokrasi Rakjat“. Ini adalah satu kebenaran, karena pekerdjaan PKI bukan pekerdjaan parlementer s saja, tetapi juga dan terutama pekerdjaan² dikalangan massa kaum buruh, kaum tani, inteligensia, dan massa pekerdja serta massa demokratis lainnja. Jadi pada pokoknja, pekerdjaan PKI ialah mengubah imbalan kekuatan antara kaum imperialis, kelas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain dengan jalan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa. Inilah syarat untuk mewujudkan kepertjajaan massa terhadap pimpinan politik kelas buruh yang dipimpin oleh pelopornja, sebagai syarat mutlak untuk peralihan kesistim kekuasaan Rakjat yang demokratis. Selama pimpinan politik ada ditangan burdjuasi atau lebih² jika ditangan tuantanah, adalah tidak pada tempatnja untuk mengatakan adanya peralihan kesistim kekuasaan Rakjat atau Sosialisme, walaupun dalam kekuasaan yang sedang berlaku ada parlemen dan ada didirikan beberapa industri berat disana-sini.

7. Pemerintah koalisi nasional

Dalam rangka program tuntutan sekarang, mengenai bentuk pemerintahan yang diperjuangkan oleh PKI ialah Pemerintah Koalisi Nasional, yaitu pemerintah demokrasi lama yang agak maju. Keadaan sekarang menempatkan Rakjat Indonesia dalam kedudukan sbb. : disatu pihak belum ada syarat untuk membentuk pemerintah Rakjat yang demokratis yang bersedia dengan konsekwen melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, tetapi difihak lain PKI dan seluruh kaum progresif tidak suka jika terbentuk pemerintah yang reaksioner. Oleh karena itulah, dalam keadaan sekarang PKI menjetudjui pembentukan suatu pemerintah demokrasi lama yang agak maju.

Diadjuakannja sembojan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional oleh PKI dalam kampanye pemilihan umum dan waktu

pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 tidak hanya menunjukkan kesediaan kaum Komunis untuk ikut bertanggungjawab terhadap segala keadaan di Indonesia ber-sama² dengan partai² lain, tetapi ia juga menunjukkan kesungguhan kaum Komunis dalam memperjuangkan persatuan nasional.

Diadjukannya slogan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional, artinja pemerintah dimana duduk kaum Komunis, dipandang oleh massa sebagai sesuatu yang tepat dan adil. Pengalaman disekitar pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 menunjukkan bahwa slogan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional sudah diterima oleh massa yang luas, tidak hanya massa kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektual revolusioner, tetapi juga slogan ini sudah diterima oleh sebagian dari pemimpin² partai² tengah. Djika dalam pembentukan pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 kaum Komunis tidak ikut, itu adalah terutama karena politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi dan karena intrig² dari wakil² kaum imperialis yang ada di Indonesia, djadi bukan karena slogan mengenai pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional tidak tepat.

Umum sudah mengetahui, bahwa walaupun PKI tidak ikut dalam kabinet, tetapi karena program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 pada umumnya dapat dikatakan agak maju, maka PKI menjokong pemerintah ini agar ia dapat melaksanakan bagian² yang maju daripada programnya. Ini menunjukkan sifat daripada politik PKI yang mendasarkan diri pada prinsip dan tidak pada soal dapat atau tidaknya kursi dalam pemerintahan.

Mungkin ada yang bertanya, apakah hakekat daripada Pemerintah Koalisi Nasional yang sekarang diperjuangkan oleh PKI? Pemerintah Koalisi Nasional yang sekarang diperjuangkan PKI pada hakekatnya adalah pemerintah demokrasi lama, tetapi dimana semua klas revolusioner, termasuk proletariat yang diwakili oleh PKI, ikut didalamnya. Tetapi, ikutnya satu atau beberapa Komunis dalam pemerintah tidak mengubah watak demokrasi lama daripada pemerintah.

Suatu pemerintah bisa dinamakan pemerintah koalisi nasional djika ia memenuhi dua sjarat: (1) program yang mewakili kepentingan Rakjat dan (2) semua klas revolusioner ikut didalamnya, termasuk proletariat. Djika tidak memenuhi dua sjarat ini maka bukanlah Pemerintah Koalisi Nasional, pemerintah yang mewakili semua klas revolusioner. Pemerintah koalisi nasional ada dua matjam, jaitu demokrasi baru dan demokrasi lama. Yang dituntut oleh PKI berdasarkan program tuntutan sekarang ialah Pemerintah Koalisi Nasional yang bersifat demokrasi lama, dan yang ditudju

PKI berdasarkan Program Umumnya ialah pemerintah koalisi nasional yang berdasarkan demokrasi baru.

Mungkin ada orang yang bertanya: bagaimana sikap PKI selanjutnya terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, yang bukan pemerintah koalisi nasional, karena didalamnya tidak duduk PKI sebagai wakil proletariat, sebaliknya elemen² kepalabatu duduk didalamnya? Sebagaimana sudah dikatakan diatas, PKI dapat menjokong program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, tetapi PKI tidak yakin bahwa komposisi kabinet akan dapat melaksanakan programnya dengan sungguh². Oleh karena itu, sikap PKI menjokong kabinet Ali Sastroamidjojo disertai dengan kewaspadaan yang setinggi²nya terhadap kemungkinan² sabotase² dari orang² yang berkepalabatu yang duduk dalam pemerintah.

Tidak duduknya PKI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo mempunyai dua arti. Pertama, Masjumi berhasil menjegah terbentuknya persatuan nasional yang lebih kuat dengan tidak bulatnja persatuan itu ditjerminkan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2. Kedua, tidak ikutnja PKI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo berarti, bahwa PKI hanya bertanggungjawab terhadap Rakjat mengenai tindakan² yang maju daripada pemerintah, karena PKI hanya menjokong programnya yang maju. Sedangkan mengenai tindakan² pemerintah yang merugikan Rakjat, PKI tidak mungkin dipersalahkan karena PKI tidak duduk dalam pemerintah dan PKI tidak menjokong duduknja orang² berkepalabatu dalam kabinet.

Bagaimana selanjutnya, apakah PKI akan terus menuntut pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional? Ja, pada krisis² kabinet, PKI akan menuntut terbentuknya Pemerintah Koalisi Nasional, karena ini adalah sebagian daripada perjuangan PKI untuk memperkuat persatuan nasional dan menunjukkan kesediaan PKI untuk ikut bertanggungjawab terhadap semua keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia.

Tetapi, tentang ikut atau tidak ikutnja PKI tergantung kepada dua soal: Pertama, Program yang mewakili kepentingan Rakjat; kedua, komposisi kabinet yang sanggup mendjamin pelaksanaan program. Walau diadjak sekalipun, PKI pasti tidak akan mau ikut dalam kabinet yang programnya merugikan Rakjat, dan djuga belum tentu akan ikut dalam kabinet yang meskipun programnya maju tetapi komposisinya tidak mendjamin pelaksanaan daripada programnya.

Dalam hal tidak ikut dalam kabinet, sikap PKI ada dua matjam. Pertama, PKI menjokong dengan sjarat² djika programnya maju, tetapi komposisinya tidak meyakinkan akan dapat melaksanakan program: kedua, ialah beroposisi, djika programnya reaksioner

atau sangat tidak memenuhi tuntutan² politik dan ekonomi jang paling minimum pada waktu jang tertentu.

8. Masaalah sukubangsa dan minoritet keturunan asing

Indonesia adalah negara kesatuan, disamping terdiri dari banyak pulau djuga terdiri dari banyak sukubangsa, ada sukubangsa jang besar dan banyak jang ketjil, mulai dari jang puluhan djuta sampai jang hanja beberapa ribu orang. Masaalah sukubangsa² ini harus mendapat pemetjahan. Pemetjahan masaalah ini hanja mungkin djika memakai politik haksama bagi semua sukubangsa, tidak perduli sukubangsa besar atau ketjil.

Pelaksanaan daripada politik haksama bagi semua sukubangsa adalah politik hak otonomi bagi sukubangsa² dibawah pemerintah pusat jang bersifat kesatuan. Hak otonomi berarti hak mengurus soal² sendiri bagi sukubangsa², misalnja berhak mengurus soal² politik dan ekonomi dalam lingkungan sukubangsa masing², berhak memakai bahasa masing² disamping bahasa Indonesia dan berhak mengembangkan kebudajaan masing². Politik otonomi sukubangsa inilah satu²nja politik jang dapat memetjahkan masaalah sukubangsa².

Kenyataan sekarang menundjukkan, bahwa soal otonomi jang sekarang banyak dibitjarakan bukanlah otonomi jang berdasarkan sukubangsa, akan tetapi berdasarkan daerah administratif dan disebut „otonomi daerah”. Pembagian administratif pemerintahan sekarang pada pokoknja masih meneruskan pembagian administratif zaman kolonial dahulu. Dalam rangka program tuntutan² sekarang, PKI dapat menjetudjui „otonomi daerah”, djadi belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah² itu diadakan pemilihan DPRD² setjara demokratis, dan dibentuk DPD² berdasarkan perwakilan berimbang. Tetapi ini adalah pemetjahan sementara selama belum dapat dibentuk otonomi² berdasarkan sukubangsa.

Djadi, kita tidak boleh berhenti sampai pada „otonomi daerah” sadja. Bersamaan dengan menerima „otonomi daerah”, kita harus menjelidiki dan menjimpulkan persoalan² sukubangsa², misalnja soal batas² daerah dimana sesuatu sukubangsa hidup, soal kesatuan bahasa dan kebudajaan daripada tiap² sukubangsa dsb. Berdasarkan hasil² penjelidikan dan kesimpulan ini ber-angsur² kita mendirikan otonomi² berdasarkan sukubangsa², sesuai dengan keinginan sukubangsa² dan sesuai dengan kepentingan seluruh bangsa.

Dalam memetjahkan masaalah sukubangsa kita harus mentjegah timbulnja perasaan tinggihati pada sukubangsa jang besar, kita harus mentjegah sukubangsa-besar-isme. Djuga kita harus mentjegah sukubangsa jang besar dan jang sudah lebih maju memandang

rendah sukubangsa² lainnja dan memaksakan keinginannja sekalipun mungkin dengan maksud untuk memadjukan sukubangsa² lainnja itu. Pendeknja, tiap² sukubangsa harus maju dengan tiada paksaan dari sukubangsa lain. Sukubangsa jang sudah maju harus mempunyai perasaan berkewadajiban membantu sukubangsa² lain, tetapi pelaksanaan daripada kewadajiban ini tidak boleh dengan memaksa. Sukubangsa jang besar harus menghormati sukubangsa² jang ketjil. Djikalau ada kekurangan² didalam pekerdjaan mengatur negeri maka jang per-tama² harus mengadakan selfkritik jalah sukubangsa jang besar dan sudah maju.

Dikalangan sukubangsa² ketjil kita harus mentjegah timbulnja sukubangsa-isme jang sempit, jang sifatnja tidak mau menerima segala sesuatu dari sukubangsa lain. Sukubangsa-isme sempit membikin lambat kemandjuaan sukubangsa itu sendiri. Disamping itu sukubangsa-isme sempit mudah digunakan oleh kaum imperialis untuk mengadu-domba antara sukubangsa² dan untuk memetjahbelah persatuan Rakjat Indonesia. Ini berarti memetjahbelah dan sangat memperlemah kedudukan Republik Indonesia jang bersifat kesatuan. Djuga perasaan merasa ketjil-diri harus ditjegah dikalangan sukubangsa² tersebut, karena perasaan ini djuga merupakan perintang bagi kemandjuaan sukubangsa² jang bersangkutan.

Disamping masaalah sukubangsa² ada lagi masaalah lain jang hampir sama persoalannja, jaitu masaalah minoritet keturunan asing, misalnja keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa. Golongan minoritet ini berbeda dengan sukubangsa², karena minoritet keturunan asing ini walaupun mempunyai bahasa dan kebudajaan sendiri, tetapi tidak mempunyai daerah tempattinggal jang tertentu. Oleh karena itu pemetjahan masaalah minoritet keturunan asing lebih sukar. Tetapi ini tidak berarti bahwa soal ini tidak bisa dipe-tjahkan. Pemetjahan soal ini djuga hanja bisa dengan politik haksama, jaitu haksama bagi semua warganegara. Djadi soalnja jalah, dengan konsekwen mendjalankan apa jang tertjantum dalam UUD tentang haksama bagi semua warganegara.

Berhubung dengan pemetjahan masaalah minoritet keturunan asing, disatu fihak harus ditjegah timbulnja nasionalisme sempit dikalangan majoritet warganegara „bumiputera”. Jang terachir ini harus menghormati minoritet warganegara keturunan asing. Difi-hak lain harus dihilangkan rasa superior (tinggi hati) digolongan atas daripada minoritet keturunan asing jang dizaman pendjadjahan memang dipupuk oleh kaum peridjadjah untuk dapat diadudomba dengan majoritet „bumiputera”. Pendidikan patriotisme Indonesia, pendidikan tjinta tanahair dan tjinta Rakjat Indonesia, harus diperdalam dan diperluas dikalangan minoritet keturunan asing.

Ini tidak berarti bahwa pendidikan patriotisme Indonesia dikalangan warganegara „bumiputera” sudah tidak diperlukan.

9. Masaalah kebudayaan, pendidikan dan inteligensia.

Masaalah kebudayaan harus kita kupas dengan pisau yang bermata dua. Disatu pihak sasaran kita ialah fikiran yang mau menolak semua yang datang dari luar dan difihak lain sasaran kita fikiran yang tidak menghargai kebudayaan kuno kita sendiri. Kita memang harus menolak kebudayaan reaksioner yang datang dari luarnegeri, karena kebudayaan ini tidak ilmiah dan meratjuni fikiran Rakjat. Tetapi, kebudayaan dari luar yang progresif, yang ilmiah dan kerakjatan harus kita terima se-banyak²nja untuk memajukan kebudayaan kita sendiri. Dalam menerima kebudayaan asing kita tidak mendjiplak, tetapi mengolah dan menjesuaikannja dengan kebutuhan Rakjat Indonesia. Kebudayaan kuno kita yang progresif, yang ilmiah dan yang kerakjatan harus terus kita kembangkan, tetapi yang reaksioner, yang tidak ilmiah dan tidak kerakjatan, tidak seharusnya kita pupuk dan kita kembangkan. Dalam menerima kebudayaan asing dan dalam mengembangkan kebudayaan kuno kita harus kritis. Kita harus mengambil dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan Rakjat dan harus menolak dan tidak melanjutkan yang bertentangan dengan kebutuhan Rakjat. Tundjuan kita ialah untuk mentjiptakan kebudayaan Rakjat Indonesia Baru.

Untuk mentjiptakan kebudayaan Rakjat Indonesia baru kita banyak membutuhkan pendidik² dan guru² yang bersemangat kerakjatan. Kita membutuhkan banyak sardjana, teknikus, insinjur, dokter, ahli², wartawan, sastrawan, penulis, dalang dan seniman² Rakjat serta pekerdja² kebudayaan Rakjat lainnja. Permintaan PKI kepada semua pekerdja kebudayaan ialah supaya mereka dengan setia mentjintai tanahair dan Rakjat. Permintaan PKI kepada Rakjat dan pemerintah ialah supaya menghargai pekerdja² kebudayaan kita dan menghargai djasa² mereka. Mereka adalah kekajaan Rakjat yang berharga. Indonesia baru yang merdeka, bersatu, demokratis, maju dan makmur tidak mungkin ditjapai dengan tiada pekerdja² kebudayaan yang bersemangat kerakjatan, sebaliknya pekerdja² kebudayaan tidak mungkin berkembang dan mekar djika tidak ada Indonesia baru, dimana Rakjat adalah satu²nja sumber kekuasaan.

Sedjarah perdjuaan Rakjat Indonesia membuktikan bahwa semang kerakjatan terdapat tjukup besar dikalangan kaum intelektual dan paraseniman Indonesia, ini misalnja dibuktikan oleh sedjarah perguruan nasional „Taman Siswa” dan „Perguruan Rakjat”. Pamong² daripada perguruan² ini, yang disamping kaum inte-

lektuil djuga terdiri dari seniman², tidak hanya menundjukkan bahwa mereka mempunyai semangat kerakjatan yang kuat, tetapi djuga berani hidup menderita untuk mendidik anak² Rakjat dan untuk memperdjuangkan tjita² Rakjat.

Salahsatu pekerdjaan yang terpenting dalam meninggikan tingkat kebudayaan Rakjat ialah pekerdjaan memberantas butahuruf dikalangan Rakjat yang masih ber-puluh² djuta djumlahnja dan mengadakan wadajib-beladjar yang tjuma² sampai tamat Sekolah Rakjat.

IV

Persatuan Dalam Partai Adalah Sjarat Mutlak Untuk Melaksanakan Tugas2 Partai

Kawan-kawan,

Dalam bagian pendahuluan laporan ini dikatakan, bahwa selama hampir satu tahun sedjak sidang pleno Central Comite ke-III, Partai kita sudah melakukan banyak pekerdjaan dan sudah dapat mengatasi banyak kesukaran, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini masih banyak pekerdjaan yang harus dilakukan oleh Partai kita dan masih banyak kesukaran yang harus diatasi.

Selama masa tersebut diatas kita sudah mentjapai hasil² dalam melaksanakan tugas² yang ditetapkan dalam sidang pleno Central Comite ke-III, jaitu tugas memenangkan Partai dan front persatuan dalam pemilihan umum dan tugas mengembangkan kritik dari bawah serta meninggikan tingkat ideologi daripada Partai. Sukses² yang sudah kita tjapai ini harus kita anggap sebagai pangkalan dari mana kita bertolak untuk menudju sukses² baru. Sukses² yang sudah ditjapai harus kita kembangkan setjara maksimal.

Partai kita sekarang menghadapi pekerdjaan yang tidak kalah beratnja daripada yang sudah kita kerdjakan. Kita harus terus memperbaiki pekerdjaan kita dikalangan kaum tani, menjempurnakan pekerdjaan dikalangan kaum buruh, bekerdja lebih sungguh² dikalangan pemuda, wanita, inteligensia dan massa pekerdja lainnja. Kita harus bekerdja lebih baik didalam Parlemen dan harus lebih pandai mengkoordinasi pekerdjaan² parlementer dengan pekerdjaan² diluar Parlemen. Kita harus berdjuaan keras untuk memenangkan Partai dan kekuatan² demokratis lainnja dalam pemilihan untuk DPRD², kita harus memenangkan konsep kenegaraan daripada Revolusi Agustus 1945 dalam sidang² Dewan Konstituante yang akan datang. Diatas se-gala²nja kita harus terus memperkuat persatuan nasional dan mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Walaupun berdasarkan hasil² pemilihan Dewan Konstituante kekuatan² yang menentang konsep kenegaraan Revolusi Agustus sudah gagal, tetapi bukanlah sudah hilang samasekali kemungkinan bagi kaum reaksioner untuk menentang sifat² demokratis dan kerakjatan daripada Undang² Dasar Republik Indonesia yang akan dibikin oleh Dewan Konstituante nanti. Untuk memenangkan didalam Dewan Konstituante nanti konsep Undang² Dasar yang demokratis dan kerakjatan, sesuai dengan semangat dan tudjuan Revolusi Agustus, Partai kita harus bekerdja lebih keras. „Panitia PKI Perantjang Konstitusi Republik Indonesia” yang dibentuk dalam Sidang Pleno Central Comite ke-II sudah bekerdja dan sebagian dari hasil pekerdjaannya, yang berupa pokok² fikiran mengenai Undang² Dasar Republik Indonesia, sudah dapat kita gunakan sebagai bahan kampanye untuk pemilihan Konstituante yang lalu. Tetapi masih banyak yang harus dikerdjakan oleh Panitia ini dalam membantu Central Comite dan seluruh Partai kita untuk memenangkan konsep kenegaraan Revolusi Agustus.

Sesudah mengadakan perdjuaan yang berat dan sengit untuk memenangkan Partai dalam dua pemilihan umum yang lalu dan untuk mengatasi berbagai kesukaran, maka kewadajiban kita yang terpenting sekarang ialah memeriksa kembali barisan Partai, men-tjari dan menemukan kelemahan² Partai agar dapat melikwidasi kelemahan² itu dan dapat memperbaiki serta memperkokoh Partai.

Partai kita sekarang sudah menjadi Partai Komunis yang besar yang mempunyai anggota dan tjalon-anggota lebih dari satu djuta. Tidak banyak Partai Komunis yang besar didunia, dan didalam djumlah yang tidak banyak itu termasuk PKI. Seharusnya tiap² Komunis Indonesia merasa bangga dan merasa mendapat kehormatan menjadi salahseorang anggota PKI yang besar, Partai yang sedjak berdirinja selalu berdiri digaris paling depan dalam per-djuaan yang adil dari bangsa dan Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional, dalam membela kepentingan sehari-hari daripada klas buruh dan seluruh Rakjat pekerdja, dalam menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tinggi dan tradisi yang revolusioner dari Rakjat Indonesia yang djaja. Kemenangan PKI dalam pemilihan² umum yang lalu telah mengubah pandangan orang terhadap Partai kita. Sekarang sikap Partai kita mengenai tiap soal diharapkan orang dan diperhatikan orang, sedangkan orang² yang progresif mengharapakan tuntunan lebih banyak dari Partai kita. Oleh karena itu, menjadi anggota Partai Komunis yang besar harus diartikan bertambah besarnya tanggungjawab terhadap bangsa dan Rakjat, bertambah banyaknya pekerdjaan dalam membela kepentingan se-hari² daripada Rakjat, bertambah besarnya

keberanian, kewaspadaan, ketabahan, kebidjaksanaan dan keulet-an yang harus dimiliki.

Sesudah kita mendjalankan rentjana² peluasan keanggotaan dan organisasi Partai, sehingga Partai kita sekarang menjadi Partai yang besar, maka pekerdjaan dilapangan organisasi yang sangat mendesak sekarang ini ialah mengkonsolidasi hasil² rentjana peluasan itu. Kita harus bisa mengorganisasi dan mendidik anggota² Partai kita yang sudah berdjumlah lebih dari 1 djuta itu. Untuk ini pembagian tiap anggota dalam grup dan menghidupkan grup itu menjadi sjarat mutlak. Para tjalon-anggota yang sudah melalui masa-tjalonnya dengan baik, harus ditingkatkan menjadi anggota.

Untuk dapat mengorganisasi djumlah anggota yang sudah banyak itu, dan untuk bisa lebih memenuhi tugas memimpin perdjuaan Rakjat, maka Comite² Partai dengan segala Bagian²nya harus lebih diaktifkan dan diperteguh lagi. Untuk ini Konferensi² dan rapat² anggota untuk memilih anggota² Comite dan Kepala Grup harus ditepati sesuai dengan Konstitusi Partai dan harus dipergunakan dengan se-baik²nya. Dengan menepati ketentuan² dalam Konstitusi Partai mengenai Konferensi² dan rapat² periodik dari Comite dan dari grup, maka hal ini sekaligus berarti mengembangkan demokrasi intern Partai dengan lebih baik lagi.

Sebagai sjarat untuk melaksanakan pekerdjaan Partai yang semakin luas dan besar ini, maka masalah keuangan menjadi masalah yang lebih penting lagi. Untuk ini pengumpulan uang iuran harus dikerdjakan dengan lebih rapi lagi, begitu djuga usaha memperluas donasi dan usaha² yang produktif.

Sebagaimana sudah disimpulkan dan ditetapkan dalam Kongres Nasional ke-V tugas² urgen yang pokok daripada Partai sekarang ialah tugas menggalang front persatuan nasional disamping tugas meneruskan pembangunan Partai, dua tugas yang satu dengan lainnya tidak bisa di-pisah²kan. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa Partai kita bersatu fikiran mengenai front persatuan nasional dan meletakkan titik berat pendidikan didalam Partai mengenai soal ini. Satunja fikiran kita mengenai front persatuan nasional akan sangat membantu dalam meneruskan pekerdjaan membangun Partai. Perlunya pendidikan tentang front persatuan nasional lebih dirasakan lagi karena masih ada anggota Partai, berhubungan dengan berbagai sebab, tidak menjetudjuai atau kurang me-jakini benarnya politik front persatuan. Ini misalnja dibuktikan oleh siaran kawan Alimin tertanggal 25 Maret 1956, siaran yang sudah dijawab dan dikritik oleh Sekretariat Central Comite tertanggal 3 Djuli 1956. Tetapi bukanlah karena ada siaran kawan Alimin ini maka kita perlu menitikberatkan pendidikan dalam Partai menge-

nai front persatuan. Ada atau tidak ada siaran kawan Alimin, pendidikan didalam Partai harus dititikberatkan pada front persatuan, karena kemenangan Rakjat Indonesia adalah tergantung pada berhasilnya penggalangan front persatuan. Tidak ada front persatuan berarti tidak ada kemenangan bagi Rakjat Indonesia. Maka itu kita harus setia pada politik front persatuan nasional yang harus kita lakukan setjara aktif, dengan kesupelan yang maximal dan dengan sopansantun.

Tetapi Partai kita tidak hanya harus bersatu mengenai front persatuan. Partai kita juga harus bersatu dalam soal² lain. Persatuan didalam Partai hanya mungkin jika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, yaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya jika ada persatuan fikiran dari orang² Komunis, barulah ada persatuan jg. sungguh² didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi² Rakjat yang dipimpin oleh Partai Komunis.

Persatuan dalam fikiran tidak djatuh dari langit atau tumbuh dari bumi. Tiap² Komunis ketika ia disahkan menjadi anggota PKI memang sudah menerima Konstitusi dan Program Partai, berarti menerima pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa mereka berasal dari ber-matjam² klas, bahwa lingkungan keluarga mereka sekarang juga ber-matjam² dan bahwa tingkat kebudajaannya serta pengalaman revolusionernya ber-beda². Maka tidak heran, bahwa masih terdapat dan terus akan terdapat ber-matjam² fikiran dikalangan kaum Komunis. Djadi, soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Oleh karena itulah dalam sidang ini pada tempatnya kita mendiskusikan dan memutuskan soal² pokok mengenai pendidikan bagi seluruh anggota Partai, misalnja yang mengenai tingkat² dan bentuk² pendidikan yang harus diadakan berhubung dengan tidak samanja tingkat kebudayaan dan pengalaman revolusioner anggota² Partai, berhubung dengan isi daripada pendidikan dan berhubung dengan soal menghubungkan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia. Berdasarkan pengalaman² kita mengenai pendidikan dalam Partai dimasa yang lalu dan berdasarkan kemungkinan² yang ada kita membikin rentjana pendidikan kita.

Dalam rentjana pendidikan kita harus dimasukkan soal pendidikan untuk tjalon-anggota² yang masih butahuruf, soal mendirikan Sekolah² Politik untuk tjalon-anggota² dan anggota² baru yang diselenggarakan oleh Komite² Resort, soal mendirikan Sekolah² Partai yang diselenggarakan oleh Central Komite dan Komite² Daerah Besar, soal mendirikan Kursus² Partai yang diselengga-

rakan oleh Komite² Seksi dan Subseksi. Demikian juga soal Konferensi² teori dan seminar², soal pendidikan untuk kader² tinggi dan soal mempeladjar tulisan² klasik Marxisme-Leninisme.

Central Komite mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan Sekolah Partai dan Komite² bawahan mempunyai pengalaman tentang menyelenggarakan Kursus² Partai. Pengalaman² ini harus disimpulkan dan digunakan untuk memperbaiki pendidikan dalam Partai selanjutnya.

Salahsatu pengalaman dalam menyelenggarakan Sekolah² dan Kursus² Partai ialah bahwa matapelajaran terlalu banjak dan bahwa pendidikan tidak digabungkan dengan tugas² kongkrit daripada Partai. Akibatnya ialah, bahwa kader² yang tamat Sekolah atau Kursus Partai tidak tahu menggunakan pengetahuan yang sudah mereka terima dalam pekerjaan mereka sehari². Oleh karena itu, di-waktu² yang akan datang mata pelajaran untuk Sekolah dan Kursus Partai supaya dibatasi pada yang sangat perlu dan supaya dihubungkan dengan tugas² kongkrit daripada Partai, misalnja mata pelajaran tentang sedjarah perkembangan masyarakat, tentang soal² pokok revolusi Indonesia, tentang pembangunan Partai dan tentang front persatuan nasional. Mengenai soal² lain yang dianggap perlu bisa diadakan dalam bentuk tjeramah.

Pengalaman yang lain dalam menyelenggarakan Sekolah² dan Kursus² Partai ialah, bahwa parapendidik atau propagandis kita tidak memberikan semangat Komunis dan pandangandunia Komunis kepada parasiswa. Dalam klas sering terdapat semangat anak sekolah atau semangat murid, bukan semangat pedjuang revolusioner. Hal ini harus diatasi ! Sekolah² dan Kursus² Partai kita bukan mendidik anak² sekolah atau murid², tetapi mendidik pedjuang² revolusioner. Yang terpenting bukannya mengadjarkan huruf dan teks yang bisa dilupakan, tetapi memberikan semangat dan pandangandunia Komunis yang tidak bisa dilupakan. Pendidikan harus membikin anggota² Partai dalam keadaan bagaimanapun tetap yakin, bahwa djalan revolusioner yang sudah dipilihnya adalah djalan yang se-tepat²nja, djalan hidup baru untuk masyarakat baru.

Ada kalanja situasi politik berkembang dengan sangat tjepat di-negeri kita. Dalam keadaan demikian pendidikan tentang situasi kepada seluruh anggota dan tjalon-anggota Partai adalah sangat penting. Bahan untuk pendidikan situasi ialah harian² Partai, resolusi² serta dokumen² lainnya daripada Partai. Hanya dengan adanya pendidikan tentang situasi anggota² Partai bisa mengetahui situasi setjara tepat, dan hanya jika mereka mengetahui situasi setjara tepat mereka bisa memberikan pimpinan kepada massa setjara tepat pula. Tjeramah tentang situasi harus mendapat tempat

jang khusus didalam Sekolah² dan Kursus² Partai. Tetapi, pendidikan tentang situasi sadja tentu tidak tjukup, ia harus dihubungkan dengan program umum Partai, karena hanja dengan mengerti program umum Partai tiap² anggota bisa mengetahui dalam tingkat revolusi bagaimana ia berada dan kemana revolusi menudju.

Djadi djelaslah, bahwa kita harus dengan rapat menggabungkan pendidikan Partai dengan tugas Partai dalam masa jang tertentu. Pendidikan dalam Partai harus dipandang sebagai persiapan ideologis dan sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan² ideologis agar tugas Partai dapat dilaksanakan dengan baik. Tjara beladjar harus dihubungkan dengan praktek, harus dengan konsekwen menentang dogmatisme, karena hanja dengan demikian tiap² anggota tahu tingkat revolusi dan kemana revolusi menudju.

Mengenai isi peladjaran adalah tidak sama berhubungan dengan keadaan² kongkrit jang berbeda, tetapi hakekatnja adalah tetap, jaitu pendidikan tentang prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme, dan pendidikan mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan sematjam ini harus dilakukan dengan mengadakan perlawanan terhadap segala matjam ideologi jang tidak sah, misalnja menentang ketjenderungan kekiri dan kekanan dalam front persatuan, menentang ilusi bahwa dengan perjuangan parlementer sadja tuntutan² revolusi nasional dan demokratis dapat dilaksanakan sampai ke-akar²nja, menentang ideologi tuantanah dan burdjuis dikalangan anggota² Partai. Semuanya ini dinamakan melaksanakan pendidikan Marxisme-Leninisme dan melaksanakan pendidikan tentang pendirian, pandangan dan metode klas buruh dengan melalui perjuangan.

Pendidikan harus kita mulai dengan mendidik kader² tinggi daripada Partai karena mereka adalah tulang punggung dalam melaksanakan tugas² Partai. Dengan tiada tulang punggung jang terdiri dari kader² tinggi Partai jang menguasai prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme, jang mempunyai pendirian, pandangan serta metode klas jang tepat tidak mungkin kita melawan ideologi² jang tidak sah didalam Partai, tidak mungkin kita mendidik seluruh anggota Partai dan tidak mungkin ada kesatuan dalam Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Disinilah pentingnya Sekolah² Partai jang diselenggarakan oleh Central Komite dan oleh Komite² Daerah Besar.

Pada waktu² jang tertentu didalam Partai harus diadakan gerakan pembetulan untuk mengatasi fikiran² burdjuis ketjil jang berkedok Marxisme-Leninisme, fikiran² subjektivisme dan sektarisme. Gerakan demikian ini harus diikuti oleh seluruh anggota Partai. Sekarang gerakan demikian itu sedang kita lakukan dengan

mempeladjar „Keterangan 3 Djuli 1956“, jaitu keterangan jang dikeluarkan Sekretariat Central Komite berhubungan dengan siaran kawan Alimin tanggal 25 Maret 1956. Dari gerakan mempeladjar „Keterangan 3 Djuli 1956“ anggota² Partai dapat menarik pelajaran betapa berbahajanja djika seseorang anggota Partai terlepas samasekali dari kehidupan praktis daripada massa dan djika seorang anggota Partai sudah mendjadi sangat ambisius jang didorong oleh individualisme jang ber-lebih²an. Djuga dari gerakan ini dapat ditarik pelajaran bagaimana seharusnya anggota Partai mengkritik politik dan pimpinan Partai, pelajaran tentang bahajanja oportuniste kiri dalam penggalangan front persatuan dan pelajaran tentang tjara menghadapi anggota Partai jang membikin kesalahan. Diwaktu jang lain, sesuai dengan kebutuhan Partai, kita harus mengadakan gerakan pembetulan jang lain.

Dalam hubungan dengan bahaja terlepasnja kehidupan Partai daripada massa, waktu sekarang perlu diperingatkan adanja tanda² dikalangan fungsionaris² Partai jang hendak memisahkan pekerdjaan Partai dengan pekerdjaan massa, se-olah² fungsionaris Partai hanja bertanggungjawab mengenai pekerdjaan jang „se-mata² pekerdjaan Partai“, sedangkan pekerdjaan massa dianggap hanja pekerdjaan daripada kawan² jang memimpin organisasi² massa. Sebaliknya perlu djuga diperingatkan tentang adanja tanda² dikalangan kader² Partai jang bekerdja memimpin organisasi massa, se-olah² pekerdjaan mereka bisa pisah dari pekerdjaan dan garis politik umum daripada Partai.

Untuk melaksanakan garis politik umum daripada Partai dikalangan massa, maka kader² Partai jang bekerdja didalam organisasi massa harus sungguh² berusaha untuk menguasai persoalan² massa dan untuk memimpin massa. Memang tidak bisa ditjampuradukkan antara pekerdjaan organisasi Partai dengan pekerdjaan organisasi massa, tetapi tiap² soal massa adalah soal kaum Komunis, djadi tidak ada apa jang dinamakan „se-mata² pekerdjaan Partai“. Fungsionaris² Partai, sebagaimana djuga semua anggota Partai harus mau dan harus bisa memetjahkan semua masalah massa jang dibawah pimpinannja.

Gedjala jang mau memisahkan pekerdjaan Partai dari massa dan jang mau memisahkan pekerdjaan massa dari Partai harus segera dibasmi dengan djalan mengadakan kritik dan selfkritik tentang soal ini dalam Komite² jang bersangkutan.

Soal lain jang perlu ditjanangkan disini ialah tentang adanja gedjala kekendoran ideologi dikalangan beberapa kader Partai dalam bentuk keinginan memetik hasil perjuangan Partai dan Rakjat untuk kepentingan sendiri. Mereka mengira, bahwa dalam keadaan

an jang relatif damai seperti sekarang ini orang² Komunis boleh mem-bagi² hasil perdjuaan Partai dan Rakjat untuk kepentingan sendiri. Sebagai satu tjontoh, misalnja, adanja kurang pengertian jang bertjampur dengan perasaan irihati atau tidak senang dari sebagian kader² Partai mengenai pentjalonan dalam pemilihan Parlemen dan Konstituante, dimana nama mereka tidak ditjantumkan. Karena pengertian dan perasaan jang tidak tepat ini sampai ada jang me-nusuk² anggota² Partai lainnja supaja membentji pimpinan Partai jang mereka katakan „tidak adil“. Pada pokoknja, mereka lupa bahwa mereka adalah anggota Partai klas buruh, mereka lupa bahwa klas buruh adalah berbeda dengan produsen ketjil jang berdasarkan kerdja individuil. Mereka lupa bahwa klas buruh tidak mempunjai alat produksi jang dimiliki perseorangan, bahwa klas buruh bekerdja setjara terpusat didalam pabrik², bahwa klas buruh bekerdjasama dan mengadakan pembagian pekerdjaan dengan mempunjai tanggungjawab perseorangan menurut bagian pekerdjaannja masing², menggunakan mesin² dan mendjalankan produksi setjara kolektif. Dalam produksi besar²an terpeliharalah kebiasaan kaum buruh untuk bersatu, saling membantu, berorganisasi dan berdisiplin. Sebagai anggota Partai klas buruh, tiap² Komunis harus memiliki sifat² klas buruh, jaitu sifat jang tidak mementingkan diri sendiri, mengakui harus adanja pimpinan jang memusat, mengakui perlunja ada kerdja kolektif dan pembagian pekerdjaan, perlunja hidup berorganisasi dan berdisiplin. Pendeknja, tiap² Komunis harus berpandangan djauh, mempunjai semangat tidak mementingkan diri sendiri dan hanja mementingkan kepentingan umum, dan menuntut pelaksanaan masjarakat Komunis. Kepada kawan² jg. waktu² belakangan ini mengalami kekendoran ideologi kita mengharap supaja mereka ingat kembali, bahwa mereka adalah anggota Partai klas buruh. Hal ini lebih penting lagi diingatkan karena di-waktu² dekat jang akan datang Partai kita akan mengisi tempat² didalam DPRD², DPD² dan kedudukan² lainnja. Sudah tentu dimasa datang jang djauh ingat akan hal ini adalah lebih penting lagi.

Dalam hubungan dengan pendidikan dalam Partai adalah sangat penting bagi kita untuk memahami kesimpulan Kongres ke-XX PKSU mengenai penentangan terhadap pemudjaan perseorangan. Memang ada perbedaan jang penting mengenai akibat pemudjaan perseorangan didalam Partai jang sudah memegang kekuasaan negara dan jang belum. Di-negeri² dimana Partai sudah memegang kekuasaan negara, sudah menguasai alat² keamanan dan alat² negara lainnja, maka kekuasaan seseorang dengan mudah berakibat perbuatan se-wenang² jang luas terhadap kader² Partai dan terha-

dap kader² negara. Tentu tidak demikian halnja dengan Partai Komunis jang belum memegang kekuasaan negara, tetapi ini tidak berarti bahwa pemudjaan perseorangan tidak merupakan bahaya buat Partai Komunis jang belum memegang kekuasaan negara.

Dinegeri kita, berhubung masih kuatnja sisa² feodalisme dan masih luasnja produksi ketjil²an perseorangan, pemudjaan perseorangan mempunjai tanah jang subur, baik jang datangnya dari massa jang ingin memudja maupun dari tokoh² jang ingin dipudja. Djika pemudjaan perseorangan terdapat didalam Partai kita, maka ia akan sangat menghambat perkembangan Partai dan perkembangan gerakan Rakjat, ia akan menimbulkan birokrasi didalam Partai, ia akan menimbulkan kese-wenang²an dan akan menekan dajatjipta anggota² Partai dan massa.

Oleh karena itu, beladjar dari Partai Komunis Sovjet Uni, dalam hubungan pendidikan dalam Partai supaja kita tidak djemu²nja menekankan bahwa Partai kita harus senantiasa setia pada prinsip sentralisme-demokratis, pada prinsip pemaduan pimpinan kolektif dengan tanggungjawab perseorangan, bahwa Partai kita harus senantiasa mendasarkan diri pada kesedaran dan ketjerdasan massa Rakjat. Sentralisme adalah penting supaja Partai dan gerakan Rakjat dipimpin dengan baik, tetapi sentralisme tanpa demokrasi bisa berarti kese-wenang²an beberapa orang atau seseorang, bisa berarti menekan dajatjipta daripada massa. Demokrasi adalah penting supaja anggota² Partai dan Rakjat aktif memperbintjangkan persoalannja sendiri, supaja dajatjipta daripada massa bisa berkembang, tetapi demokrasi tanpa sentralisme, tanpa pimpinan jang memusat, bisa menimbulkan liberalisme, bisa menimbulkan kekacauan dalam Partai dan didalam gerakan Rakjat. Djadi djelaslah, bahwa sentralisme-demokratis samasekali tidak menjangkal adanja pimpinan, tidak menjangkal adanja peranan perseorangan dan peranan pemimpin jang tunduk kepada kemauan kolektif. Tunduk kepada kemauan kolektif berarti mengorbankan kepentingan perseorangan djika kepentingan perseorangan ini bertentangan dengan kepentingan kolektif.

Bentuk pimpinan jang tertinggi dalam Partai Komunis ialah pimpinan kolektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti melanggar sentralisme-demokratis, dan ideologi, berarti meninggalkan kehidupan praktis, dan akibatnja menimbulkan fikiran-fikiran dan perbuatan-perbuatan jang subjektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti melanggar sentralisme-demokratis. Partai kita dimasa jang lampau telah mengalami banjak kerusakan-kerusakan dan telah mendjalankan berbagai kesalahan jang besar sebagai akibat dari ketidaksetiaan kepada prinsip sentralisme-demokratis

dan kepada pimpinan kolektif. Dimasa datang akan terdjadi lagi hal demikian djika kita tidak setia kepada dasar sentralisme-demokratis dan pimpinan kolektif. Dalam hubungan dengan tjarakerdja kolektif saja anggap penting untuk mengingatkan seluruh Partai kita pada sebuah kesimpulan jang kita ambil didalam sidang pleno Central Comite ke-III jang bunjinja sbb :

„Dalam sidang pleno Central Comite ke-II kita menekankan tentang pentingja tjarakerdja kolektif. Pengalaman kita menunjukkan bahwa tjarakerdja kolektif baru besar artinja djika disertai oleh diskusi² jang kritis. Sjarat untuk dari baik mendjadi lebih baik, sebagai sudah dikatakan diatas, ialah mengamalkan kritik dan selfkritik. Untuk perkembangan Partai daripada klas buruh dan untuk perkembangan gerakan Rakjat, kritik adalah satu keharusan. Kita harus mengutjapkan 'selamat datang' pada tiap² kritik. Oleh karena itu kita harus mendjalankan saling kritik. Ini tidak hanya bukti bahwa kita kuat, tetapi djuga bukti bahwa kita ingin mendjadi lebih kuat, karena oleh kritik kita mendjadi lebih mampu untuk bekerdja dan berdjua. Dengan mengamalkan kritik dan selfkritik didalam Partai kepertjajaan Rakjat kepada kita akan mendjadi lebih besar, karena mengetahui bahwa dalam pimpinan Partai duduk orang² jang mempunjai kesungguhan, jang dengan sungguh² mempeladjarai semua persoalan dan mentjarikan pemetjahannja dilihat dari sudut keharusan dan kewadjiban jang dihadapi oleh seluruh Rakjat”.

Dalam sidang pleno kali ini baik diingatkan, bahwa sampai sekarang masih ada Comite² dan fraksi² Partai jang menganggap bahwa satu²nja sasaran kritik dan selfkritik ialah sifat² dan tingkahlaku perseorangan, dan tidak menganggap bahwa sasaran jang utama daripada kritik dan selfkritik adalah pekerdjaan daripada kader Partai. Akibat daripada ini ialah, bahwa sering timbul ketegangan² jang tidak seharusnya diantara kader². Supaja maksud kritik dan selfkritik tertjapai, jaitu mengoreksi pekerdjaan jang salah dan membikin lebih baik jang kurang baik, maka selandjutnja kritik dan selfkritik harus terutama didasarkan pada pekerdjaan. Dengan demikian kritik dan selfkritik tidak lagi mendjadi „barang musiman” jang hanya diadakan kalau ada pemilihan badan pimpinan dan kalau ada ketegangan² dalam sesuatu badan kolektif, tetapi ia benar² mendjadi satu dengan Partai sebagai satunja kuku dengan daging. Kritik dan selfkritik harus dilakukan dengan tulus-ichlas untuk memperbaiki diri dan membantu kawan memperbaiki diri dengan tudjuan mempersatukan fikiran didalam Partai. Inilah

jang kita namakan perdjuaan ideologi didalam Partai jang berpangkal pada persatuan dan melalui kritik-selfkritik menudju persatuan.

*
**

Kawan-kawan,

Dengan Partai jang bersatu dalam ideologi, bersatu dalam politik dan organisasi, kita yakin bahwa Partai kita akan dapat melaksanakan tugas²nja untuk mewujudkan tuntutan² Rakjat sekarang dan selandjutnja untuk melaksanakan semua tuntutan Revolusi Agustus, untuk melaksanakan sembojan „Hapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar²nja”.

Masaalah Pendidikan Didalam Partai

(Pengantar untuk diskusi didalam sidang pleno CC PKI yang diperluas, 1 Agustus 1956)

Kawan² sekalian,

Kita semua sudah mendengar dan mendiskusikan Laporan Polit-biro yang disampaikan oleh Kawan Aidit. Didalam Laporan itu sudah dikemukakan soal² politik dan organisasi yang terpenting yang kita hadapi pada dewasa ini. Didalam Laporan itu juga dikemukakan pentingnya dipetjahkan masaalah pendidikan didalam Partai, mengingat bahwa Partai hanya bisa bulat, djika ada persatuan dalam fikiran. Dikemukakan didalam Laporan itu bahwa „situasi sekarang mendesak supaya Partai kita lebih giat dan lebih sistematik mendidik anggota² Partai yang banyak itu agar mereka sungguh² memiliki ideologi Marxisme-Leninisme, agar mereka senantiasa mengetahui situasi politik negerinja dengan baik dan agar mereka mendjadi elemen yang aktif, yang mempunyai dajatijpta dan yang berdisiplin didalam organisasi Partai”.

Soal „mendidik anggota² Partai yang banyak” inilah yang sekarang saja bitjarakan. Singkatnja : Masaalah Pendidikan didalam Partai.

Kawan²,

Sedjak partai kita mendjadi partai massa dengan lebih dari sedjuta orang anggota, masaalah pendidikan mendjadi masaalah yang besar dan berat. Tetapi peristiwa² yang terdjadi dan tugas² yang kita hadapi sedjak sidang pleno CC yang lalu, terutama dua kali pemilihan umum untuk DPR dan Konstituante, tidak memungkinkan kita untuk menjelenggarakan pendidikan Partai yang teratur dan terpusat. Dalam keadaan yang demikian, pimpinan Partai mengeluarkan beberapa kali instruksi kepada organisasi² Partai bawahan, agar semua anggota dan tjalon-anggota selalu dididik tentang Konstitusi dan Program Partai, djuga agar mereka mengikuti dengan baik pernajaan² dan keterangan² Central Comite ataupun Politbiro. Dalam pada itu, kepada kader² Partai diinstruksikan untuk mempeladjar buku² klasik, antara lain tulisan Kawan Lenin „Komunisme „Sajap-Kiri”, Suatu Penyakit Kanak²”, yang telah sangat membantu kita dalam memetjahkan masaalah² yang berhubungan dengan front persatuan, dan „Sedjarah PKSU (B)”, yang djuga penting dalam kita mempeladjar revolusi kita sendiri.

Kita tidak dapat mengatakan bahwa usaha² itu tidak membawa

hasil. Tetapi kita djuga tidak dapat mengatakan bahwa usaha² itu membawa hasil yang tjukup banyak.

Kiranja tidak salah djika saja katakan, bahwa makin besar Partai kita, makin besar pulalah pentingnja soal pendidikan. Makin besar tugas² politik yang kita hadapi, makin besar djuga pentingnja soal pendidikan.

Sudah ditahun 1938 Kawan Mau Tje-tung mengatakan : „Adalah tidak mungkin bagi sesuatu partai untuk memimpin gerakan revolusioner yang besar kearah kemenangan djika ia tidak mempunyai pengetahuan tentang teori revolusioner, tidak mempunyai pengetahuan tentang sedjarah dan pengertian yang tepat tentang gerakan yang aktuul”. („Peranan Partai Komunis Tiongkok didalam Perang Nasional”).

Kawan Mau Tje-tung memberikan tekanan pada pengetahuan dan pengertian. Karena pengetahuan maupun pengertian tidak bisa disunglap, sekalipun dengan Lampu Wasiat, maka satu²nja djalan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengertian itu ialah beladjar.

Kita tidak lajak melupakan kata² yang sederhana tetapi esensial dari Frederick Engels, jaitu bahwa sedjak Sosialisme itu mendjadi ilmu, diapun harus dipeladjar sebagai ilmu pula. („Perang Tani di Jerman”).

Bagaimana pengetahuan teori didalam Partai kita sekarang?

Terlebih dulu baiklah kita ingat, bahwa selama seperempat abad sedjak berdirinja, Partai kita sebagai Partai disalahsatu negeri djadjaan, hampir² tidak bisa beladjar teori samasekali. Baik kaum kolonialis Belanda maupun kaum fasis Djepang mengadakan blokade dan embargo yang rapat terhadap setiap lektur progresif. Sampai² bibliotik museum yang dikatakan „objektif” dan „ilmiah” tidak boleh mempunyai buku² Marx dan Engels. Demikianlah, buku² klasik ketika itu hanya bisa dihitung dengan djari tangan sebelah, sebagai hasil dari usaha² penjelundupan. Keterbelakangan Partai kita dilapangan teori ini kentara pula dari isi madjalah² Partai seperti „Mowo”, „Njala” dan „Menara Merah”. Djuga kawan² yang dibuang ke Digul diblokade rapat² oleh Belanda, dan mereka resminja hanya diizinkan membatja koran² Hindia-Belanda yang pro Pemerintah Keradjaan.

Keterbelakangan dilapangan teori ini barangkali paling terasa ketika kita melaksanakan Revolusi Agustus 1945-1948. Sebagaimana djelas dari Laporan Politbiro, Partai apalagi massa ketika itu, tidak mempunyai pengertian yang djelas tentang watak, hukum maupun arah Revolusi. Keadaan keterbelakangan teori itu agak berubah ketika kawan² yg. pulang dari Australia, begitu djuga yg. pulang dari Nederland, membawa buku² Marxisme-Leninisme dalam djumlah

jang lumajan. Tetapi sedjak saat itu, Partai kita mengalami keadaan jang lain lagi: bukan samasekali kegelapan teori, tetapi menda-patkan teori jang dipegang setjara dogmatis, jang tidak *diterdjemah-kan* — ini istilah Kawan Lenin — kedalam keadaan khusus Indone-sia, pendeknja teori jang belum diolah sampai matang, teori jang setengah mentah.

Selama kuranglebih 10 tahun ini kita mulai giat beladjar. Kadang² agak teratur dan terpimpin, kadang² lagi tidak teratur samasekali. Tetapi bagaimanapun, harus kita tjatat bahwa selama 5 tahun jang terachir ini kegiatan mempeladjar Laporan² sidang² CC, serta per-njataan² dan keterangan² Partai, mempunjai arti jang menentukan dalam memahami watak, hukum dan arah Revolusi kita. Apalagi sesudah Kongres Nasional ke-V Partai kita menjusun Program Partai, jang mengandung pemetjahan soal² pokok Revolusi kita. Dalam pada itu madjalah kita „Bintang Merah“, dan buku² jang diterbitkan oleh Jajasan „Pembaruan“, begitu djuga „Harian Rak-jat“, besar sekali artinja bagi pendidikan didalam Partai kita.

Sesudah semua kegiatan itu, kita sekarang masih menghadapi ke-adaan sebagai berikut:

Anggota² Partai jang banjak beladjar tetapi tidak bekerdja, ham-pir tidak ada; anggota² jang banjak bekerdja tetapi tidak beladjar, tidak banjak lagi; jg. paling banjak sekarang jalah anggota² jg. be-kerdja tetapi sedikit beladjar, atau se-tidak²nja tidak tjukup beladjar.

Dalam keadaan begini, kita harus mendorong semua anggota dan tjalon-anggota kita untuk beladjar, beladjar dengan sungguh², belad-jar dengan tak kenal bosan. Ada persamaan, tetapi djuga ada per-bedaan antara makan dan beladjar. Kita selalu butuh makan, kita selalu butuh beladjar. Tetapi kalau makan mengenal kenjang, dalam beladjar kita tidak bisa kenjang.

Kawan²,

Oleh sebab itu, sangat tepat pada waktunja sidang pleno CC jang diperluas ini membitjarakan dan menetapkan, bahwa mulai sekarang kita harus mengadakan gerakan beladjar jang sistimatis, terpimpin dan bertudjuan. Baiklah mulai sekarang kita adakan kom-petisi beladjar diseluruh Partai, dan kita lihatlah siapa² jang beladjar, dan siapa² jang beladjar lebih banjak dan lebih baik.

Selama ini Komite² Partai di-provinsi², seksi², dll sudah mulai me-ngadakan ber-matjam² kursus, jang singkat maupun jang agak pan-djang. Disatu pihak mereka memakai instruksi² CC sebagai pegang-an, dipihak lain mereka membuat eksperimen² sendiri² tentang tjara²nja.

Apakah kesalahan² jang masih terdapat didalam penjelenggara-an kursus² itu?

Sebagaimana diterangkan didalam Laporan Politbiro, pada umum-nja, kursus² itu mengambil terlalu banjak atjara. Djuga Sekolah Partai jang pernah diadakan oleh CC terlalu banjak mengambil atjara. Akibatnja, kader² jg. mengikutinja mendengar banjak, men-dengar keterangan² tentang ber-bagai² soal, tetapi jang masuk di-kepala tidaklah banjak. Ini pengalaman jang pertama.

Peladjaran² seringkali tidak tjukup dihubungkan dengan ma-saal² kongkrit jang ada dinegeri kita. Pengetahuan² teori diberikan setjara terlalu umum, terlalu abstrak. Akibatnja, kader² jang me-ngikutinja tidak mengetahui dengan djelas apa gunanja hal² jang dipeladjar itu. Ini pengalaman jang kedua.

Diberikan peladjaran tentang hal ini dan tentang hal itu, tetapi tidak bersemangat dan tidak berdjawa Komunis. Akibatnja, Komunisme dipeladjar sebagai pengetahuan dan tidak sebagai pedoman aksi. Komunisme dipeladjar bunjinja, dan bukan djiwanja. Ini pe-ngalaman jang ketiga.

Sudah tentu, keadaannja tidak disemua tempat demikian. Te-tapi, dari pengalaman² ini kita harus menarik peladjaran, agar kita tidak mandek disatu tempat, tetapi madju.

Kesalahan² jang merugikan ini bisa dihindari, djika kawan² jang memimpin kursus² itu terlebih dulu mempunjai pengertian jang ram-pung tentang perkembangan masjarakat kita, tentang soal² pokok Revolusi kita, tentang soal² front persatuan nasional, dan tentang pembangunan Partai, dan diatas se-gala²nja: memiliki semangat Par-tai jang tebal.

Ini berarti, bahwa adanja sedjumlah tertentu kader² Partai jang menguasai soal² terpokok ini dan jang bersedia bekerdja untuk men-didik anggota² lain dengan sungguh², sangat kita butuhkan.

Untuk tudjuan ini, Politbiro telah memutuskan untuk membuka kembali Sekolah² Partai dan Kursus² Partai.

Sudah tentu, rentjana ini tidak mungkin didjalankan serentak disemua tempat. Tetapi Komite² jang sudah bisa memulainja, harus memulainja.

Dalam pada itu baiklah didjelaskan, bahwa adanja Sekolah² dan Kursus² ini tidak berarti dihentikannja diskusi² periodik, termasuk diskusi² teori, jang diadakan oleh Komite², Fraksi² dan Grup². Te-tapi djika rentjana pendidikan ini sudah mulai berdjalan, maka dis-kusi² periodik di Komite², Fraksi² dan Grup² itupun harus dibikin sedjalan, harus sesuai dan harus isi-mengisi dengan rentjana Se-kolah² dan Kursus² ini.

Djika rantjangan ini kita selesaikan, maka tiga tahun lagi kita akan mempunjai beberapa ribu kader jang dididik langsung oleh CC, oleh Provcom² dan Komite² lainnja.

Hasil yang direntjanakan ini jangan hanya kita lihat setjara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Ia bukan hanya akan mempertinggi tingkat teori Partai kita, tetapi juga akan sangat mempertinggi *dajadjuang* Partai kita.

Apakah hal² yang perlu dikuasai oleh kader² kita? Sebagaimana di atas sudah dikatakan, yang sangat kita perlukan ialah kader² yang se-kurang²nja mempunyai pengertian² yang pokok dan tepat mengenai sedjarah perkembangan masyarakat, mengenai soal² pokok Revolusi kita, mengenai soal² front persatuan nasional, dan mengenai soal² pembangunan Partai.

Pertama, tentang Sedjarah Perkembangan Masyarakat.

Soal yang fundamental ini, yang dalam peristilahan ilmiah disebut materialisme histori, adalah soal yang mutlak harus dimengerti. Masih banyak kawan² yang belum mengerti dengan jelas bagaimana masyarakat ini berkembang, hukum² apa yang menguasai perkembangan itu, dan kemana arah perkembangan itu. Tidak mengerti ini berarti tidak mengerti bahwa kita ini pewaris dari sedjarah yang sudah ber-ribu² tahun, dan tidak mengerti ini berarti tidak mengerti bahwa pada kitalah terletak tugas untuk „membuat“ sedjarah yang akan datang. Ja, tidak mengerti ini berarti tidak mempunyai pandangan kemuka. Lebih² lagi : tidak mengerti ini bisa menjebabkan seseorang tidak yakin akan kemenangan Sosialisme. Dari sini jelaslah bahwa mempelajari dan memahami sedjarah perkembangan masyarakat itu sesuatu yang tidak boleh tidak. Kita wadajib mempelajari, agar kita mengerti peranan kerdja didalam sedjarah. Kita wadajib mempelajarinya, agar kita memahami perjuangannya, sebagai penggerak satu²nja dari perkembangan masyarakat. Kita wadajib mempelajarinya, agar kita memahami negara sebagai alat penguasa. Kita wadajib mempelajarinya, agar kita memiliki pandangan klas dan agar kita memiliki sikap klas.

Kedua, tentang Soal² Pokok Revolusi Kita.

Soal yang sudah dirumuskan didalam Program Partai ini, perlu difahami dengan se-rampung²nja. Masih terlalu banyak kawan² yang belum tjukup djernih pengertiannya tentang sifat setengah-djadjahan dan setengah-feodal dari negeri kita, tentang sifat anti-imperialis dan anti-feodal dari revolusi kita, juga tentang sasaran revolusi kita, tentang tenaga² pokok dan sekutu² revolusi, akhirnya tentang haridepan revolusi. Tidak mengerti ini berarti tidak mengerti sama sekali kemana revolusi menudju. Tidak mengerti ini berarti tidak mengerti samasekali apa tugas² kita sebagai kaum Komunis. Oleh sebab itu, mempelajari sampai menguasai soal² pokok revolusi kita sendiri, adalah mutlak perlu.

Ketiga, tentang Soal² Front Persatuan Nasional.

Soal yang setiap hari kita hadapi ini, memerlukan pengertian yang djernih pula. Kawan² kita pada umumnya sudah menjedari setjara umum tentang pentingnya front persatuan, tetapi kenyataan bahwa sering² masih timbul ke-ragu²an membuktikan, bahwa hubungan yg. jelas antara kepentingan klas dan kepentingan nasional belum difahami dengan sungguh². Pada saat² tertentu dan dalam keadaan² tertentu kita masih menjumpai aliran yang tidak suka bersatu, yaitu aliran ke-kiri²an, pada saat² dan keadaan yang tertentu lagi kita masih menjumpai aliran yang mau „menjelesaikan semua soal lewat persatuan“, yaitu aliran kanan. Agar tidak menjalankan kesalahan dalam hal front persatuan, dan dengan demikian revolusi tidak dirugikan, perlu mempelajari sampai menguasai semua soal pokok yang berhubungan dengan front persatuan.

Keempat, tentang Soal² Pembangunan Partai.

Soal yang berpokok pada Konstitusi Partai inipun perlu dipelajari se-matang²nja. Soal teori Marxisme-Leninisme tentang organisasi, soal sifat dan tugas Partai, soal sjarat² keanggotaan Partai, soal struktur organisasi Partai, soal sentralisme-demokratis, soal pimpinan kolektif, soal disiplin, soal kritik dan selfkritik, dan soal tjarakerdja Partai yg. berpedoman pada garis massa, semua soal ini perlu diketahui dasar²nja dan dimengerti artinja. Dengan tidak mengerti semua ini tidak mungkin mengabdikan dengan baik kepada Partai, dan tidak mengabdikan dengan baik kepada Partai berarti tidak mengabdikan kepada Rakyat dan Revolusi.

Demikianlah empat soal terpokok yang harus dipelajari oleh semua kader. Empat soal ini dirantjangkan sebagai matapelajaran yang diberikan didalam semua Sekolah dan Kursus Partai. Sudah tentu luas dan mendalamnya, pelajaran itu di-masing² tingkat berbeda², tetapi hakekatnya yang diusahakan ditanamkan hanyalah satu, yaitu: *pendidikan tentang prinsip² fundamental Marxisme-Leninisme, dan pendidikan mempertahankan pandangan klas, sikap klas dan metode klas, melawan semua ideologi yang salah.*

Berhubung soal yang kedua dan ketiga, yaitu soal² pokok revolusi dan soal² front persatuan, baik kita ingat apa yang ditulis Lenin di-tahun 1910, bahwa pada masa² tertentu „ber-bagai² segi“ didalam Marxisme „muntjul kedepan“. („Beberapa tjiri perkembangan ber-sedjarah daripada Marxisme“). Didalam tulisan ini juga Lenin menegaskan bahwa perkembangan keadaan yang tjepat „tidaklah kebetulan; tetapi mesti menampilkan kedepan masaalah² Marxisme yang biasanja disebut sebagai masaalah² taktik.“ Saja kira apa yang dikatakan Lenin ini berlaku buat Partai kita sekarang, justru karena perkembangan keadaan dinegeri kita berlangsung pada umumnya tjepat. Djika soal² pokok revolusi dan soal² front persatuan ti-

dak difahami dengan baik, soal² taktikpun mendjadi kabur dan tidak berketentuan. Sebaliknya, djika soal² pokok revolusi dan soal² front persatuan difahami dengan baik, soal² taktikpun mendjadi terang dan berketentuan. Djika soal² ini difahami dengan baik, rasanya tidak akan ada fikiran jang menjalahkan apa jang dinamakan „kolaborasi klas“ seperti terdjadi baru² ini.

Ja, soal taktik pada tiap² ketika adalah soal selamat-tidak selamatnja Partai, soal selamat-tidak selamatnja Revolusi. Pengalaman mengadjar kita, bahwa sesuatu kesalahan taktik bisa membawa akibat jang besar, akibat jang tidak mudah menjembuhkanja. Maka itu, agar dapat memimpin massa dengan baik, pada tiap² saat taktik harus dikuasai. Inilah keterangannya mengapa pendjelasan² tentang situasi² pada tiap² saat itu penting sekali. Lebih² dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana pada umumnya perkembangan politik berlangsung tjepat atau agak tjepat.

Selanjutnja, kawan², mengenai matapeladjaran jg. empat jang diusulkan tadi, khusus untuk Sekolah Partai Central perlu ditambah dengan satu matapeladjaran lagi, jaitu soal Filsafat.

Pengalaman mengadjarkan kepada kita, bahwa barangsiapa kuat dalam filsafat Marxisme, dia bisa menemukan djalan pemetjahan, meskipun persoalan² jang dihadapinja sulit dan pelik. Jang dimaksudkan „beladjar filsafat“ dan „kuat dalam filsafat“ disini bukanlah mempeladjar filsafat Marxisme setjara intelektualis atau setjara teoritis abstrak. Kalau kita mempeladjar filsafat Marxisme, jang perlu bukanlah menghafal dalil² materialisme-dialektik diluar kepala. Jang kita perlukan ialah beladjar filsafat setjara praktis. Artinja, jang langsung ditudjukan untuk mengubah fikiran kita, agar kita memiliki metode berfikir jang ilmiah. Kepada kawan² jang beladjar filsafat harus dibangkitkan rangsang untuk membandingkan fikiran²nya jang lama dengan fikiran materialisme-dialektik, kemudian untuk menggunakan metode berfikir materialisme-dialektik buat mengkritik tjara berfikirnya jg. lama, jang tidak ilmiah. Mengubah tjara berfikir ini penting sekali, karena ia sekaligus berarti menghubungkan teori dengan praktek, jaitu teori filsafat dengan praktek berfikir.

Untuk Sekolah² Partai tingkat bukan Central buat sementara matapeladjaran filsafat belum diadjarkan, antara lain mengingat bahwa kader² jang harus mengadjarkannya belum tjukup ada pada kita.

Tidak perlu diterangkan lagi bahwa beladjar di Sekolah Partai sadja tidaklah tjukup, djauh daripada tjukup. Sekolah² Partai hanya memberikan pengetahuan² jang pokok, memberikan pengetahuan jang fundamental, jang kelandjutannya harus dipeladjar

terus-menerus, dalam studi dan dalam praktek. Dalam hubungan ini perlu ditekankan, bahwa dasar kita beladjar adalah studi-sendiri. Sekolah², kursus² maupun konsultasi² sifatnja membantu, memudahkan. Oleh sebab itu tidak tepat djika seseorang hanya bergantung pada Sekolah² dan Kursus² Partai. Kita lebih² harus mentjela exes² seperti jang pernah terdjadi dengan satu-dua siswa „Marx House“ tempohari, jang beladjar „untuk mentjari idjazah“ sadja.

Hal ini tidak akan terdjadi, djika Komite² mengirimkan ke Sekolah² dan Kursus² Partai itu bukan kader sembarang kader, atau kader jang kebetulan bisa dilepaskan, melainkan kader² jang pilihan, jang memiliki sjarat² jang dibutuhkan.

Departemen Agitasi-Propaganda Central Komite² kini sedang menjusun dan ber-turut² akan menerbitkan diktat² jang diperlukan. Diktat² ini akan diterbitkan dalam djumlah besar²an dan diusahakan harga jang se-murah²nja. Diktat² ini sebagaimana diterangkan oleh kawan² Provcum² akan sangat penting artinja, dan memang demikian halnya. Sungguhpun demikian, peladjaran² jang diberikan di Sekolah² dan Kursus² Partai itu tidak akan mentjapai hasil seperti jang diinginkan, djika kawan² pengadjarnya berpegangan setjara mati kepada diktat² jang ada dan tidak pandai menggunakannya setjara hidup. Dengan „menggunakan setjara hidup“ dimaksudkan, bahwa soal²nya harus senantiasa dihubungkan dengan pengalaman² jang paling baru, bukan hanya pengalaman nasional, tetapi djuga pengalaman lokal. Ini hanya mungkin, djika kawan² pengadjar itu bukan mendjadi „pengadjar² murni“ jang terlepas dari perdjuaan jang aktuail, sebaliknya, mereka harus tetap mendjadi partisipan (peserta) jang aktif dalam perdjuaan se-hari², meskipun bagi mereka sudah ditentukan tugas jang khusus.

Peranan jang tidak kalah pentingnja akan dimainkan oleh madjalah² dan surat kabar² Partai. Untuk selanjutnja, madjalah² dan surat kabar² itu harus menjediakan ruangan jang lebih banyak untuk membantu berhasilnja rentjana pendidikan ini. Harus diperbanyak adanya tulisan² jang khusus membitjarkan soal² jang sedang dipeladjar, dan jang membitjarkan pengalaman² jang sudah ada dalam mendjalankan rentjana pendidikan. Soalnya akan lebih baik lagi, djika anggota² Central Komite², djuga pemimpin² Provcum², memberikan sumbangan jang aktif dalam hal ini. Ini akan mempermudah djalannya pendidikan dan sekaligus akan mempertinggi otoritet madjalah² dan surat kabar² itu.

Salahsatu rubrik jang penting artinja ialah rubrik tanja-djawab, jang membuka kesempatan bagi pembatja² untuk memadjukan pertanjaan² dan jang oleh redaksi akan dijawab. Djuga tidak kalah

pentingnya konsultasi yang diberikan oleh Komite² kepada anggota² dan kader² yang sedang beladjar. Komite², terutama Bagian Agit-propnya, hendaknya se-waktu² bersedia menerima pertanyaan² yang berhubungan dengan soal² yang sedang dipelajari dan sesudah menerima pertanyaan² itu memberikan jawaban² dan penjelasan².

Disamping semua hal diatas ini, masih ada beberapa hal yang sangat penting, yang erat hubungannya dan bahkan tak dapat dipisahkan dari rentjana pendidikan keseluruhannya.

Pertama, soal seminar.

Soal ini sudah disinggung didalam Laporan Politbiro. Soalnya ialah soal menjadikan umum pengalaman seseorang kader tertentu dan soal menghubungkan dengan erat teori dan praktek. Partai yang banyak anggotanya seperti Partai kita ini tentu banyak punya pengalamannya. Tetapi masih terlalu sering, pengalaman² yang didapat, yang baik maupun yang tidak baik, tidak diteruskan atau diluaskan kepada Komite² atau kader² yang lain. Pengalaman² masih banyak yang belum dijadikan umum, dan sebaliknya malahan „disimpan sendiri“. Ini dengan sendirinya tidak menguntungkan Partai. Ini dengan tidak disadari sudah menghambat ketepatan kemajuan Partai. Untuk mengatasi hal inilah maka Partai perlu mengadakan seminar² mengenai atjara² tertentu. Seminar² bisa diselenggarakan oleh Komite² Partai dengan mengundang kader² yang dipandang perlu. Didalam seminar itu, kader yang berpengalaman misalnja dalam hal propaganda, dalam hal mengurus, dalam hal kesenian, dll. memberikan uraian berdasarkan pengalaman²nja, kemudian uraian itu didiskusikan. Dengan demikian, setiap pengalaman yang penting yang ada pada kita tidak „disimpan sendiri“ melainkan „dijadikan milik bersama“. Ini juga penting dilihat dari sudut menghubungkan teori dan praktek, karena pengalaman itu pada hakekatnya adalah pemaduan teori dengan praktek, meskipun kadang² salah memadukannya.

Kedua, soal konferensi teori.

Selama ini pembijtaraan² soal² teori didalam Konferensi² Partai selalu „dibontjengkan“ kepada pembijtaraan² soal² lain. Sebagai permulaan, hal itu baik. Tetapi untuk selanjutnya, lebih baik jika soalnya disendirikan dengan mengadakan konferensi² teori. Dengan demikian soal² teori tidak akan dibijtarkan ber-gegas² karena sudah terdesak waktu. Ini tentu saja tidak berarti bahwa soal² teori diandjurkan dibijtarkan terlepas dari soal² praktis atau soal² kongkrit revolusi kita. Soal terlepas atau tidaknya tidaklah tergantung dari ada atau tidaknya konferensi teori yang tersendiri teta-

pi tergantung dari metodenja membitjarakan dan mendiskusikan masalah² teori itu.

Ketiga, soal mempelajari tulisan² klasik.

Djuga soal ini sudah disinggung didalam Laporan Politbiro. Soalnya ialah soal mempelajari Marxisme-Leninisme setjara sistimatis dan bukan setjara sepotong-sepotong, setjara praktis dan bukan setjara abstrak. Soalnya ialah soal mempelajari Marxisme-Leninisme menurut hakiki dan semangatnja, dan bukan menurut bunji huruf²nja. Selama dua-tiga tahun ini kita sudah mempelajari bagian² dari „Dasar² Leninisme“, sudah mempelajari „Negara“, „Materialisme Dialektik dan Histori“, „Anarkisme atau Sosialisme?“, „Tentang Praktek“, „Komunisme Sajap Kiri“, Suatu penja-kit Kanak²“, „Sedjarah PKSU (B)“, juga sudah mempelajari tulisan² seperti „Membasmi Liberalisme“, „Garis Massa“ dan „Perjuangan Intern Partai“, dan terlebih dulu sudah mempelajari „Manifest Partai Komunis“. Tetapi apakah kita mempelajarinya sudah tidak sepotong², sudah tidak abstrak dan sudah tidak menurut bunji huruf²nja saja? Saja kira belum. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki tjara kita mempelajari tulisan² klasik. Kita harus lebih banyak mempelajari tulisan² klasik, terutama sekali kader² yg. tinggi. Pimpinan Partai pada waktu² tertentu akan mengeluarkan seruan tentang tulisan² klasik apa yg. harus dipelajari, sesuai dengan tugas² politik Partai pada ketika² tertentu dan pimpinan Partai akan mengeluarkan petundjuk² sekedarnja tentang tjara beladjar dan tentang memperbaiki tjara beladjar.

Petundjuk² yang pertama akan dikeluarkan tidak lama lagi berhubungan dengan bahan yang diwaktu sekarang ini harus dipelajari dengan sungguh², jaitu bahan² Kongres ke-XX PKSU.

Soal² lain lagi yang harus mendapat perhatian kita bersama adalah soal² sebagai berikut.

Soal madjalah² Partai. „Bintang Merah“ akan segera terbit tepat pada waktunya, dan „Kehidupan Partai“ akan kita terbitkan kembali. „Kehidupan Partai“ ini terutama untuk membitjarakan pengalaman² praktis dilapangan organisasi, agitasi, propaganda, dll. Disamping itu, karena „Untuk Perdamaian Abadi, Untuk Demokrasi Rakjat!“ tidak terbit lagi, maka sangat kita perlukan adanya madjalah yg. khusus memuat tulisan² kawan² luarnegeri. Untuk ini pimpinan Partai merentjanakan akan menerbitkan madjalah baru, yg. terbit dua bulan sekali. Ini malahan akan lebih efektif daripada „Untuk Perdamaian Abadi, Untuk Demokrasi Rakjat!“, pertama karena diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan kedua karena pilihan artikelnja bisa dilakukan yang berhubungan atau yang sesuai dengan masalah² kita sendiri. Untuk memperbaiki mutu madjalah²

Partai ini, untuk masing²nja akan kita bentuk Dewan Redaksi dengan pembagian pekerjaan yang diatur baik. Tetapi mengingat bahwa kader² redaktur kita masih sangat kurang, maka yang akan sangat membantu ialah jika anggota² CC selalu memberikan sumbangannya kepada madjalah² tsb., terutama „Bintang Merah” dan „Kehidupan Partai”. Sumbangan karangan² untuk „Kehidupan Partai” juga sangat diharapkan dari anggota² Provcom dan Secom.

Soal buku² roman revolusioner. Baru² ini Jajasan „Pembaruan” menyelesaikan penerbitan buku Maxim Gorki „Ibunda”. Buku ini akan sangat membantu pembentukan ideologi dari kader² dan anggota² kita, oleh sebab itu kepada kader² dan anggota² kita baik kita andjurkan membatja buku Gorki ini. Di-waktu² jg. akan datang, buku² roman revolusioner akan lebih banyak kita terbitkan misalnja buku Ostrovski „Bagaimana Badja Ditempa” dan buku Julius Fuqik „Laporan Dari Bawah Tianggantungan”.

Demikianlah beberapa soal lain yang perlu diadjukan dalam hubungan masaalah pendidikan didalam Partai.

Pimpinan Partai yakin, bahwa rentjana ini akan bisa kita laksanakan, asal : pertama soal pendidikan ini didjadikan soal *seleuruh* Partai, kedua, dibangkitkan inisiatif dan aktivitet yang sebanyak-banyaknja untuk mendjamin pelaksanaannya; dan ketiga, dilakukan penjimpulan setjara nasional, se-tidak²nja setahun sekali.

Kawan² sekalian.

Semua yang dikemukakan ini mempunyai tudjuan agar kita sekalian memperscalkan Marxisme sebagai Marxisme. Setengah abad yang lalu Lenin sudah berpesan kepada kita, bahwa Marxisme hanya bisa hidup jika ia *diterdjemahkan* menurut keadaan² khusus setiap bangsa. Djelaslah bahwa jika kita mempersoalkan Marxisme terlepas dari tjiri² nasional bangsa kita sendiri, Marxisme yang demikian adalah Marxisme yang abstrak, Marxisme yang mati. Oleh sebab itu segala dogmatisme dan doktrinerisme yang umumnya memuakkan, harus kita singkirkan. Kita harus menghidupkan Marxisme se-hidup²nja, sesegar-segarnja, serasi dengan djiwa dan gaja Indonesia, sehingga Marxisme itu bertjorak, berwarna dan berbunji Indonesia, sehingga setiap Rakjat Indonesia akan merasakannya sebagai sesuatu yang tidak asing, sesuatu yang tepat.

Jika rentjana yang dikemukakan ini bisa dilaksanakan maka kita akan madju djauh dalam menjatukan fikiran didalam Partai, dalam membulatkan ideologi Partai. Sebagaimana dikatakan oleh kawan Aidit „persatuan dalam Partai adalah sjarat mutlak untuk melaksanakan tugas² Partai”.

Jika rentjana ini kita laksanakan, maka kita akan terbebas dari perdebatan² yang tidak perlu, dan kita akan mempersoalkan semua

soal kita dengan titikpangkal yang satu dan sama, dengan landasan yang satu dan sama.

Ini akan lebih mendewasakan Partai kita.

Mari kita achiri keadaan didalam Partai kita dimana kader² dan anggota² kurang beladjar atau terkadang tidak beladjar samasekali. Sebagaimana dikatakan kawan Chrusjov, tidak beladjar itu menandakan kemalasan djiwa. Mari kita laksanakan rentjana pendidikan, mari kita lakukan gerakan beladjar ini dengan sembojan „*barangsiapa tidak beladjar, dia sesungguhnya sudah mati sebelum mati*”. Mari kita semua beladjar, dengan teratur, dipimpin dan bertudjuan.

Resolusi tentang laporan umum Politbiro kepada Sidang Pleno ke-IV Central Comite PKI jang diperluas

Setelah mendengarkan dan mendiskusikan setjara mendalam laporan Kawan D.N. Aidit, Sekretaris Djendral CC PKI atasnama Politbiro tentang „BERSATU UNTUK MENJELESAIKAN TUNTUTAN² REVOLUSI AGUSTUS 1945”, sidang pleno ke-IV Central Comite PKI jang diperluas, pada achir Djuli 1956 memutuskan :

membenarkan dan menerima garis politik dari Politbiro dan aktivitet²nja dalam melaksanakan putusan² Kongres Nasional ke-V PKI dan putusan² sidang² pleno CC jl;

membenarkan dan menjokong sepenuhnya tugas² baru dalam lapangan politik, organisasi dan ideologi jang disimpulkan dalam laporan tersebut.

Sidang pleno CC mengkonstatasi dengan gembira tumbuhnja kekuatan Rakjat Indonesia pada waktu achir² ini dan tetap setianja Rakjat dan pemuda² Indonesia pada tudjuan Revolusi Agustus.

Sidang pleno ke-IV CC ini menjimpulkan dengan gembira tumbuhnja front persatuan internasional anti-perang dan anti-kolonialisme jang merupakan pergeseran demokratis dan progresif jang menguntungkan perdamaian dan kemerdekaan.

Disamping itu sidang pleno CC memperingatkan semakin beratnja tanggungjawab dan pekerdjaan² jang dihadapi Partai, djustru sesudah Partai mendjadi Partai Komunis jang besar. Tanggungjawab itu akan dapat dipenuhi dan tugas² itu akan dapat dilaksanakan dengan Partai jang bersatu dalam ideologi, bersatu dalam politik dan organisasi, dengan Partai jang mampu menghubungkan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia.

I

Mengenai situasi internasional dan situasi dalamnegeri, sidang pleno ke-IV CC membenarkan kesimpulan Politbiro jang menjatakan adanja kemungkinan² jang luas untuk mengembangkan gerakan Rakjat dan mengembangkan Partai.

Sistim sosialis jang dipelopori oleh Sovjet Uni sudah mendjadi sistim dunia. Negara² kubu sosialis mendekati bangsa² dan negara² dengan hati terbuka untuk mentjari dan merundingkan bersama apa sadja jang dapat dikerdjakan bersama guna mentjegah pe-tjahnja perang. Meskipun masih ada negara² Barat jang belum menerima atau belum menerima sepenuhnya adjakan itu, tetapi se-kurang²nja ia telah membikin subur politik bebas dan netral jang memberikan sumbangan² penting bagi keredaan situasi internasional, dan terutama telah merebut hati umatmanusia tjintadamai diseluruh dunia. Kongres ke-XX Partai Komunis Sovjet Uni (PKSU) merupakan sumbangan jang sangat penting dalam usaha meredakan ketegangan internasional.

Sidang berpendapat, bahwa situasi internasional dewasa ini djuga ditandai oleh perkembangan jang luarbiasa dari gerakan kemerdekaan nasional dan oleh keruntuhan sistim kolonial-imperialis.

Didalamnegeri laporan Politbiro menggambarkan dua kedjadian penting, jaitu berlangsungnja Kongres Rakjat Seluruh Indonesia ke-I pada bulan Agustus 1955 dan terbentuknja kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2. Program putusan Kongres Rakjat ke-I dan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, walaupun jang satu lebih madju daripada jang lain, ke-dua²nja dapat didjadikan pegangan dalam perdjjuangan se-hari² Rakjat Indonesia sebagai program jang sudah disetudjui oleh sebagian besar massa Islam dan massa Nasionalis dan oleh seluruh massa Komunis.

Sidang pleno ke-IV CC menghargai politik luarnegeri dari kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 jang bebas dan aktif, serta mengutuk mereka jang mau mendjalankan politik bermukadua, jaitu madju keluar dan reaksioner kedalam.

Pada waktu sekarang adalah mendjadi tugas penting dari Partai untuk mendorong agar Indonesia mendjalankan politik anti-kolonialisme dan politik perdamaian jang lebih aktif lagi, untuk lebih memperkuat kedudukan Indonesia diantara negara² didunia, terutama diantara negara² Asia-Afrika. Bersamaan dengan itu kaum Komunis harus mendorong agar kedudukan internasional Indonesia jang kuat per-tama² ditudjukan untuk kepentingan Rakjat didalamnegeri, terutama dalam hubungan melikwidasi kekuasaan ekonomi kaum kapitalis besar Belanda.

II

Sidang pleno ke-IV CC membenarkan analisa jang djelas dalam laporan Kawan D.N. Aidit tentang perimbangan kekuatan politik didalamnegeri, tentang adanja 3 kekuatan jang berimbang dan 3

konsep dalam hubungan dengan penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Jang *pertama*, ialah konsep kekuatan kepalabatu, konsep kaum feodal dan komprador jang menghendaki satu negara jang hanya bentuknja merdeka, tetapi hakekatnja tunduk kepada imperialisme. Pendukung konsep ini mendjalankan politik anti-Komunis dan anti-Rakjat.

Jang *kedua*, ialah konsep kekuatan progresif, konsep kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan kaum intelektual revolusioner, jang bertudjuan melaksanakan semua tuntutan Revolusi Agustus, jaitu melaksanakan sembojan „Hapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar²nja”.

Jang *ketiga*, ialah konsep kekuatan tengah, konsep burdjuasi nasional jang mempunyai pertentangan dengan kaum imperialis, dengan kaum komprador dan dengan tuantanah, jang menghendaki perubahan², tetapi maksudnja ialah membela kepentingan sendiri untuk perkembangan kapitalisme nasional.

Laporan tersebut membuktikan dengan majakinkan, bahwa watak daripada revolusi Agustus 1945 adalah nasional dan demokratis, anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Pidato Bung Karno jang diutjapkan dekat sebelum petjahnja revolusi dan isi Undang² Dasar Republik Proklamasi, walaupun dengan samar², membuktikan kebenaran analisa tersebut. Tindakan² massa ketika revolusi berlangsung lebih meyakinkan tentang watak revolusi jang demikian itu.

Sesuai dengan analisa tsb. diatas, laporan menetapkan bahwa konsep PKI dan semua kaum progresif dalam menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus, ialah menghapuskan imperialisme dan feodalisme. Ini adalah konsep Rakjat. Berdasarkan konsep ini, mereka jang tidak anti-imperialisme dan tidak anti-feodalisme adalah anti-Rakjat, anti-Revolusi Agustus 1945.

Dengan ketadjaman Leninis, laporan itu selandjutnja menganalisa hubungan satusamalain antara ketiga kekuatan pokok tadi, sehingga dilengkapilah sembojan² dan tugas² daripada revolusi itu dan menarik kesimpulan politik jang djelas dan sederhana, jang sepenuhnya dibenarkan sidang pleno CC sebagai garis politik Partai, jaitu dengan sekuat tenaga dan dengan tidak djemu²nja mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu.

Terhadap sementara orang diluar Partai jang menjatakan dirinja tidak pro-imperialis, tetapi hanya anti-Komunis, diadjak untuk menindjau kembali sikap anti-Komunisnja itu. Sikap anti-Komunis,

jaitu anti golongan jang paling konsekwen anti-imperialis, sadar atau tidak sadar berarti membantu imperialis.

Laporan tersebut meyakinkan supaja kaum Komunis Indonesia tidak menjamaratakan semua anggota dan pemimpin partai² kepalabatu dan supaja tindakan²nja berpegangan pada kenyataan bahwa didalam partai² jang mewakili kekuatan kepalabatu dan kekuatan tengah terdapat berbagai golongan, jaitu golongan kiri, tengah dan kanan. Untuk dapat mempersatukan kekuatan jang sebanyak²nja, kaum Komunis Indonesia harus menganalisa golongan² tersebut agar setiap waktu dapat menentukan sikap jang tepat supaja dapat mempersatukan semua jang bisa dipersatukan dan supaja sasaran dibikin se-ketjil²nja, supaja jang dipentjilkan hanya jang benar² berkepalabatu.

Sidang menjambut dengan gembira dikemukakannja rol pemuda dan intelektual revolusioner dalam hubungan dengan melaksanakan tuntutan² Rakjat sekarang dan melaksanakan tuntutan² revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Ini berarti bahwa Partai harus bekerdja baik dikalangan pemuda dan inteligensia, disamping terus memperbaiki pekerdjaannja dikalangan kaum buruh, tani, wanita dan massa Rakjat lainnja.

Sidang pleno ke-IV CC membenarkan politik jang lebih terang terhadap burdjuasi nasional, jaitu mendorong sifat²nja jang madju, jang anti-kolonialisme dan anti-feodalisme, disamping itu mengkritik sifat²nja jang setengah² dan tidak konsekwen, serta jang merusak persatuan nasional. Kritik tidak boleh ditudjukan terhadap soal² jang tidak prinsipiil, dan kritik kepada burdjuasi nasional haruslah dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional.

Sidang pleno ke-IV CC membenarkan kesimpulan, bahwa :

Berdasarkan analisa tentang pengaruh partai² politik atas massa dinegeri kita, kita memperdjuangkan persatuan massa Islam (dan aliran keagamaan pada umumnja), massa Nasionalis dan massa Komunis dalam perdjuangan melawan imperialisme dan feodalisme. Berdasarkan analisa tentang klas² dinegeri kita, kita memperdjuangkan persatuan antara kaum buruh, tani, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektual revolusioner dan burdjuasi nasional, jaitu persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah.

III

Sidang pleno ke-IV CC berdasarkan laporan Kawan D.N. Aidit menundjukkan perlu segera diatasinja suatu kekurangan didalam Partai, jaitu kekurangan dalam memahami saling-hubungan antara Program Umum Partai dengan Program Tuntutan Partai.

Bila seorang anggota Partai hanya mempropagandakan Program Umum saja, yaitu program jangka panjang, ia tidak akan mampu memberikan pimpinan dalam perjuangan se-hari² dari Rakyat pekerdja, ia akan mengisolasi Partai dari massa, ia membuat kesalahan sektarisme. Sebaliknya bila seorang anggota Partai hanya memahami Program Tuntutan saja dan tidak meningkatkan kesadaran politik dari massa untuk mengetahui hubungan Program Tuntutan dengan Program Umum Partai, ia akan terlibat dalam persoalan se-hari² dengan tidak melihat perspektif² dari revolusi, ia bisa jadi lupa tujuan.

Sidang membenarkan bahwa Program Umum Partai mengemukakan apa yang diperjuangkan oleh Partai dalam seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, seluruh tingkat revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sedangkan Program Tuntutan bisa berubah² sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan, tetapi betapapun juga seringnya berubah² tugasnya adalah tetap, yaitu untuk mempersatukan Rakyat dan untuk memenuhi tuntutan² ekonomi dan politik jumlah yang terbanyak daripada Rakyat pada tingkat² ketjil dalam tingkat besar daripada revolusi nasional dan demokratis.

Sidang meyakini kebenaran pokok² pikiran mengenai Program Umum sebagai program jangka panjang untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nya, yang lengkapnya sudah dirumuskan dalam Kongres Nasional ke-V Partai. Juga sidang membenarkan bahwa berdasarkan Program Umum disusun Program Tuntutan, yang banjak persamaannya dengan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 dan dengan putusan² Kongres Rakyat Seluruh Indonesia ke-I, sebagai alas (platform) untuk berunding dan bekerdja-sama dengan siapa saja yang anti-kolonialisme, sebagai tuntutan kepada pemerintah yang berkuasa dan sebagai pedoman aksi² massa.

Sidang pleno ke-IV CC berkejakinan bahwa dengan jelasna perbedaan dan jelasna hubungan antara Program Umum dan Program Tuntutan, serta fungsinya sebagai alas menggalang front persatuan, setiap anggota dan tjalon-anggota Partai mendapat pegangan yang lebih terang untuk mengembangkan dirinya sebagai elemen yang aktif dilapangannya masing², tidak hanya menjadi pembela yang setia dan yang selalu siap menghadapi perjuangan untuk kepentingan se-hari² dari massa, tetapi menjadi pemimpin politik yang berpandangan djauh dan ulet.

Dalam Program Tuntutan dan penjelasannya berbagai pertanyaan dan persoalan yang hidup dikalangan Rakyat mendapat jawaban yang tepat.

Tentang pelaksanaan pembatalan KMB dituntut supaya diambil tindakan² tegas terhadap kaum kapitalis besar Belanda dilapangan ekonomi, dengan samasekali tidak melupakan untuk melawan bahaya yang datang dari kaum imperialis lainnya, terutama Amerika. Pada pokoknya PKI menghendaki dimobilisasi dan dikoordinasijanya seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar dan untuk merebut Irian Barat.

Mengenai Plan Lima Tahun Pemerintah, diperjuangkan supaya tidak berakibat bertambah beratnya beban Rakyat pekerdja, supaya tidak menimbulkan pajak² baru bagi Rakyat pekerdja, melainkan terutama harus diambil dari keuntungan kaum kapitalis asing, tuantanah² dan hartawan² lainnya. Selandjutnya Plan Lima Tahun supaya membuka lapangan² pekerjaan baru bagi parapenganggur yang sekarang sangat banjak itu, supaya ditudjukan pada persiapan² industri berat milik negara.

Mengenai ekonomi nasional tidak boleh diartikan „ekonomi kapitalis nasional“, tapi untuk tingkat sekarang harus diartikan ekonomi untuk seluruh bangsa yang bebas dari kekuasaan kaum kapitalis besar asing, dimana ada djaminan peluasan sektor ekonomi negara dan adanya proteksi dan fasilitas bagi kapitalis² nasional yang bonafide.

Kebebasan² demokratis untuk Rakyat dan organisasi² Rakyat adalah bagian terpenting dalam Program Tuntutan PKI. Dalam hubungan ini PKI mengusulkan kepada pemerintah dan pendjabat² pemerintah supaya dalam menghadapi aksi² Rakyat menempuh jalan berunding dan bukan melakukan politik „tangan besi“.

Tentang soal tanah dan gerakan tani pada waktu ini politik PKI yang terpenting bagi kaum tani ialah tuntutan turun sewa (turun setoran), turun bunga dan kenaikan upah bagi buruhtani.

Tentang perjuangan parlementer laporan Politbiro menjelaskan bahwa Partai memandang Parlemen tidak hanya sebagai mimbar propaganda, tapi juga untuk memperjuangkan tuntutan² yang maju diberbagai lapangan. Peralihan setjara parlementer dari keadaan Indonesia sekarang kesistim kekuasaan Rakyat, adalah suatu kemungkinan. PKI akan berdjuaug dengan sekuat tenaga agar kemungkinan ini menjadi kenyataan, tetapi juga PKI dan seluruh Rakyat harus waspada terhadap maksud² djahat dari kaum reaksioner dalam dan luarnegeri yang menentang terwujudnya peralihan setjara parlementer kesistim kekuasaan Rakyat. Adanya kemungkinan peralihan kesistim kekuasaan Rakyat lewat jalan damai tidak berarti bahwa Partai harus hanya bekerdja lebih giat didalam Parlemen, tapi juga dan terutama dalam membangkitkan

dan memobilisasi massa yang se-luas²nja, terutama massa kaum buruh dan kaum tani.

Sidang pleno CC berpendapat bahwa tuntutan² Rakjat sekarang akan bisa lebih lantjar dilaksanakan oleh Pemerintah Koalisi Nasional, dalam mana semua klas revolusioner ikutserta, termasuk proletariat yang diwakili oleh PKI. Karena itu pada krisis² kabinet PKI akan menuntut pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional. Tetapi, tentang ikut atau tidak ikutnja PKI dalam kabinet tergantung pada dua soal: pertama, djika programnja mewakili kepentingan Rakjat dan kedua, djika komposisi kabinet mendjamin pelaksanaan program.

Sidang pleno ke-IV CC membenarkan dan menjambut dengan gembira adanya perumusan tentang dasar untuk menyelesaikan masaalah sukubangsa dan minoritet keturunan asing didalam laporan Kawan D.N. Aidit, jaitu politik hak-sama bagi semua sukubangsa, tak perduli sukubangsa besar atau ketjil, serta politik hak-sama bagi semua warganegara. Untuk tingkat sekarang PKI dapat menjetudjui pelaksanaan „otonomi daerah“, tapi bersamaan dengan itu kita harus menjelidiki dan menjimpulkan persoalan sukubangsa² menudju pelaksanaan otonomi sukubangsa² dibawah pemerintah pusat yang bersifat kesatuan.

Laporan djuga mengemukakan pentingnja rol kaum inteligensia, paraseniman dan pekerdja² kebudayaan lainnja yang bersemangat kerakjatan dalam perdjjuangan untuk mentjapai Indonesia baru yang merdeka, bersatu, demokratis dan makmur.

Sidang pleno ke-IV CC berpendapat bahwa didalam Program Tuntutan yang dirumuskan sebagai sembojan² aksi diwakili kepentingan² yang paling mendesak dari semua klas dan golongan yang revolusioner, yang demokratis dan patriotik diseluruh tanah-air. Pelaksanaan Program Tuntutan PKI akan mengembangkan semua kekuatan progresif, mempersatukan kekuatan progresif dengan kekuatan tengah dan hanja akan merugikan kekuatan kepala-batu dan madjikan²nja. Selandjutnja melalui pelaksanaan Program Tuntutan itu perdjjuangan Rakjat Indonesia akan sampai kepada pelaksanaan program umum untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

IV

Sidang pleno ke-IV CC sependapat dengan laporan Kawan D.N. Aidit, bahwa Partai kita, dengan lebih dari sedjuta anggota dan setelah mengalami udjian berupa dua pemilihan umum yang lalu, termasuk salahsatu Partai Komunis yang besar didunia. Ke-

besarap PKI ini adalah pentjerminan dari kebesaran, tingginja kesedaran politik dan daja-organisasi dari Rakjat pekerdja Indonesia. Adalah sewadjarnja djika tiap Komunis Indonesia lelaki dan wanita merasa bangga mendjadi anggota PKI dan disamping itu menjedari, bahwa tanggungjawabnja terhadap Rakjat dan bangsa semakin besar dan berat.

Berpangkal pada sukses² yang telah ditjapai, klas buruh Indonesia akan lebih mampu mempertahankan dan memperluas kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat, sebagai sjarat untuk melaksanakan dalil bahwa kebebasan klas buruh Indonesia dari penghisapan hanja bisa ditjapai dengan lebih dulu membebasan seluruh Rakjat dari penghisapan imperialis dan feodal.

Laporan menjimpulkan bahwa setelah mendapat kemenangan dalam pemilihan² umum yang lalu, sekarang sikap Partai kita mengenai tiap² soal diharapkan dan diperhatikan orang, sedangkan orang² progresif mengharapakan tuntunan lebih banjak dari Partai kita. Sedar akan tanggungjawab kita, kenjataan ini akan kita kembangkan dengan melipatgandakan kegiatan untuk membela kepentingan se-hari² daripada Rakjat, dengan meningkatkan keberanian, kewaspadaan, ketabahan, kebidjaksanaan dan keuletan dalam memperdjjuangkan tuntutan² Rakjat yang dirumuskan dalam program Partai.

Tugas² tersebut hanja mungkin bisa dilaksanakan dengan membadjakan persatuan didalam Partai, persatuan dalam ideologi, politik dan organisasi. Untuk ini laporan menekankan bahwa kewadajiban kita yang terpenting sekarang jalah memeriksa kembali barisan Partai, mentjari dan menemukan kelemahan² Partai serta melikwidasi kelemahan² itu.

Dilapangan organisasi, tugas yang sangat mendesak jalah mengkonsolidasi hasil² dari rentjana² peluasan keanggotaan dan organisasi Partai. Ini berarti bahwa semua anggota Partai harus segera diorganisasi dalam grup² Partai dan bahwa para tjalon-anggota yang sudah melalui masa-tjalonnja dengan baik harus ditingkatkan mendjadi anggota. Dan ini hanja mungkin djika Komite² Partai dengan segala Bagian²nja lebih diaktifkan dan diperkuat, dengan djalan menetapi ketentuan² dalam Konstitusi Partai tentang Konferensi² dan rapat² anggota, yang berarti sekaligus menghidupkan demokrasi-intern Partai. Dalam hubungan ini masaalah pemasukan iuran dan masaalah keuangan umumnja meminta perhatian lebih besar.

Mengenai persatuan dilapangan politik, disimpulkan perlunja menitikberatkan pendidikan mengenai tugas menggalang front persatuan nasional yang tak dapat di-pisah²kan dengan tugas me-

neruskan pembangunan Partai, sebagaimana diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.

Tentang persatuan dalam fikiran, persatuan ideologi, dikemukakan dalam laporan sebagai masalah pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Setelah memeriksa kekurangan² diwaktu yang lalu, sidang pleno ke-IV CC menjetudjui bahwa pendidikan harus selalu dihubungkan dengan praktek dan bahwa yang terpenting ialah memberikan semangat-Komunis dan pandangandunia-Komunis yang tidak bisa dilupakan. Disamping itu sidang menjetudjui penjederhanaan matapelajaran² dan penjempurnaan tjara² beladjar.

Sidang pleno CC djuga menarik pelajaran yang berharga dari pengalaman² Partai disekitar pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, dan membenarkan pendapat Politbiro tentang pentingnya pendidikan mengenai situasi yang dinegeri kita seringkali berubah dengan tjepat, agar dengan demikian pelaksanaan taktik² Partai berdjalan lebih baik. Bahan untuk ini ialah harian² Partai dan siaran² lainnja dari Partai.

Sidang membenarkan sepenuhnya sikap Sekretariat CC terhadap Kawan Alimin yang mengetjam politik front persatuan yang dilakukan oleh Partai. Berdasarkan pengalaman ini diputuskan untuk mengadakan gerakan² pembetulan didalam Partai pada waktu² tertentu untuk mengatasi fikiran² burdjuis ketjil, fikiran² subjektivisme dan sektarisme. Dari gerakan mendiskusikan „Keterangan 3 Djuli 1956“, jaitu keterangan Sekretariat CC PKI mengenai siaran Kawan Alimin, anggota² Partai dapat menarik pelajaran betapa berbahajanja djika seorang anggota Partai terlepas samasekali dari kehidupan dan perdjuaan massa dan dihindjapi penyakit individualisme ber-lebih²an. Djuga dapat ditarik pelajaran tentang tjara² yang keliru dan yang benar bila seorang anggota mau mengkritik politik dan pimpinan Partai, pelajaran tentang berbahajanja oportunisme „kiri“ dan pelajaran tentang tjara²nja menghadapi anggota Partai yang membuat kesalahan. Seorang anggota Partai yang membikin kesalahan, djika bersedia mengadakan selfkritik dan mau menempatkan kepentingan Partai diatas kepentingan dirinja sendiri, harus dianggap sebagai anggota yang baik kembali.

Tetapi bagaimanapun djuga banjaknja bentuk² pendidikan dan tidak samanja isi pelajaran, laporan Kawan D.N. Aidit menekankan bahwa hakekatnja adalah tetap, jaitu pendidikan tentang soal² fundamental Merxisme-Leninisme, pendidikan tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh, pendidikan melawan ideologi tuantanah dan ideologi burdjuis serta ideologi non-proletar lainnja didalam Partai.

Sidang sependapat dengan laporan bahwa berdasarkan gejala yang ada, harus diachiri kenjataan dikalangan sementara fungsionaris yang hendak memisahkan pekerdjaan Partai dengan pekerdjaan memimpin massa dengan melalui kritik dan selfkritik dan Comite² yang bersangkutan.

Tentang adanya beberapa kader yang menondjolkkan kepentingan dan keinginan diri sendiri, misalnja dalam hubungan penentuan anggota² DPR dan Konstituante, diserukan oleh laporan untuk ingat, bahwa tiap Komunis sebagai anggota Partai klas Buruh, harus memiliki sifat² klas buruh, jaitu sifat yang tidak mementingkan diri sendiri, mengakui harus adanya pimpinan yang memusat, menjedari perlunja hidup berorganisasi dan berdisiplin, mengakui perlunja ada kerdja kolektif dan pembagian pekerdjaan yang tepat.

Sidang djuga memandang perlunja mentjegah pemudjaan perseorangan, dengan lebih menekankan perlunja senantiasa setia pada prinsip sentralisme-demokratis, pada prinsip pemaduan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan dan bahwa Partai harus senantiasa mendasarkan diri pada massa, mendjalkan garis massa.

Achirnja sidang pleno ke-IV CC menjambut dengan gembira petundjuk dalam laporan tentang kewadajiban mengembangkan kritik dan selfkritik, disamping itu mengachiri gejala se-olah² satu²nja sasaran kritik dan selfkritik ialah sifat² dan tingkahlaku perseorangan. Kritik dan selfkritik haruslah terutama disasarkan pada pekerdjaan. Dengan demikian kritik dan selfkritik tidak lagi mendjadi „barang musiman“ yang hanya diadakan kalau ada pemilihan badan pimpinan dan kalau ada ketegangan² dalam sesuatu badan kolektif, tapi benar² mendjadi satu dengan Partai seibarat satunja kuku dengan daging. Kritik dan selfkritik harus dilakukan dengan tulus ichlas untuk memperbaiki diri dan untuk membantu kawan memperbaiki diri dengan tudjuan mempersatukan fikiran didalam Partai. Kita melakukan perdjuaan ideologi didalam Partai dengan berpangkal pada persatuan dan melalui kritik-selfkritik menudju persatuan.

Berpedoman pada laporan Politbiro tersebut diatas, sidang pleno ke-IV CC yang bersedjarah ini mempunjai kejakinan bahwa Partai kita, Partai Komunis Indonesia, akan mampu memenuhi tugasnja yang mulia dan berat: mewujudkan tuntutan² Rakjat sekarang dan selandjutnja melaksanakan semua tuntutan Revolusi Agustus yang berpangkal pada sembojan „Hapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar²nja“.

Sidang Pleno ke-IV CC PKI

Djakarta, 2 Agustus 1956

Resolusi tentang tulisan Redaktur Ekonomi „Harian Rakjat” tertanggal 5 Djuni, 21 Djuni dan 12 Djuli 1956 tentang Kemungkinan Peralihan Indonesia ke „Sosialisme”

Laporan Politbiro „Bersatu Untuk Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus” yang disahkan oleh Sidang Pleno ke-IV Central Komite PKI antara lain mengandung kesimpulan bahwa masalah kemungkinan peralihan Indonesia ke „Sosialisme” seperti yang dinyatakan dalam tulisan Redaktur Ekonomi „Harian Rakjat” pada tgl. 5 Djuni, 21 Djuni dan 12 Djuli 1956 telah dikemukakan setjara kurang tepat.

Dalam membahas soal ini lebih dahulu harus djelas dimengerti apa yang sudah dirumuskan dalam Laporan Politbiro kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI. Sebagai suatu langkah peralihan untuk dapat melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 PKI memperjuangkan terbentuknya suatu Pemerintah Koalisi Nasional tipe lama, yang didasarkan atas suatu Program Bersama yang madju seperti yang telah dijelaskan dalam Laporan Politbiro tsb. dan yang kemudian menudju kesatu sistim kekuasaan Rakjat yang akan mampu melaksanakan perubahan² sosial yang fundamental. Laporan tsb. djuga telah mendjelaskan bahwa djika menurut kemauan kaum Komunis maka kita memilih peralihan dari keadaan Indonesia sekarang kesuatu sistim kekuasaan Rakjat setjara damai atau lewat parlemen.

Tulisan² Redaktur Ekonomi „HR” tsb. telah memberi nilai yang ber-lebih²an kepada arti dari apa yang dinamakan unsur² sosialis dalam UUD Proklamasi dan UUDS RI seperti yang dinyatakan terutama dalam tulisan khusus didalam „Harian Rakjat” tgl. 5 Djuni 1956. Akibatnya ialah bahwa dalam tulisan „Harian Rakjat” tg. 12 Djuli setjara ber-lebih²an unsur² tsb. dinyatakan sebagai suatu perumusan pokok dari peralihan sistim ekonomi Indonesia dari setengah-djadjahan ke Demokrasi Rakjat.

Kesimpulan itu pada dasarnya disebabkan oleh dan dengan sendiridja bisa menimbulkan akibat² adanya pandangan dan pengertian yang kurang menjedari rol memimpin dari klas buruh dan pe-

lopornja serta keharusan untuk menggalang kekuatan massa terutama sekali kekuatan kaum tani.

Tulisan pada tanggal 5 Djuni, yang menyatakan bahwa Sosialisme sebagai ide sekarang sudah menguasai sebagian besar umat manusia, adalah benar. Djuga benar utjapan² dari P.M. Nehru dan P.M. Abdel Nasser yang menyatakan kehendak dan niat mereka untuk membangun masjarakat Sosialis dinegeri mereka. Lepas dari sebab² apa mereka berbuat demikian, kita menghargai niat dan kemauan mereka untuk mengatur masjarakat dan ekonomi negeri mereka menurut prinsip² Sosialisme, sekalipun kita tidak tahu bagaimana tjara mereka hendak melaksanakannya. Demikian pula sikap kita terhadap niat beberapa partai lain yang mau membangun Sosialisme di Indonesia.

Mengenai soal pembangunan Sosialisme kita kaum Komunis sudah mempunyai ilmu dan pengalamannya sendiri, jaitu Marxisme-Leninisme sebagaimana yang sudah diudji dan dibuktikan kebenarannya oleh pengalaman praktek membangun masjarakat sosialis yang sekarang sudah mendjadi kenyataan di-negara² kubu sosialis. Menurut ilmu dan pengalaman Marxis-Leninis peralihan kesistim kekuasaan Rakjat hanya bisa dilaksanakan oleh suatu kekuatan massa yang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh. Menurut ilmu dan pengalaman Marxis-Leninis, industrialisasi sosialis tidak mungkin bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa membebaskan dan mengembangkan seluruh kekuatan² produktif anti-feodal di-desa². Ilmu dan pengalaman ini adalah suatu kebenaran umum yang djuga sepenuhnya berlaku untuk Indonesia.

Mengenai keadaan di Jugoslavia yang djuga dikemukakan dalam tulisan pada tanggal 12 Djuli tjukup kiranya ditegaskan bahwa negeri itu dibawah pimpinan Liga Komunis Jugoslavia sekarang sedang berusaha mengatasi segala kesukaran terutama dalam lapangan agraria, dalam membangun Sosialisme.

Laporan Politbiro pada Sidang Pleno ke-IV CC PKI telah djelas menundjukkan perspektif perkembangan revolusi Indonesia dimasa datang dalam proses peralihannya kekekuasaan Rakjat, sebagai persiapan untuk peralihan ke Sosialisme.

Dengan adanya koreksi ini maka pikiran² dan pandangan² yang kurang tepat yang ada didalam dan yang ditimbulkan oleh tulisan² Redaktur Ekonomi „Harian Rakjat” tsb. hendaknya selekasnja bisa dihilangkan.

Sidang Pleno ke-IV CC PKI

Djakarta, 2 Agustus 1956.

Resolusi Tentang Gedung Kebudayaan

Sidang pleno ke-IV CC PKI dalam salahsatu diskusinja menjimpulkan, bahwa salahsatu sebab jang mendjadi penghalang perkembangan kehidupan kebudayaan Rakjat dan peningkatan taraf kebudayaan kader² PKI ialah karena tidak adanya atau sangat kurangnya gedung pertemuan jang dapat digunakan untuk pameran², latihan² dan pertundjukan² kesenian, tjeramah² dan seminar² tentang kebudayaan. Oleh karena itu sidang pleno CC memutuskan antara lain agar PKI lebih sungguh² lagi memperdjuangkan dan menuntut kepada pemerintah Pusat dan Daerah supaya mengadakan atau memperbanyak gedung² pertemuan jang dapat dipergunakan untuk perkembangan kebudayaan Rakjat.

Disamping usaha diatas, khusus untuk keperluan ibukota Republik Indonesia, Sidang Pleno CC memutuskan supaya Politbiro mengorganisasi gerakan pengumpulan keuangan dan sokongan² lainnja untuk mendirikan satu Gedung Kebudayaan, jang disamping dapat digunakan oleh PKI sendiri djuga dapat digunakan untuk pameran², latihan² dan pertundjukan² kesenian, tjeramah² dan seminar² tentang kebudayaan Rakjat. Untuk ini Politbiro dalam waktu jang tidak lama lagi supaya mengeluarkan seruan. Sidang Pleno ke-IV CC PKI menjerukan kepada semua anggota dan simpatisan PKI diseluruh Indonesia supaya menjambut hangat seruan tersebut dan membantu dengan se-dapat²nja agar dalam waktu jang tidak begitu lama di Djakarta dapat didirikan Gedung Kebudayaan, jang dapat didjadikan kebanggaan semua orang progresif Indonesia.

Sidang Pleno ke-IV
Central Komite PKI

Djakarta, 2 Agustus 1956.

Resolusi Tentang Penjempurnaan Sekretariat Central Komite PKI

Sidang Pleno ke-IV Central Komite PKI jang diperluas dengan Sekretaris² Komite² Daerah Besar jang bukan anggota CC, setelah dengan mendalam mendiskusikan tentang tugas² Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi, memutuskan untuk menjempurnakan Sekretariat Central Komite, dengan menetapkan Sekretariat Central Komite terdiri dari kawan²:

1. *D.N. Aidit*, Sekretaris Djendral CC,
2. *M.H. Lukman*, Wakil Sekretaris Djendral I CC,
3. *Njoto*, Wakil Sekretaris Djenderal II CC,
4. *Sudisman*, anggota Politbiro,
5. *Jusuf Adjitorop*, anggota CC,
6. *Siswojo*, anggota CC.

Anggota² Politbiro CC tetap terdiri dari kawan² jang dipilih oleh sidang pleno ke-I CC pilihan Kongres Nasional ke-V PKI.

Disamping itu Central Komite menetapkan Kawan Siswojo (tjalon-anggota CC) sebagai anggota CC, pengganti almarhum Kawan Bachtaroeuddin.

*Sidang Pleno ke-IV
Central Komite PKI*

Djakarta, 2 Agustus 1956.

Resolusi Tentang Kawan Alimin

Sidang pleno ke-IV Central Komite PKI yang diperluas, setelah mendengar dan mendiskusikan setjara mendalam laporan Politbiro tentang keterangan Sekretariat CC ttg. 3 Djuli 1956 mengenai siaran Kawan Alimin ttg. 25 Maret 1956, membenarkan sepenuhnya keterangan Sekretariat CC tersebut.

Selanjutnya sidang pleno juga membenarkan diserahkannya soal ini oleh Politbiro kepada Komisi Kontrol Pusat (KKP) untuk memeriksa lebih lanjut tuduhan² Kawan Alimin, terutama yang berhubungan dengan tuduhan bahwa Pimpinan Partai di beberapa daerah (Djawa Barat dan Djawa Tengah) se-olah² dengan sendang tidak menghidupkan demokrasi intern Partai dan mengisolasi kader² yang sanggup bekerja. Sidang pleno berpendapat bahwa Komisi Kontrol Pusat telah dengan teliti memeriksa tuduhan² tersebut.

Dari laporan KKP sidang pleno CC menjadi lebih yakin bahwa semua tuduhan dan dugaan Kawan Alimin adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan kenyataan, karena pada pokoknya menurut pengakuan Kawan Alimin sendiri tuduhan² itu didasarkan atas keterangan beberapa orang yang belum diselidiki kebenarannya. Hal ini diperkuat oleh laporan anggota² CC yang memimpin Partai di-daerah², termasuk pemimpin² Partai di Djawa Tengah dan Djawa Barat.

Tentang pelaksanaan demokrasi intern Partai yang digambarkan oleh Kawan Alimin seolah-olah tidak ada sejak tahun 1951 sampai sekarang, sidang pleno CC menganggap perlu untuk menegaskan bahwa justru dibawah pimpinan Partai sekarang pada tahun 1951 untuk pertama kalinya disusun Konstitusi Partai yang menjamin adanya kehidupan demokrasi intern Partai. Disamping itu dalam tiap² sidang CC, dalam berbagai tulisan pemimpin² Partai dan dalam aktivitas sehari² tidak henti²nya pimpinan Partai sekarang mendidik anggota² Partai supaya mengembangkan kehidupan demokrasi intern Partai. Dalam hal ini justru Kawan Alimin sendiri yang samasekali tidak berusaha untuk ikut mengembangkan kehidupan demokrasi intern Partai, dengan menolak tiap usaha Partai untuk membikin supaya Kawan Alimin ambil bagian

disalahsatu organisasi Partai, sesuai dengan kemampuan Kawan Alimin.

Adalah satu tuduhan yang kedji dari Kawan Alimin terhadap pimpinan Partai yang seolah-olah mengisolasi kader² yang sanggup bekerja, yang pintar dan berpikiran sehat supaya jangan berpengaruh dan jangan lebih banyak bekerja bagi kemajuan Partai. Laporan KKP maupun laporan anggota² CC yang memimpin Partai di-daerah-daerah membuktikan tidak benarnya tuduhan ini. Apa yang dimaksudkan oleh Kawan Alimin dengan „isolasi“, setelah mendengar laporan pemeriksaan KKP yang diperkuat oleh laporan anggota² CC yang memimpin Partai di-daerah², sebetulnya tidak lain daripada pelaksanaan politik kader berhubungan dengan mutasi² dan promosi² yang wajar dan memang sangat diperlukan. Yang dimaksudkan Kawan Alimin dengan „klik“ sebetulnya adalah hubungan kerja dan pembagian pekerjaan yang biasa dan yang memang diperlukan didalam Partai.

Pengalaman dengan Kawan Alimin ini membikin bertambah jelas betapa tepatnya politik Partai sekarang yang tidak henti²nya menekankan pentingnya semua anggota Partai setia pada Konstitusi Partai, supaya masuk dan bekerja aktif disalahsatu organisasi Partai, sebagai syarat mutlak untuk ikut menghidupkan dan ambil bagian dalam kehidupan demokrasi intern Partai.

Sesuai dengan keterangan 3 Djuli 1956 dari Sekretariat CC, sidang pleno menjerukan kepada seluruh anggota Partai supaya tidak henti²nya memperkuat Partai dan memperkuat front persatuan sebagai syarat mutlak untuk kemenangan Revolusi Indonesia, dan dengan sekuat tenaga melikwidasi fikiran² subjektif dan sektaris dalam bentuk anti front persatuan seperti yang dinjatakan oleh Kawan Alimin.

Sidang pleno CC sepenuhnya membenarkan sikap Politbiro CC yang selama ini dengan sangat sabar dan telaten berusaha supaya Kawan Alimin tetap berada dalam barisan Partai, tidak terputus sedjarahnya sebagai anggota Partai dan tetap menempuh jalan yang benar, jalan untuk kemenangan revolusi dan Rakjat Indonesia.

Sidang pleno juga membenarkan keputusan KKP untuk membatasi tindakan disiplin kepada Kawan Alimin hanya berupa peringatan, selama masih ada tanda² kesediaan Kawan Alimin untuk menempatkan kepentingan Partai diatas kepentingan dirinya, sebagaimana terbukti dengan surat pengakuan salahnya tanggal 10 Djuli 1956.

Sebaliknya, jika kemudian ternyata bahwa samasekali sudah tidak ada kesediaan Kawan Alimin untuk menempatkan kepentingan Partai diatas kepentingan dirinya, maka untuk kebaikan Partai kita, memang sudah tidak pada tempatnya lagi Kawan Alimin berada didalam barisan Partai.

*Sidang Pleno ke-IV
Central Komite PKI*

Djakarta, 1 Agustus 1956.

**

Lampiran

**Keterangan Central Komite PKI Mengenai Siaran Kawan Alimin
Tanggal 25 Maret 1956**

- I. Pada hari ini, 3 Djuli 1956, oleh harian „Indonesia Raya” yang terbit di Djakarta disiarkan kutipan² dari siaran Kawan Alimin tertanggal 25 Maret 1956, yaitu siaran yang pada pokoknya mengetjam politik front persatuan yang didjalankan oleh PKI sekarang dan mengetjam pimpinan PKI sekarang. Pada hari ini juga siaran Kawan Alimin tsb. disampaikan oleh Sekretariat Central Komite PKI kepada pers, juga disampaikan untuk dimuat selengkapnja kepada redaksi „Harian Rakjat”.
- II. Perlu diterangkan, bahwa pada mulanja Sekretariat Central Komite PKI menganggap tidak perlu mengumumkan siaran Kawan Alimin tsb., karena berpendapat bahwa persoalannya sudah selesai berhubung siaran tsb. sudah didiskusikan antara Kawan Alimin dengan Sekretariat Central Komite PKI pada tanggal 10 Mei 1956, dimana Kawan Alimin dengan tertulis menjatakan mentjabut siaran tsb. Pernyataan pentjabutan oleh Kawan Alimin terhadap siarannya tanggal 25 Maret 1956 pada hari ini juga disampaikan kepada pers.
- III. Karena siaran Kawan Alimin tsb. sudah diumumkan oleh pers, maka adalah kewadajiban Sekretariat Central Komite PKI untuk menjelaskan pendiriannya terhadap siaran tsb. kepada anggota², tjalon-anggota² dan simpatisan² PKI serta kepada chalajak ramai. Dengan menjadi umumnja soal ini, akan menjadi teranglah satu soal yang selama ini merupakan salahsatu perintang dalam usaha untuk menjapai kebulatan dalam ideologi, politik dan organisasi Partai. Demikianlah hendaknya tiap²

anggota dan tjalon-anggota PKI menerima pendjelasan Sekretariat Central Komite ini. Dalam pernyataan pentjabutan siarannya, Kawan Alimin mengakui bahwa siarannya tanggal 25 Maret 1956 itu, dilihat dari tjaranja menjusun dan memajukan kritik maupun dilihat dari sudut materinya adalah tidak benar. Tentang ini pendjelasan Sekretariat Central Komite PKI adalah sbb :

- IV. Mengenai tjaranja menjusun dan memajukan kritik, memang Kawan Alimin sudah melanggar ketentuan² yang ada dalam Konstitusi Partai. Konstitusi PKI mendjamin, bahwa tiap² anggota berhak untuk „Ambil bagian dalam diskusi² yang bebas dan luas tentang masaalah² pelaksanaan politik Partai dalam rapat² Partai dan penerbitan Partai”, tiap² anggota berhak „mengajukan usul² atau keterangan² kepada tiap organisasi Partai, sampai kepada Central Komite”, dan tiap² anggota berhak „Mengkritik tiap² fungsionaris Partai dalam rapat² Partai”. Demikian a.l. dinjatakan oleh fasal 7 Konstitusi PKI. Tetapi, pemakaian hak² ini tidak seperti yang sudah dilakukan oleh Kawan Alimin, yaitu dengan membikin siaran sendiri dan menjebarkan siaran itu kepada anggota² Partai yang berdekatan dengan dirinya dan kepada orang² luar Partai. Sekretariat Central Komite PKI menerima siaran Kawan Alimin tsb. untuk yang pertama kali tidak dari Kawan Alimin sendiri, tetapi dari anggota Partai yang menerima siaran tsb. yang tidak menjetujui tjarakerdja Kawan Alimin. Kawan Alimin baru memberikan siarannya sesudah ia tahu bahwa Sekretariat Central Komite PKI sudah mengetahui adanya siaran tsb.

Sebetulnja tjarakerdja Kawan Alimin yang individuil, yang samasekali tidak mengindahkan kolektif, yang memusatkan segala sesuatu tidak kepada organisasi Partai tetapi pada dirinya sendiri, sudah sering diperingatkan oleh Sekretariat Central Komite PKI. Sekretariat Central Komite sudah sering memperingatkan supaya Kawan Alimin tidak membuka „praktek sendiri”, supaya ia mengindahkan organisasi Partai. Peringatan Sekretariat Central Komite ini tidak diperhatikan oleh Kawan Alimin, ia terus membuka „praktek sendiri”, dan membikin hubungan² sendiri dengan sedjumlah ketjil anggota² Partai yang kebetulan dikenalnya dari dekat, kebanjakannya karena sahabat lama.

- V. Mengenai bahan (materi) yang dikemukakan dalam siaran Kawan Alimin tsb. banyak yang perlu dibahas, tetapi untuk kali ini tjukup dikemukakan beberapa hal sadja yang diantaranya sebagai berikut :

A. Perlu dinjatakan bahwa kalimat² jang digunakan dalam siaran tsb. adalah ruwet sehingga siaran tsb. dengan djelas sekali menggambarkan keruwetan fikiran dari sipenjusun. Disamping itu, karena keruwetan bahasanja, adalah sukar menangkap apa jang dimaksudkan oleh penulisja dengan kalimat²nja. Tetapi, beberapa pokok fikiran jang dikemukakan dalam tulisan tsb. tidak sukar menangkapja, apalagi djika sudah mengenal Kawan Alimin dari dekat.

B. Dalam siarannja Kawan Alimin mengatakan, bahwa PKI dilahirkan „guna menentang *right-opportunism* dan mentjegah langsungja aliran *centrisme*“. Djika ini benar, alangkah terbatasnja tudjuan PKI, jaitu didirikan hanja untuk menentang oportunisme kanan dan *centrisme*! Selain daripada itu, tiap² anggota PKI jang mengerti sedjarah PKI tahu, bahwa penjakit jang terpokok, terutama ketika PKI baru didirikan, ialah penjakit „oportunisme kiri“. Karena penjakit inilah, dimasa jang lampau Partai sering melakukan tindakan² jang belum waktunja, jang kesusu, dan akibatnja membikin Partai mendjadi terisolasi dari massa dan memudahkan kaum provokator memprovokasi Partai. Tentang oportunisme kiri ini Kawan Alimin sepatahpun tak menjebutnja didalam siarannja. Mau tidak mau timbul pertanyaan: Apakah dengan siaran tsb. dimaksudkan untuk menghidupkan oportunisme „kiri“ kembali didalam Partai dan dengan demikian membuka pintu untuk memudahkan masuknja berbagai provokasi jang memang sekarang dengan giat sedang disiapkan oleh kaum reaksioner?

C. Kawan Alimin mengedjek politik persatuan jang sekarang didjalankan oleh PKI dan tidak setudju politik kerdjasama antara proletariat dengan klas² dan golongan² lain (dinamakan oleh Kawan Alimin politik „klas-kollaborasi“). Mengenai ini, umumnja anggota² dan tjalon-anggota² PKI mengerti, bahwa pada waktu sekarang adalah kewadajiban tiap² Komunis untuk mengadakan kerdjasama (kollaborasi) antara proletariat dengan klas² dan golongan² lain, jaitu antara proletariat dengan kaum tani, burdjuasi ketjil kota, intelektuil revolusioner dan burdjuasi nasional, atau kerdjasama antara PKI dengan partai² demokratis lainnja. Hanja dengan adanja front persatuanlah kewadajiban PKI dalam keadaan seperti Indonesia sekarang akan dapat dilaksanakan, jaitu kewadajiban mengusir seluruh kekuasaan imperialis dan menghapuskan kekuasaan feodal. Kenyataan sekarang menundjukkan, bahwa jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme bukan hanja proletariat, tetapi djuga klas² dan golongan² lain, bukan hanja PKI, tetapi

djuga partai², golongan² dan perseorangan² jang demokratis dan patriotik lainnja. Djika dalam kenjataanja memang ada klas² dan golongan² lain diluar proletariat jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, mengapa proletariat dan PKI tidak harus bersatu dengan mereka. Kawan Alimin membantah satu kebenaran jang sangat sederhana, jaitu, bahwa tidak akan ada kemerdekaan klas kalau tidak ada kemerdekaan nasional.

Kawan Alimin menginginkan supaya PKI sekarang menggunakan „demokrasi proletar“ jang berarti „demokrasi sosialis“ dan supaya PKI melarang keras berlakunja sistim eksploitasi atas seorang oleh orang lainnja. Ini menundjukkan bahwa Kawan Alimin tidak sedikitpun mengerti tentang tingkat revolusi Indonesia sekarang, jaitu tingkat revolusi jang masih bersifat nasional dan demokratis, dan bukan tingkat revolusi proletar atau revolusi sosialis.

D. Kawan Alimin dalam siarannja menjatakan „supaja semua anggota Partai dapat berbitjara dan mengeluarkan pendapat se-luas²nja“. Hal ini didjamin oleh Konstitusi Partai, jaitu Konstitusi jang dibikin dibawah pimpinan Partai sekarang, dan hal ini didalam praktek selalu digunakan oleh sebagian besar anggota² dan tjalon-anggota² PKI. Pimpinan Partai tidak henti²nja mendorong supaya hak tsb. digunakan se-baik²nja oleh setiap anggota Partai dengan djalan ambil bagian jang aktif dalam kehidupan intern Partai.

Tetapi adalah keliru, djika keleluasaan „berbitjara dan mengeluarkan pendapat“ disamakan dengan liberalisme seperti jang selama ini dilakukan oleh Kawan Alimin, jang djika diteruskan pasti berakibat merusak disiplin Partai dikalangan sebagian anggota² Partai. Jang didjamin Konstitusi Partai bukanlah keleluasaan untuk me-nusuk² anggota² Partai supaya memetjahbelah Partai dan memetjahbelah front persatuan. Ini bukan keleluasaan berbitjara dan mengeluarkan pendapat seperti jang didjamin oleh Konstitusi Partai. Ini bertentangan dengan Konstitusi Partai.

E. Bagi pimpinan PKI, kedjadian disekitar siaran Kawan Alimin tsb. bukanlah sesuatu jang mengedjutkan, karena Kawan Alimin sudah lama dikenal didalam Partai sebagai seorang jang tidak mau terikat oleh organisasi Partai, jang selamanja minta dispensasi dari disiplin Partai jang ringan sekalipun, jang pada hakekatnja menolak disiplin. Ia mengandjurkan supaya orang lain memegang disiplin, tetapi bagi diri sendiri supaya diberikan dispensasi.

Bagaimana jika seorang seperti Kawan Alimin yang tidak mau terikat oleh organisasi Partai dan biasa minta dispensasi dari disiplin yang ringan sekalipun, bisa mengikuti kehidupan intern Partai, dimana ia dengan leluasa dapat mengadakan pendapat²nya dan kritik²nya? Bukanlah kesalahan pemimpin² PKI lainnya dan bukanlah kesalahan Kongres ke-V PKI, jika dalam Kongres ke-V yang lalu Kawan Alimin tidak terpilih menjadi anggota Central Komite, walaupun ia ditjalankan.

VI. Demikianlah keterangan Sekretariat Central Komite PKI mengenai siaran kawan Alimin tanggal 25 Maret 1956. Tentu timbul pertanyaan dari kalangan PKI sendiri maupun dari kalangan luar-PKI mengenai sikap pimpinan PKI sekarang terhadap kawan Alimin. Sikap pimpinan PKI sekarang banyak tergantung pada sikap Kawan Alimin sendiri mengenai kesalahannya. Pimpinan Partai akan bertindak dengan keras terhadap siapa saja yang sengaja hendak merusak disiplin Partai dan hendak memetjahbelah Partai. Tetapi pimpinan Partai akan bertindak yang sangat bijaksana terhadap anggota² dan tjalon-anggota² Partai yang sesat dan sudah terlibat dalam pertjoangan² Kawan Alimin merusak disiplin Partai, memetjahbelah Partai dan memetjahbelah front persatuan. Asal mereka mau mengadakan selfkritik atas kesalahannya, maka mereka akan dianggap sebagai kawan se-Partai yang baik kembali. Tetapi bagi mereka yang meneruskan usaha merusak disiplin Partai dan memetjahbelah persatuan Partai tidak ada tempat didalam PKI. PKI bukan partai tukang² intrik dan bukan partai yang menjadi tempat memupuk ambisi perseorangan yang didorong oleh individualisme yang berlebih-lebihan.

Perlu juga diterangkan, bahwa siaran Kawan Alimin tsb. diatas (yang dironeo) dibubuhi tjaap merah dengan huruf² Tionghoa (huruf kandji). Tidak terang apa maksudnya, tetapi sangat berbau intimidasi dan provokatif.

Kepada seluruh anggota dan tjalon-anggota Partai diserukan supaya, diatas segala-galanya, menjaga persatuan didalam Partai seperti yang diamanatkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.

Perkuat persatuan Partai dan perkuat persatuan nasional!

Sekretariat
Central Komite PKI

Djakarta, 3 Djuli 1956.

Keterangan Kawan Alimin

1. Saya mengakui, adalah sudah tepat sikap Sekretariat CC PKI dengan penjelasan tanggal 3 Djuli 1956 yang dimuat disurat kabar „Harian Rakjat” tanggal 4/7-1956 bersama tulisan saya tanggal 25 Maret 1956, setelah oleh surat kabar „Indonesia Raya” tanggal 3/7-1956, disiarkan kutipan² tulisan saya tanggal 25 Maret 1956, yang sebetulnya telah saya tjabut dengan pernyataan 10 Mei 1956 jl.
2. Isi pernyataan saya tanggal 10 Mei 1956, dimana saya dengan tertulis telah mentjabut tulisan saya tanggal 25 Maret 1956, tetap saja akui, karena baik tentang tjara saya mengemukakan kritik² kepada pimpinan Partai adalah bertentangan dengan fasal² Konstitusi Partai yang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V, dimana saya turut serta, maupun mengenai isi pokok² pikiran yang saya madjukan dalam tulisan tgl. 25 Maret 1956 tersebut, saya akui terang berlawanan dengan garis politik Partai yang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI.
3. Saya mengakui, bahwa disamping pentingnya melawan penja- kit oportunisme kanan dan centrisme, sedikitpun tidak boleh dilalaikan perdjuangan melawan oportunisme „kiri” dikalangan barisan Partai.
4. Pengakuan yang saya rumuskan dengan tertulis dan saya tandatangi ini, saya buat setelah *mejakini* kesalahan² saya, didalam diskusi yang bersifat terbuka dengan wakil CC tanggal 10 Djuli 1956.

Djakarta, 10 Djuli 1956.

Saja,

(A l i m i n)

Keterangan Kawan Alimin

Berhubung dengan adanya suara-suara yang termuat dalam beberapa surat kabar bahwa saya telah mengumumkan mundur dari PKI semuanya itu adalah tidak benar. Sesuai dengan berita yang dimuat dalam *Harian Rakjat* tanggal 3 Agustus 1956, maka dengan ini saya mengumumkan tetap tinggal dalam PKI. Saya tetap berideologi Komunis dan tetap menjokong pendirian PKI.

Djakarta, 3 Agustus 1956.

ttd

(Alimin)

**

Pernyataan Keluar Kawan Alimin

Kira² semendjak tiga bulan yang lampau (Djuni, Djuli dan Agustus) kesehatan saya semakin lama menjadi buruk dan oleh karena itulah saya terpaksa mengambil keputusan yang terakhir, yaitu mengundurkan diri dari PKI baik dalam lapangan politik maupun organisasi, karena saya pada waktu ini lebih mengingat akan kesehatan saya yang lebih berharga daripada apapun juga.

Adapun pengunduran diri saya itu dimulai sedjak detik surat ini saya tulis, yaitu tanggal 8 Agustus 1956. Maka sedjak saat itu saya menyatakan bahwa saya bukan lagi anggota PKI.

Meskipun demikian, dengan bangga saya akan tetap setia dan konsekwen mempertahankan ideologi saya sebagai seorang Komunis. Djadi teranglah bahwa dalam soal ideologi saya tetap konsekwen dan tidak dapat untuk mengadakan tawar-menawar lagi.

Indonesia telah merdeka, dan saya ingin hidup merdeka sebagaimana yang terdapat pada orang biasa yang hidupnya terlepas dari segala ganggu-gugat dan intimidasi dari siapapun juga.

Sebagai penutup saya menjerukan selamat tinggal kepada segenap orang² yang djudjur dan yang masih terus berdjuaang demi kepentingan kelas yang tertindas dan terhisap.

Djakarta, 8 Agustus 1956.

ttd

(Alimin)

ISI

<i>Sekedar Pengantar</i>	3
<i>I Situasi Internasional dan Dalamnegeri</i>	7
<i>II Tiga Kekuatan — Tiga Konsep Dalam Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945</i>	15
<i>III Politik Partai Komunis Indonesia</i>	22
<i>Program Umum</i>	23
<i>Tuntutan² Sekarang</i>	28
1. <i>Sikap terhadap kolonialisme Belanda</i>	35
2. <i>Kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat</i>	36
3. <i>Front Persatuan Nasional</i>	37
4. <i>Soal tanah dan gerakan tani</i>	39
5. <i>Perekonomian nasional dan Plan Lima Tahun</i>	40
6. <i>Perdjuaangan Parlementer</i>	43
7. <i>Pemerintah koalisi nasional</i>	47
8. <i>Masaalah sukubangsa dan minoritet keturunan asing</i>	50
9. <i>Masaalah kebudayaan, pendidikan dan inteligensia</i> ...	52
<i>IV Persatuan Dalam Partai Adalah Sjarat Mutlak Untuk Melaksanakan Tugas² Partai</i>	53
<i>Masaalah Pendidikan Didalam Partai</i>	64
<i>Resolusi Tentang Laporan Umum Politbiro Kepada Sidang Pleno ke-IV Central Komite PKI yang diperluas</i>	76
<i>Resolusi Tentang Tulisan Redaktur Ekonomi „Harian Rakjat“ Tertanggal 5 Djuni, 21 Djuni dan 12 Djuli 1956 Tentang Kemungkinan Peralihan Indonesia ke “Sosialisme”</i>	86
<i>Resolusi Tentang Gedung Kebudayaan</i>	88
<i>Resolusi Tentang Penjempurnaan Sekretariat Central Komite PKI</i>	89

Resolusi Tentang Kawan Alimin	90
Lampiran	
<i>Keterangan CC PKI Mengenai Siaran Kawan Alimin</i>	
<i>tgl. 25 Maret 1956</i>	<i>92</i>
<i>Keterangan Kawan Alimin</i>	<i>97</i>
<i>Keterangan Kawan Alimin</i>	<i>98</i>
<i>Pernyataan Keluar Kawan Alimin</i>	<i>98</i>

Ralat

Halaman 47, alinia dua, baris kelima dari bawah, jang berbunji :
 „ditangan tuantanah”, mestinja „ditangan komprador dan tuantanah”,

Halaman 61, baris ketudjuh dari bawah, jang berbunji :
 „melanggar sentralisme-demokratis”, mestinja „meninggal-
 kan garis massa, berarti melemahkan kesatuan dalam or-
 ganisasi”. Dengan ini kekeliruan diperbaiki.

Rp. 4.20